EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PT Insan Cendekia
Mandiri Group

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

Dr. Ferdinan, S.Pd., M.Pd.I.

Evaluasi Program Pendidikan Islam

Dr. Ferdinan, S.Pd., M.Pd.I.

Editor:
Sisi Febria Agami

Desainer:
Mifta Ardila

Sumber Gambar Kover:
www.freepik.com

Penata Letak:
Sisi Febria Agami

Proofreader:
Tim ICM

Ukuran:
xiv, 382 hlm, 15,5x23 cm

ISBN:

Cetakan Pertama:
Februari 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI : 020/SBA/20

PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI
(PT. INSAN CENDEKIA MANDIRI GROUP)

Perumahan Gardena Maisa 2, Blok F03, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27361
HP/WA: 0813-7272-5118
Website: www.insancendekiamandiri.co.id
E-mail: insancendekiamandirigroup@gmail.com

Daftar Isi

Daftar Tabel ..... **vii**

Daftar Gambar ..... **xi**

Prakata ..... **xiii**

BAB 1 Evaluasi Program Pendidikan Islam **1**

A. Konsep Evaluasi Program Pendidikan Islam 2
B. Ruang Lingkup Evaluasi Program Pendidikan Islam 24

BAB 2 Model Evaluasi Program **35**

A. Goal Oriented Evaluation Model (Model Evaluasi Berorientasi pada Tujuan) 39
B. Goal Free Evaluation Model (Model Evaluasi Terus-menerus) 40
C. Formatif Summatif Evaluation Model 45
D. Countenance Evaluation Model 47
E. CSE-UCLA Evaluation Model 55
F. CIPP Evaluation Model 57
G. Discrepancy Model 63
H. Evaluasi Model Kirkpatrick 64

BAB 3 Pelaksanaan Kegiatan Mutu Pendidikan Tinggi.....75

A. Mutu Pendidikan Tinggi 76
B. Penerapan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 99

BAB 4 Contoh Hasil Penelitian Evaluasi Program Pendidikan 155

A. Pendahuluan.....156
B. Tinjauan Teoritis 178
C. Metodologi Penelitian.....233
D. Evaluasi Program Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar.....245

Daftar Pustaka 375

Profil Penulis.....381

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Contoh Contoh Matriks Data pada Model Evaluasi 4 Level 70

Tabel 4.1 Matriks Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 169

Tabel 4.2 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer Terhadap Sistem Rekrutmen Tenaga Pendidik di Unismuh Makassar 259

Tabel 4.3 Jenjang Pendidikan Dosen 267

Tabel 4.4 Daftar Dosen yang memiliki NIDN 275

Tabel 4.5 Gambaran Jabatan Fungsional Akademik Dosen 279

Tabel 4.6 Persentase Jabatan Fungsional Akademik Dosen Unismuh Berdasarkan Fakultas 283

Tabel 4.7 Hasil Evaluasi Masukan (entecedents) Berdasarkan Kriteria/Standar Objektif Pemenuhan SDM Dosen Unismuh Makassar ... 291

Tabel 4.8 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer Terhadap Penyusunan Kurikulum Unismuh Makassar 297

Tabel 4.9 Standar Mutu Kurikulum Unismuh Makassar 309

Tabel 4.10 Hasil Evaluasi Masukan (*entecedents*) Observer Berdasarkan Kriteria/Standar Objektif Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Unismuh Makassar 315

Tabel 4.11 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Penguasaan Dosen dalam Menyusun dan Menyiapkan Administrasi Perkuliahan 319

Tabel 4.12 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Penguasaan Dosen dalam Pelaksanaan Perkuliahan 323

Tabel 4.13 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Penguasaan Dosen dalam Pelaksanaan Perkuliahan 326

Tabel 4.14 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Interaksi Dosen dengan Mahasiswa dalam Perkuliahan 333

Tabel 4.15 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Interaksi Dosen dengan Mahasiswa dalam Perkuliahan 335

Tabel 4.16 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Kemampuan Dosen dalam Melakukan Evaluasi Perkuliahan 339

Tabel 4.17 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Kemampuan Dosen dalam Melakukan Evaluasi Perkuliahan 344

Tabel 4.18 Hasil Evaluasi Proses (*Transactions*) Berdasarkan Kriteria/Standar Objektif Penyelenggaraan Program Penjaminan Mutu Unismuh Makassar 349

Tabel 4.19 Daftar Mahsiswa Setiap Prodi Anggkatan 2012/2013 357

Tabel 4.20 Lama Studi Mahasiswa Angkatan 2012/2013 358

Tabel 4.21 Indeks Prestasi Kelulusan Mahasiswa Angkatan 2012/2013 360

Tabel 4.22 Data Alumni yang Sudah Bekerja Angkatan 2012/2013 363

Tabel 4.23 Masa Tunggu Bekerja Alumni Angkatan 2012/2013 367

Tabel 4.24 Relevasi Latar Belakang Pendidikan dengan Pekerjaan Alumni Unismuh Makassar 369

Tabel 4.25 Hasil Evaluasi Hasil (Output dan Outcomes) Berdasarkan Kriteria/Standar Objektif Penyelenggaraan Program Penjaminan Mutu Unismuh Makassar 371

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Evaluasi model Stake 48

Gambar 2.2 Model Evaluasi CSE-UCLA 55

Gambar 3.1 Capaian Pembelajaran Lulusan Program studi 110

Gambar 4.1 Evaluasi model Stake 199

Gambar 4.2 Model Evaluasi CSE-UCLA 203

Gambar 4.3 Kerangka Konseptual 233

Gambar 4.4 Roda Deming 255

Gambar 4.5 Skema Evaluasi Masukan 257

Gambar 4.6 Diagram Jenjang Pendidikan Dosen Unismuh Makassar 269

Gambar 4.7 Diagram Jabatan Fungsional Akademik Dosen Unismuh Makassar 283

Gambar 4.8 Skema Evaluasi Masukan Standar Isi Pembelajaran 294

Gambar 4.9 Skema Evaluasi Proses 317

Gambar 4.10 Skema Evaluasi Hasil 355

Prakata

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas perkenan-Nya saya telah dapat menyelesaikan sebuah buku yang berjudul **Evaluasi Program Pendidikan Islam**. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian buku ini. Kepada keluarga, rekan sejawat, dan seluruh tim Insan Cendikia Mandiri yang telah melakukan proses penerbitan, Penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

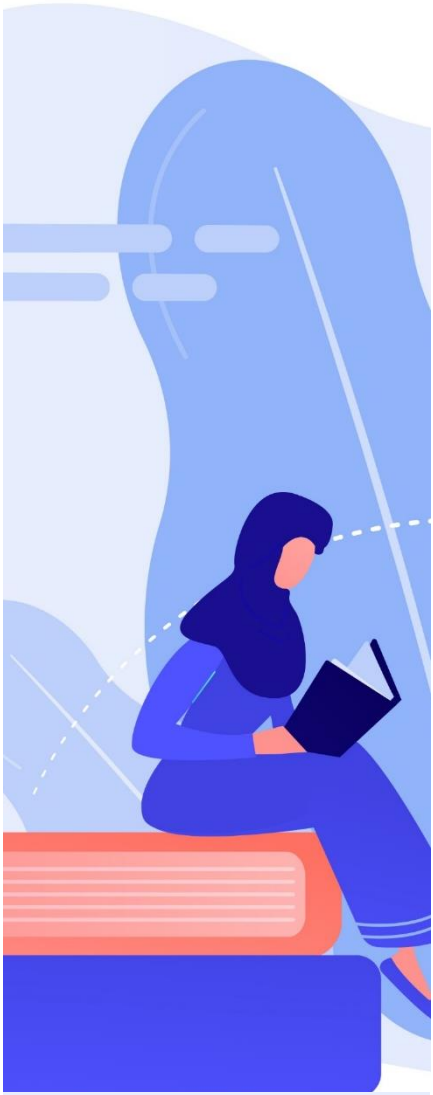

Evaluasi Program Pendidikan Islam

Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation,* dalam bahasa arab: *Al-Taqdiir*, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah *value*, dalam bahasa arab (*Al-Qiimah*). Dengan demikian, evaluasi pendidikan secara harfiah berarti penilaian dalam bidang pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan

01

A. Konsep Evaluasi Program Pendidikan Islam

1. Pengertian Evaluasi Program

   Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation,* dalam bahasa arab: *Al-Taqdiir*, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah *value*, dalam bahasa arab (*Al-Qiimah*). Dengan demikian, evaluasi pendidikan secara harfiah berarti penilaian dalam bidang pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.[1]

   Menurut *Al-Ghazali* arti evaluasi secara etimologis ialah *muhasabah* berasal dari kata *hasiba* yang berarti menghitung, atau kata *hasaba* yang berarti memperkirakan. Dalam menguraikan tentang evaluasi dapat berlandaskan pada QS. al-Hasyr/59:18 berikut

   يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

   Terjemahnya

   > Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,

[1]Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[2]

Berdasarkan ayat di atas, pengertian evaluasi dapat dijelaskan dengan memperhatikan kata وَلْتَنْظُرْ yang artinya sepadan dengan kata menimbang (قدر), memikirkan (فكر,تدبر), memperkirakan (قدر), dan membandingkan dan mengukur (قيس).[3]

Secara harfiah, evaluasi pendidikan *al-taqdir al-tarbawi* dapat diartikan sebagai penilaian dengan (bidang) pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan sebagai cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan.[4]

Ada beberapa istilah yang dapat dipergunakan untuk memahami evaluasi di dalam al-Qur'an yaitu *al-Hisab.* Kata hisab/hisaban disebutkan dalam Al-Qur'an. Secara etimologi, hisab berarti perhitungan. Arti lain dari kata hisab berarti bilangan (*al'addu*). Menurut

---

[2]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 547.

[3]Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al-Gazali tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 105.

[4]Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1992), h. 99.

Quraish Shihab, kata hisab dapat berarti perhitungan, pertanggungjawaban, batas atau dugaan. Al-hisab adalah prinsip evaluasi yang berlaku umum, mencakup teknik clan prosedur evaluasi Allah terhadap makhluknya. Dari sudut evaluasi pendidikan makna hisab/hisaban menunjukkan pertama, hasil evaluasi tergantung dari kesungguhan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal ujian. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah memotivasi peserta didik agar mereka sungguh-sungguh belajar dan serius da1am menjawab soal-soal ujian. Kedua, di akherat kelak perhitungan basil evaluasi manusia dilakukan sangat cepat. Evaluasi yang dilaksanakan Allah terhadap mahkluk-Nya pada hari penerimaan hasil evaluasi (pengadilan di akherat), maka manusia itu sendiri yang disuruh membaca atau memberikan penilaian terhadap hasil perbuatannya di dunia.[5] Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Isra'/17: 14 berbunyi

اِقْرَأْ كِتٰبَكَ ۗ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۗ

Terjemahnya

> (Dikatakan,) “Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas (amal) dirimu.”

[5]Lailial Muhtifah, *Evaluasi Pendidikan. Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal al Qalam, (Vol. 22, No 2, 2005), h. 247.

Rasulullah saw. bersabda yang artinya

> “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain” (Riwayat Buchari).

Sebagai implikasi dari al-Qur'an surah al-Hasyr ayat 18 dan Al-Isra ayat 14 dan hadist tersebut di atas berarti konsep *selfe valuation* (evaluasi diri) telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni teori dasar evaluasi dalam pendidikan Islam, disadari atau pun tidak bahwa evaluasi sangat urgen dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam dunia pendidikan karena evaluasi ini berfungsi sebagai alat ukur maju dan mundurnya suatu sistem Pendidikan.

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris "*evaluation*" yang di serap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi" yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif.[6] Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English, evaluasi adalah *to find*

---

[6]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesiat* (Edisi ke empa; Jakarta: Pusat Bahasa, 2013), h. 384.

out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah.[7]

Terdapat dua pengertian dari evaluasi, yang pertama adalah evaluasi merupakan proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan untuk apa tujuan gelar yang telah atau sedang dicapai. Pengertian evaluasi yang kedua adalah evaluasi merupakan proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengambil keputusan.[8]

Evaluasi progam pendidikan Islam merupakan sebuah penilaian tentang rancangan atau kegiatan yang direncanakan dengan seksama untuk memberikan bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi insan yang dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan harus di evaluasi agar dapat di kaji apa kekurangannya, dan kekurangan tersebut akan dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan pendidikan pada waktu lain serta

---

[7]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidika*n (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h. 1.

[8]*John Boulmetis dan Phyllis Dutwin, The ABCs of Evaluation: Timeless Techniques for Program and Project Managers (San Fransisco: A Wiley imprint, 2005), h. 4.*

agar dijadikan rujukan supaya hasil KBM lebih optimal dan bertambah lebih baik.[9]

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengukur sejauh mana program pendidikan telah dicapai, selain itu juga program evaluasi dilakukan dengan maksud untuk perbaikan ke arah yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Ralph Tyler berpendapat bahwa evaluasi pendidikan adalah merupakan proses penentuan ke arah tujuan.[10] Evaluasi adalah proses dalam penyediaan informasi untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria tentang objek yang sedang di evaluasi. Lebih lanjut, Sutikno berpendapat bahwa tujuan dari kegiatan evaluasi adalah untuk pencerahan, pertanggungjawaban, perbaikan, klarifikasi, pengembangan dan alasan simbolis.[11]

Evaluasi adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut TR Marison ada tiga faktor yang penting dalam konsep evaluasi

---

[9]Siswanto dan Eli Susanti, *Evaluasi Program Pendidikan Islam* Jurnal Paramurobi, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 68.

[10]*Naftaly S. Glasman dan David Nero Glasman, Evaluation in Decision Making: The Case of School Administration (North America, 1998), h. 3.*

[11]*Muzayanah Sutikno, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: PPS UNJ, 2009), h.1.*

yaitu pertimbangan *(judgement)*, deskripsi objek penilaian dan kriteria yang bertanggung jawab *(defensible criteria)*. Aspek keputusan itu yang membedakan evaluasi sebagai suatu kegiatan dan konsep dari kegiatan dan konsep lainnya.[12] Sedangkan Davies dalam Dimyati, mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses sederhana memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, proses, objek, dan yang lainya.[13]

Ruhe dan Zumbo mengemukakan bahwa evaluasi adalah: *"a systematic investigation to determine the merit and worth of a set of activities. Evaluation is a process giving attestations on such matters as reliability, effectiveness, cost effectiveness, efficiency, safety, ease of use and probity"*.[14] Yang berarti evaluasi adalah pengamatan sistematis untuk menentukan manfaat dan nilai dari serangkaian kegiatan. Evaluasi adalah proses yang memberikan pengesahan mengenai hal-hal seperti keandalan, efektivitas, efisiensi biaya, efisiensi, keamanan, kemudahan penggunaan, dan kejujuran.

---

[12]Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 107.

[13]Dimyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), h. 191.

[14]*Ruhe dan Zumbo, Evaluasion Research Methodology (New Delhi: Sage Publication India, PVT.LTD, 2009), h. 1.*

Evaluasi sebagai suatu proses untuk memberikan informasi yang di desain untuk membantu pengambilan keputusan tentang objek yang di evaluasi. Lebih lanjut Cronbach mendefinisikan evaluasi merupakan "pengujian secara sistematis terhadap suatu objek sebagai akibat suatu program terkini yang diselenggarakan untuk membedakan fungsi dari beberapa program yang mempunyai tujuan umum yang sama".

Grounlund dalam Ruhe dan Zumbo mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan atau program telah tercapai. Oleh karena itu, evaluasi selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan, karena hasil evaluasi merupakan suatu landasan untuk menilai suatu program dan memutuskan apakah program tersebut dapat diteruskan atau masih perlu diperbaiki lagi.[15] Evaluasi dapat pula diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses

---

[15]Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2008), h.1.

[15]Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: Rosda, 2010), h. 5.

tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.[16]

Sedangkan program dapat didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam konsep ini, terdapat tiga pengertian penting yang perlu ditekankan dalam menentukan suatu program, yakni: 1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, 2) terjadi dalam waktu yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan 3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal, melainkan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Program merupakan sebuah sistem di mana sistem itu sendiri merupakan satu kesatuan dari beberapa bagian atau komponen program yang saling kait mengkait dan bekerja satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem. Dengan demikian, program terdiri dari

[16]Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: Rosda, 2010), h. 5.

komponen yang saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan.[17]

Program dapat pula didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas yang terorganisir yang di desain untuk mencapai tujuan tertentu seperti pada pernyataannya bahwa koleksi terorganisir dari kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Program merupakan satu kesatuan sumber daya dan aktivitas yang mengedepankan satu atau lebih tujuan bersama, umumnya dibawah arahan seorang manajer atau tim manajemen.

Dari beberapa penjelasan teori-teori di atas tentang evaluasi, maka berikut ini akan dijelaskan teori-teori dari beberapa ahli yang memberikan pengertian evaluasi program, sebagai berikut

Menurut Cronbach dan Stufflebeam, evaluasi program merupakan upaya menyediakan informasi untuk disampaikan pada pengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, Tyler mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan dapat terealisasikan.[18]

---

[17]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan Suharsimi, h. 3.*

[18]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, h. 4.*

Evaluasi program pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara cermat untuk mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Melalui metode tertentu secara cermat dan sistematis diperoleh data yang handal dan reliabel sehingga penentuan kebijakan selanjutnya akan tepat, dengan catatan data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tersebut adalah data yang tepat, baik dari segi isi, cakupan format maupun tepat dari segi waktu penyampaian. Untuk dapat menjadi evaluator program, seseorang harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan kemampuan praktik, cermat, objektif, sabar dan tekun, serta hati-hati dan bertanggung jawab.

Grounlund dalam Ruhe dan Zumbo berpendapat bahwa evaluasi program merupakan kegiatan evaluasi yang menafsirkan kegiatan pendidikan dalam memberikan pelayanan pada suatu dasar yang kontinu dan sering melibatkan tawaran-tawaran kurikuler.

Fitzpatrick berpendapat bahwa evaluasi program merupakan investigasi yang sistematis terhadap nilai kebermanfaatan suatu program pelayanan dibidang sosial atau bidang pendidikan. Sedangkan Rutman, berpendapat evaluasi program merupakan sebuah perilaku ilmiah, sehingga dalam melakukan sebuah evaluasi terhadap sesuatu program diperlukan metode-metode dan langkah-langkah ilmiah dari tahap perencanaan, proses, hingga pada tahap kesimpulan menekankan bahwa evaluasi program mengarahkan untuk menghasilkan informasi terpercaya pada pencapaian program untuk memandu pengambilan keputusan.[19]

Sudjana berpendapat, evaluasi program sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Sudjana menekankan bahwa data, fakta, keterangan atau informasi tersebut saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kegiatan yang sistematis mengandung arti bahwa kegiatan evaluasi program dilakukan melalui prosedur yang tertib berdasarkan kaidah ilmiah. Data yang dikumpulkan sebagai evaluasi program diperoleh melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis,

---

[19]*Ruhe dan Zumbo, Evaluasion Research Methodology, h. 1.*

dan penyajian dengan menggunakan model, metode dan teknik ilmiah.[20]

Pengambilan keputusan bermakna bahwa dengan data tersebut dapat bernilai menjadi suatu masukan terhadap keputusan dalam suatu program sehingga dengan evaluasi program kegiatan-kegiatan terjadi dengan teratur dan berkelanjutan dengan prosedur ilmiah untuk memperoleh data guna pengambilan keputusan. Alkin mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan proses yang berkaitan dengan penyiapan berbagai wilayah keputusan melalui pemilihan informasi yang tepat, pengumpulan dan analisis data, serta pelaporan yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan berbagai alternatif pilihan untuk menetapkan keputusan.[21]

Evaluasi program adalah pengumpulan informasi secara sistematis tentang aktivitas, karaktersitik, dan hasil dari suatu program untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk mengurangi ketidakmenentuan (*uncertainies*), meningkatkan efektivitas, dan membuat keputusan yang terkait

---

[20]*Nana Sudjada, Penilai Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 20.*

[21]*Nana Sudjada, Penilai Hasil Proses Belajar Mengajar, h. 32.*

dengan apa yang dilakukan dalam program dan apa dampak program.

Beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. Secara eksplisit, evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang di nilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan.

Pemikiran-pemikiran di atas memberikan gambaran bahwa evaluasi sebagai alat kontrol suatu program untuk mengukur bagaimana pencapaian tujuan program dan implikasinya. Hal yang umum terjadi pada evaluasi program adalah bagaimana untuk meningkatkan *(to improve)* suatu program dan bukan untuk membuktikan *(to prove)* suatu program. Alur pengkajian evaluasi program dapat saja menyerupai

sebuah penelitian *(research)* ilmiah yang banyak dilakukan oleh kalangan akademisi. Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut di atas, evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan lingkungan program dengan suatu *"judgement"* apakah program diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima atau ditolak.

Sebagai dasar dari evaluasi program pendidikan adalah bersumber dari Al-Qur'an. Secara implisit telah memberikan deskripsi tentang kedudukan yang sangat strategis karena hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai input untuk melakukan pembenahan, perbaikan, mempertahankan, meningkatkan kinerja, dan merealisasikan program pendidikan.

2. Tujuan Evaluasi Program Pendidikan Islam

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan. Demikian juga dengan evaluasi program pendidikan. Tujuan evaluasi program pendidikan adalah upaya untuk mengukur ketercapaian program, yaitu mengukur dan menilai sejauh mana sebuah kebijakan dapat terimplementasikan.

Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan

khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Agar dapat melakukan tugasnya, evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen programnya.[22]

Tujuan evaluasi program pendidikan adalah untuk memperoleh informasi akurat dan objektif tentang suatu program, serta mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah menganalisis sampai sejauh mana keterlaksanaan kegiatan program. Cronbach and Stufflebeam dalam Hamzah, bahwa proses evaluasi tidak sekedar sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria sebagai pembanding dari proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran.[23]

Edward Sallis memandang pentingnya evaluasi dalam implementasi sistem penjaminan mutu pada suatu organisasi. Hal tersebut bertujuan agar hasil akhir sebuah layanan bisa dianalisis menurut rencana. Sallis

---

[22]*Lihat Suharsimi dan Cepi Safrudin, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, h. 13.*

[23]Hamzah B. Uno, *Assessment Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 3.

mengemukakan, bahwa *quality systems always need a feedback loop. Mechanisms must be in place to ensure that outcomes can be analysed against the plan. Monitoring and evaluation are key elements in strategic planning*[24], yang berarti sistem mutu selalu membutuhkan umpan balik. Mekanisme harus ada untuk memastikan bahwa hasil dapat dianalisis terhadap rencana pemantauan dan evaluasi merupakan elemen kunci dalam perencanaan strategis.

Evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk

1. Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama;
2. Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut
   1) Kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa

[24]*Lihat. Edward Sallis, Total Quality Management in Education (London: Stylus Publishing Inc, 2002), h. 133.*

tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu;

2) Kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.[25]

Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

3. Fungsi Evaluasi Program

Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu mengukur kemajuan, penunjang penyusunan rencanan dan memperbaiki atau

---

[25]Lihat Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, *h. 7.*

melakukan penyempurnaan kembali.[26]

Evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, di antaranya

a. Mengukur kemajuan, dalam hal ini setidak-tidaknya ada dua macam kemungkinan hasil yang diperoleh yaitu menggembirakan dan yang tidak menggembirakan;
b. Menunjang penyusunan rencana, dengan adanya hasil yang diperoleh dapat menunjang para evaluator untuk melakukan perencanaan ulang (*replanning*) atau perencanan baru. Evaluasi secara berkesinambungan, akan membuka peluang bagi evaluator untuk membuat perkiraan (*estimation*);
c. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali, atas dasar hasil evaluasi yang diperoleh, evaluator perlu memperbaiki dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, perbaikan-perbaikan yang menyangkut organisasi, tata kerja, dan bahkan tujuan organisasi tersebut.[27]

---

[26]Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan (*Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2003) h. 8.

[27]Daryanto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 14-15

Fungsi evaluasi sebagai sebuah proses pendidikan, secara umum mempunyai empat macam fungsi pokok yaitu

a. Mengukur kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu;
b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Komponen-komponen tersebut di antaranya adalah tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber belajar dan prosedur serta alat evaluasi;
c. Untuk keperluan bimbingan dan konseling. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pelayanan bimbingan konseling oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing;
d. Untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali kurikulum sekolah.[28]

4. Manfaat Evaluasi Program

Dalam organisasi pendidikan, evaluasi program dapat disamaartikan dengan kegiatan supervisi. Secara

[28]Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 5.

singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula.

Jika supervisi di lembaga pendidikan dilakukan dengan objek buku-buku dan pekerjaan *clerical work* maka evaluasi program dilakukan dengan objek lembaga pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan supervisi yang berlangsung saat ini dapat dikatakan sama dengan evaluasi program, tetapi sasarannya ditekankan pada kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, supervisi sekolah yang diartikan sebagai evaluasi program, dapat disamaartikan dengan validasi lembaga dan akreditasi. Evaluasi program merupakan langkah awal dari proses akreditasi dan validasi lembaga. Evaluasi program pendidikan tidak lain adalah supervisi pendidikan dalam pengertian khusus, tertuju pada lembaga secara keseluruhan.

Evaluasi sangat dibutuhkan terutama dalam memaparkan secara sistematis dan detail, untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu program pendidikan itu telah berjalan. Berikut ada empat faktor

pendorong atau kecenderungan yang menyebabkan evaluasi dibutuhkan, sebagai berikut

a. Akuntabilitas, merujuk pada justifikasi untuk pencapaian hasil yang realistis suatu program;
b. Pelaporan perihal dana, jika suatu program akan dipertanggungjawabkan, tentu dibutuhkan rincian secara detail penggunaan dananya secara transparan;
c. Kegiatan untuk mengetahui sampai sejauh mana performa dan hasil kerja yang sedang atau telah dilakukan baik dalam tahap proses, hasil, dan dampak;
d. Pengambilan keputusan suatu program pendidikan. Untuk memutuskan apakah program dapat terus dilaksanakan, direvisi dan dikembangkan, atau dihentikan.[29]

Kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tidak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil

[29]Marni Serepinah, *Kebermaknaan Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta, 2017). h. 79

keputusan *(decision maker).* Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu

a. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan;
b. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit);
c. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat;
d. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lama.

B. Ruang Lingkup Evaluasi Program Pendidikan Islam

Pendidikan Islam dirancang dan dikembangkan sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem pendidikan Islam terdiri dari sejumlah komponen yang saling tergantung, terorganisasi dan bergerak bersama kearah tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut terdiri dari komponen masukan (input),

komponen proses (*through-put*), dan komponen keluaran (*output*).

Adapun ruang lingkup evaluasi program yang harus diperhatikan

1. Input Pendidikan

   Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam trasformasi. Dalam dunia sekolah maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon siswa yang baru akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki suatu tingkat sekolah (institusi), calon siswa itu di nilai dahulu kemampuannya. Dengan penilaian itu ingin diketahui apakah kelak akan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya.[30]

   Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah yang ada. Komponen dan sumber daya sekolah menurut Subagio Admodiwirio terdiri dari manusia (*man*), dana (*money*), sarana dan prasarana (*material*) serta peraturan (*policy*).[31]

---

[30]*Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 4.*

[31]Soebagio Atmodiwiro, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000), h. 22.

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Segala sesuatu yang dimaksud adalah berupa sumber daya, perangkat-perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai alat dan pemandu bagi berlangsungnya proses.[32] Sumber daya merupakan. Input penting yang diperlukan untuk berlangsung proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai, yang pada gilirannya mengakibatkan sasaran pendidikan tidak akan tercapai. Sumber daya dapat dibagi menjadi dua, sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan dan lain sebagainya) dengan penegasan bahwa sumber daya selebihnya tidak akan mempunyai arti apapun bagi perwujudan sasaran sekolah tanpa adanya campur tangan sumber daya manusia.[33]

a. Input sumber daya

1) Input sumber daya manusia, meliputi: pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan

---

[32]*Dikmenum, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (Jakarta: Depdikbud, 1999), h. 108*

[33]Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.18.

peserta didik;

2) Input sumber daya non manusia, meliputi: peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan lain-lain.

b. Input perangkat lunak yaitu yang meliputi: struktur organisasi lembaga, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana pendidikan, program pendidikan, dan lain-lain.

c. Input harapan-harapan yang berupa: visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut semakin tinggi tingkat kesiapan Input, maka semakin tinggi pula mutu Input tersebut.

Peningkatan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor Input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah yang ada. Komponen dan sumber daya lembaga pendidikan.[34]

---

[34]Subagio Admodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ardadizya Jaya, 2000), h. 22.

Pembahasan dan pengertian input pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala sesuatu berupa sumber daya manusia dan sumber daya non manusia sebagai penunjang keberlangsungan proses pendidikan.

2. Proses Pendidikan

Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Dalam pendidikan proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lain.[35]

Proses dikatakan memiliki mutu yang tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan lain-lain) dilakukan secara harmonis,

---

[35]*Lihat Dikmenum, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah, h. 203.*

sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan *(enjoyable learning),* mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mempunyai arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, namun pengetahuan yang mereka dapatkan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik yaitu mereka mampu menghayati, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terpenting peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus atau mampu mengembangkan dirinya.[36] Dalam proses pendidikan, mencakup hal-hal sebagai berikut

a. Keefektifan proses pembelajaran
   1) Internalisasi apa yang dipelajari;
   2) Mampu belajar cara belajar yang baik.
b. Kepemimpinan yang kuat
   1) Memiliki kelebihan dan wibawa (pengaruh);
   2) Mengkoordinasi, menggerakkan, menyerasikan sumber daya.
c. Manajemen yang efektif

   Analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan,

[36]*Dikmenum, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah, h. 213.*

evaluasi, kinerja, pengembangan, hubungan kerja, imbal jasa proporsional.

d. Memiliki budaya mutu
   1) Informasi kualitas untuk perbaikan, bukan untuk mengontrol;
   2) Kewenangan sebatas tanggung jawab;
   3) Hasil diikuti *rewards* atau *punishment*;
   4) Kolaborasi dan sinergi, bukan persaingan sebagai dasar kerja sama;
   5) Warga sekolah merasa aman dan nyaman bekerja;
   6) Suasana keadilan;
   7) Imbal jasa sepadan dengan nilai pekerjaan.

e. Memiliki *teamwork* kompak, cerdas, dinamis

   Output pendidikan hasil kolektif, bukan hasil individual.

f. Memiliki kemandirian
   1) Sekolah memiliki kewenangan melakukan yang terbaik bagi sekolahnya;
   2) Memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja tanpa bergantung atasan;
   3) Memiliki sumber daya yang cukup.

g. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat.

   Partisipasi rasa memiliki, rasa tanggung jawab, tingkat dedikas.

h. Memiliki keterbukaan manajemen

   Keterbukaan pembuatan keputusan, penggunaan uang, penyusunan program, pelaksanaan, dan evaluasi program.

i. Memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik)

   Perubahan adalah kenikmatan, kemapanan adalah musuh sekolah. Perubahan berkaitan dengan peningkatan lebih baik, terutama untuk anak.

j. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

   1) Evaluasi tidak hanya untuk mengetahui daya serap, tetapi bagaimana memperbaiki dan meningkatkan PBM di sekolah;
   2) Evaluasi program sekolah secara kontinu;
   3) Tiada hari tanpa perbaikan;
   4) Sistem mutu baku sebagai acuan perbaikan.

k. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan

   1) Tanggap terhadap aspirasi peningkatan mutu;
   2) Membaca lingkungan dan menanggapi cepat dan tepat.

l. Sekolah memiliki akuntabilitas

   Pertanggungjawaban sekolah terhadap: orang tua, masyarakat, siswa, dan pemerintah.

m. Peningkatan SDM, diversifikasi sumber dana, swadana, dukungan masyarakat yang tinggi.[37]

Pengertian mengenai proses dalam pendidikan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pendidikan adalah tindakan yang dilakukan atau prosedur yang dilaksanakan, misalnya, mengajar, menilai, sistem pengelolaan untuk menggunakan dan mengelola Input agar dapat menghasilkan *output* yang berkualitas.

3. *Output* Pendidikan

Output atau keluaran adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah siswa lulusan sekolah yang bersangkutan. Untuk dapat menentukan apakah seorang siswa berhak lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan penilaian, sebagai alat penyaring kualitas.[38]

Output pendidikan adalah kinerja sekolah. Sedangkan kinerja sekolah itu sendiri adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, Produktivitasnya, efisiensinya,

---

[37]*Lihat selengkapnya dalam http://www. kompasiana. com, Paradigma Input dan Output Pendidikan, diakses tangal 10 Juni 2016.*

[38]*Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), h. 5.*

inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya.[39]

Khusus yang berkaitan dengan mutu *output* sekolah, dapat dijelaskan bahwa *output* sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, UNAS, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi nonakademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ektsrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.[40]

Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memusatkan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai. Produktivitas adalah hasil perbandingan antara *output* dan input. Baik

---

[39]*Dikmenum, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah, h. 213.*

[40]*Lihat selengkapnya dalam* http://www. *kompasiana.com, Paradigma Input dan Output Pendidikan, diakses tangal 5 Juni 2016.*

output dan input adalah dalam bentuk kuantitas. Kuantitas input berupa tenaga kerja, modal, bahan, dan energi. Sedangkan kuantitas *output* berupa jumlah barang atau jasa yang tergantung pada jenis pekerjaannya. *Output* pendidikan dapat dikatakan berkualitas dan bermutu tinggi apabila prestasi pencapaian siswa menunjukan pencapaian yang tinggi dalam bidang

a. Prestasi akademik, berupa nilai ujian semester, ujian nasional, karya ilmiah, dan lomba akademik;
b. Prestasi non akademik, berupa kualitas iman dan takwa, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler lainnya.

Berkenaan dengan *output* dalam pendidikan dapat disimpulkan bahwa *output* pendidikan adalah hasil atau tolak ukur dari sebuah proses pendidikan yang menentukan baik, buruk atau berhasil atau tidak berhasil dari pelaksanaan program pendidikan itu sendiri.

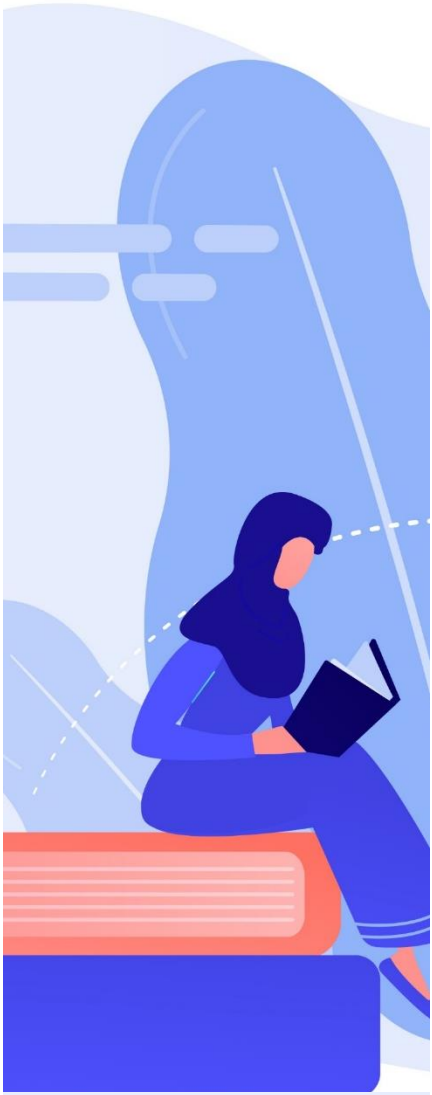

02

Model Evaluasi Program

Model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program pendidikan. Philips dalam bukunya yang berjudul *Training Evaluation and Measurement Methods*

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program pendidikan. Philips dalam bukunya yang berjudul *Training Evaluation and Measurement Methods* memberi ilustrasi penerapan tujuh macam model evaluasi program yaitu

1. Kirkpatrick approach, model ini banyak diterapkan untuk mengevaluasi program pelatihan. Dalam model ini dikembangkan kerangka kerja pengumpulan data penelitian yang secara konseptual mengacu pada tahap-tahap belajar. Konsep tersebut selanjutnya dinamakan empat level evaluasi yang terdiri dari: *reactic, learning, behavior, and result*. Evaluator behavior kemudian direvisi menjadi transfer;
2. CIPP (Context, Input, Process, and Product), model ini dikembangkan oleh National Study Cormrnittee on Evaluation of Phi Delta Kappa. Penggagas model ini adalah Stuflebeam. Menurut klasifikasi model berdasarkan tujuan, model ini termasuk model *management* analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi keputusan/kebijakan seorang manajer. Dalam perkembangan lebih lanjut, model ini banyak digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan. Komponen evaluasi produk pada program jangka panjang diperluas lagi menjadi evaluasi *impact, effectiveness, sustainability*, dan *transportability*;

3. The Bell System approach, model ini mirip dengan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick tetapi evaluasi lebih banyak dilakukan pada dampaknya saja. Data evaluasi diklasifikasikan menjadi empat yaitu: *reaction outcomes, capability outcomes, application outcomes*, dan *worth outcomes*;
4. Thee CIRO Approach. Model ini mirip dengan CIPP namun evaluasi proses diganti dengan reaksi. CIRO merupakan singkatan dari *context evaluation*, input evaluation, *Reaction evaluation* dan *Outcome evaluation*;
5. Saratoga Institute approach, model evaluasi ini hampir sama dengan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick yang digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan. Pengumpulan data evaluasi program diklasifikasikan menjadi 4 macam juga yaitu: *training satisfaction, learning change, behavior change*, dan *organizational change*.
6. The IBM approach, model evaluasi ini hampir sama dengan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick. Data yang dikumpulkan terdiri dari: re*action, testing, application, business results*.
7. Xerox approach , model ini agak berbeda dengan model yang lain. Kesamaan terletak pada jumlah klasifikasi data yang digunakan. Xerox approach mengklasifikasikan data evaluasi menjadi 4 macam, yaitu: *entry capability, end of*

course performance, mastery job performance, dan *organizational performance*.[41]

Model-model evaluasi tersebut di atas menunjukkan satu dengan yang lainnya tampak bervariasi, tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang di evaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah di evaluasi. Menurut Kaufman dan Thomas, membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu

1. *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler;
2. *Goal Free Evaluation Model,* dikembangkan oleh Scriven;
3. *Formatif Summatif Evaluation Model,* dikembangkan oleh Michael Scriven;
4. *Countenance Evaluation Model,* dikembangkan oleh Stake;
5. *Responsive Evaluation Model,* dikembangkan oleh Stake;
6. *CSE-UCLA Evaluation Model,* menekankan pada "kapan" evaluasi dilakukan;
7. *CIPP Evaluation Model,* dikembangkan oleh Stufflebeam;
8. *Discrepancy Model,* dikembangkan oleh Provus.[42]

---

[41]Misykat Malik Ibrahim, *Evaluasi Program Bidang Pendidikan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 27-29.

[42]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi*

Berikut diuraikan beberapa model evaluasi program yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program yaitu

A. Goal Oriented Evaluation Model (Model Evaluasi Berorientasi pada Tujuan)

Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, mencek sejauh mana tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program.[43] Model ini dikembangkan oleh Tyler.

Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, dalam rangka mengevaluasi sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan sudah tercapai atau terlaksana dalam proses pelaksanaan program. Dalam pembelajaran sejarah sebagai suatu program, maka model Tyler ini menilai

---

Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, h. 40.

[43]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 41.

apakah materi pelajaran yang dikembangkan guru terarah pada pencapaian tujuan pembelajaran sejarah. Selanjutnya pengembangan materi pelajaran tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan pembelajaran melalui langkah-langkah yang berkesinambungan.

B. Goal Free Evaluation Model (Model Evaluasi Terus-menerus)

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan Tyler, evaluator terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah tercapai, dalam model goal free evaluation (evaluasi lepas dari tujuan) justru menoleh dari tujuan. Menurut Mechael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi baik hal positif (hal yang diharapkan) maupun hal negatif (memang tidak diharapkan).

Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam

penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan terakhir yang diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak bermanfaat.[44]

Model GFE maksudnya adalah para evaluator atau penilai mengambil dari berbagai laporan atau catatan pengaruh-pengaruh nyata atau kongkrit dan pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dalam program pendidikan dan pelatihan. Perhatian khusus diberikan secara tepat terhadap usulan-usulan tujuan dalam evaluasi, tetapi tidak dalam proses atau produk. Keuntungan dari GFE adalah dengan GFE para penilai mengetahui antisipasi pengaruh-pengaruh penting terhadap tujuan dasar dari penilai yang menyimpang.[45]

Ciri- ciri evaluasi bebas tujuan yaitu

1. Evaluator sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan program;
2. Tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan menyempitkan fokus evaluasi;

---

[44]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 41.

[45]Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian* (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), h. 57

3. Evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan;
4. Hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan proyek dibuat seminimal mungkin;
5. Evaluasi menambah kemungkinan ditemukannya dampak yang tidak diramalkan.

Fungsi Goal Free Evaluation adalah apa yang diungkapkan Scriven menunjukkan bahwa fokus pada program atau tujuan kegiatan ini dapat menjadi tempat awal yang penting untuk teknologi bekerja dalam domain evaluasi. Model Goal Free berfokus pada hasil yang sebenarnya dari suatu program atau kegiatan, bukan hanya tujuan-tujuan yang teridentifikasi. Jenis model memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mencatat hasil yang tidak mungkin telah diidentifikasi oleh perancang program. Melalui proses teknik baik terang-terangan dan terselubung, metode ini berusaha untuk mengumpulkan data dalam rangka untuk membentuk deskripsi program, mengidentifikasi proses akurat, dan menentukan pentingnya mereka ke program (Boulmetis & Dutwin, 2005). Sementara model ini berfokus pada hasil tanpa *goal*, model lain berfokus pada proses pengambilan keputusan dan menyediakan administrator kunci dengan analisis mendalam untuk membuat keputusan yang adil dan tidak biasa.

Fungsi evaluasi bebas tujuan adalah untuk mengurangi bias dan menambah objektivitas. Dalam evaluasi yang berorientasi pada tujuan, seorang evaluator secara subjektif persepsinya membatasi sesuai dengan tujuan. Padahal tujuan pada umumnya hanya formalitas dan jarang menunjukkan tujuan yang sebenarnya dari suatu proyek. Lagi pula, banyak hasil program penting yang tidak sesuai dengan tujuan program. Evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya bukan pada hasil yang direncanakan. Dalam evaluasi bebas tujuan ini, memungkinkan evaluator untuk menambah temuan hasil atau dampak yang tidak direncanakan.

Kekurangan dan kelebihan Goal Free Evaluation dapat diungkap sebagai berikut, kelebihan dari model bebas tujuan di antaranya adalah

1. Evaluator tidak perlu memperhatikan secara rinci setiap komponen, tetapi hanya menekankan pada bagaimana mengurangi prasangka (bias);
2. Model ini menganggap pengguna sebagai audiens utama. Melalui model ini, Scriven ingin evaluator mengukur kesan yang didapat dari sesuatu program dibandingkan dengan kebutuhan pengguna dan tidak membandingkannya dengan pihak penganjur;

3. Pengaruh konsep pada masyarakat, bahwa tanpa mengetahui tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan, seorang penilai bisa melakukan evaluasi;
4. Kelebihan lain, dengan munculnya model bebas tujuan yang diajukan oleh scrieven, adalah mendorong pertimbangan setiap kemungkinan pengaruh tidak saja yang direncanakan, tetapi juga dapat diperhatikan sampingan lain yang muncul dari produk.

Walaupun demikian, yang diajukan Scrieven ternyata juga memiliki kelemahan, sebagai berikut

1. Model bebas tujuan ini pada umumnya bebas menjawab pertanyaan penting, seperti apa pengaruh yang telah diperhitungkan dalam suatu peristiwa dan bagimana mengidentifikasi pengaruh tersebut;
2. Walaupun ide Scrieven bebas tujuan bagus untuk membantu kegiatan yang paralel dengan evaluasi atas dasar kejujuran, pada tingkatan praktis Scrieven tidak terlalu berhasil dalam menggambarkan bagaimana evaluasi sebaiknya benar-benar dilaksanakan;
3. Tidak merekomendasikan bagaimana menghasilkan penilaian kebutuhan walau pada akhirnya mengarah pada penilaian kebutuhan;
4. Diperlukan evaluator yang benar-benar kompeten untuk dapat melaksanakan evaluasi model ini;

5. Langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi hanya menekankan pada objek sasaran saja;
6. Model bebas tujuan merupakan titik evaluasi program, di mana objek yang di evaluasi tidak perlu terkait dengan tujuan dari objek atau subjek tersebut, tetapi langsung kepada implikasi keberadaan program apakah bermanfaat atau tidak objek tersebut atas dasar penilaian kebutuhan yang ada.

Dari uraian ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “evaluasi lepas dari tujuan” dalam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci perkomponen.

C. Formatif Sumatif Evaluation Model

Selain model "evaluasi lepas dari tujuan", Michael Scriven juga mengembangkan model lain, yaitu model formatif sumatif. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang di evaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif).

Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan demikian, model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang "apa, kapan, dan tujuan" evaluasi tersebut dilaksanakan.

Para evaluator pendidikan, termasuk guru-guru yang mempunyai tugas evaluasi, tentu sudah mengenal dengan baik apa yang dimaksud dengan evaluasi formatif dan sumatif. Hampir setiap bulan guru-guru melaksanakan evaluasi formatif dalam bentuk ulangan harian. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui sampai seberapa tinggi tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan untuk masing-masing pokok bahasan. Dikarenakan luas atau sempitnya materi yang tercakup di dalam pokok bahasan setiap mata pelajaran tidak sama, maka tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan evaluasi formatif dilaksanakan dan berapa kali untuk masing-masing mata pelajaran.

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang

dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program.

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif maka lingkup sasaran yang di evaluasi juga berbeda.[46]

D. Countenance Evaluation Model

Model evaluasi ini menekankan pada aspek operasi deskripsi (*description*) dan penilaian (*Judgement*), yang dibedakan dalam 3 (tiga) fase evaluasi yaitu: persiapan *Antecedents*, Proses/*Transaksi Process/Transaction* dan Keluaran/ Hasil *Ouput/Outcomes*. Model evaluasi Stake ini, tidak hanya membandingkan untuk menentukan kesenjangan, namun juga membandingkannya dengan

---

[46]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 42-43.

standar yang ditetapkan agar dapat diketahui sejauh mana hasil dan manfaat dari suatu program tersebut.

Menurut ulasan tambahan yang diberikan Fernandes (1984), model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) deskripsi (*description*) dan (2) pertimbangan (*judgments*); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (a) anteseden (*antecedents/context*), (b) transaksi (*transaction/process*), dan (c) keluaran (*output outcomes*).

Oleh Stake, model evaluasi yang diajukan untuk diagram, menggambarkan deskripsi dan tahapan seperti berikut

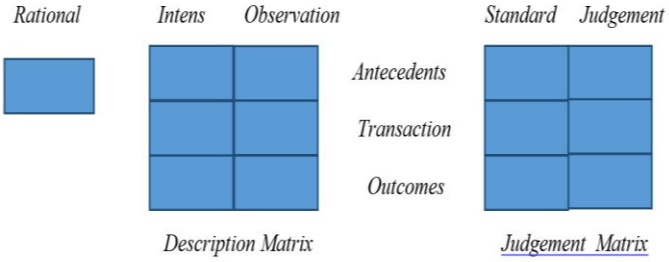

Gambar. 2.1 Evaluasi model Stake[47]

Tiga hal yang dituliskan di antara dua diagram, menunjukkan objek atau sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang di evaluasi, evaluator harus mampu

[47]Lihat. Robert E. Stake, *The Countenance of Education Evaluation*, paper, *Center for Intructional Research and Curriculum Evaluatio, University of Illinois*, 2006, h. 6.

mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) anteseden yang diartikan sebagai konteks, (2) *transaction* yang diartikan sebagai proses, dan (3) *outcomes* yang diartikan sebagai hasil. Selanjutnya, kedua matriks yang digambarkan sebagai *deskripsi dan pertimbangan,* menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka Stake mengidentifikasi 3 (tiga) tahap dari evaluasi program pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya yaitu

1. *Antecedents phase*, sebelum program diimplementasikan yaitu kondisi/kejadian apa yang ada sebelum implementasi program? Apakah kondisi/kejadian ini akan mempengaruhi program?
2. *Transactions phase*, pelaksanaan programnya yaitu apakah yang sebenarnya terjadi selama program dilaksanakan? Apakah program yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program?
3. *Outcemes phase,* mengetahui akibat emplementasi pada akhir program. Apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan? apakah klien menunjukkan perilaku pada level yang tinggi dibanding dengan pada saat mereka berada sebelum program dilaksanakan?[48]

---

[48]Lihat. Roger Kaufman dan Susan Thomas, *Evaluasi without Fera*, (London: New Viewpoints, 1980), h. 4.

Setiap tahapan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu *description* (deskripsi) dan *judgment* (keputusan/penilaian) yaitu

1. *Antecedents phase* (masa ketika sebelum program diimplementasikan)

   Description, meliputi: (1) intents (tujuan-tujuan apa yang telah ditetapkan? apa efek yang diinginkan?); dan (2) *observation* (data yang berhubungan dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi pada phase ini deskripsi/gambaran kondisi yang ada/nyata. *Jugments*, terdiri dari; (1) *standard* (kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan) dan (2) *judgment* (proses perbandingan intens, observasi dengan standar).

2. *Trancactionals phase* (masa ketika program di implementasikan)

   Description, meliputi: intens (tindakan apa yang akan dilakukan), dan observasion (perilaku klien dan dosen, yang dilakukan dosen sehari-hari). *Judgments* terdiri dari (1) standar (kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan) dan (2) *judgment* (proses perbandingan intens, observasi dengan standar).

3. *Outcomes phase* (periode atau masa setelah program dilaksanakan di mana data-data dikumpulkan)

   Description, meliputi: (1) intens (seperti apa hasil yang diinginkan atau diprediksi), dan (2) observation (data

yang dikumpulkan diakhir program biasa berupa skor tes dan nilai).

Ketiga fase atau tahapan tersebut saling berhubungan dengan description dengan judgment. Menurut Stake, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu

1. Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama;
2. Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

Bertitik tolak dari penjelasan Fernandes terhadap objek dan cara kerja model tersebut, memberikan nama pada model yang dikemukakan oleh Stake ini dengan nama bahasa Indonesia, yaitu model deskripsi pertimbangan. Analisis proses evaluasi yang dikemukakan Stake membawa dampak yang cukup besar dalam pendidikan dan meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk pengembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi ialah *descriptions* dan

judgemalt dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu: *antecedents (context) transaction (process), dan outcomes (output).* Stake mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu program pendidikan kita, melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lain, atau perbandingan yang absolut (satu program dengan standar).

Stake menyatakan bahwa apabila menilai suatu program pendidikan, maka harus melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lainnya. Dalam model ini *antecedent* (masukan), *transaction* (proses) dan *outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program.

Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang di evaluasi. Stake mengatakan bahwa *description* di satu pihak berbeda dengan *judgement* atau menilai. Dalam model ini, *antecedents* (masukan), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut,

untuk menilai manfaat program. Stake mengatakan bahwa tak ada penelitian dapat diandalkan apabila tidak di nilai.[49]

Stake mengidentifikasi 3 (tiga) tahap dari evaluasi pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya itu

1. Masukan (*antecedents phase*), sebelum program diimplementasikan yaitu kondisi/kejadian apa yang ada sebelum implementasi program? Apakah kondisi/ kejadian ini akan mempengaruhi program?
2. Proses (*transactions phase*), pelaksanaan program yaitu apakah yang sebenarnya terjadi selama program dilaksanakan? Apakah program yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program?
3. Hasil (*outcomes phase*), mengetahui akibat implementasi pada akhir program. Apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan? Apakah klien menunjukkan perilaku pada level yang tinggi dibanding dengan pada saat mereka berada sebelum program dilaksanakan?

Setiap tahapan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu *description* (deskripsi) dan *judgment* (penilaian). Model Stake dapat memberikan gambaran pelaksanaan program secara mendalam dan mendetail. Oleh karena itu,

---

[49]Misykat Malik Ibrahim, *Evaluasi Program Bidang Pendidikan*, h. 21-22.

persepsi orang-orang yang terlibat dalam sistem pendidikan seperti perilaku guru, peran kepala sekolah, perilaku siswa dan situasi proses belajar mengajar di sekolah adalah kenyataan yang harus diperhatikan.[50]

Suatu keistimewaan khusus dari model Stake adalah spesifikasi dari standar yang digunakan dalam membuat keputusan atau penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model Stake memberikan: (1) informasi deskripsi yang lebih banyak dari seluruh fase evaluasi; dan (2) eksplikasi (pemaparan) dari standar-standar yang akan digunakan. Untuk spesifikasi standar-standar yang akan digunakan dalam penilaian, penggunaan independen dimungkinkan, dalam hal ini adalah sejumlah data yang sudah ada, standar-standar yang telah di susun, dan orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan program selayaknya dapat mendeterminasi kegunaan/manfaat dari program. Model Evaluasi Stake ini yang dipilih dan digunakan dalam penelitian evaluasi program pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar.

---

[50]Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian* (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), h. 57-58.

E. CSE-UCLA Evaluation Model

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. Yang pertama, yaitu CSE merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of Clifornia in Los Angeles.

Ciri-ciri model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, inplementasi, hasil, dan dampak. Fernandes (1984) memberikan penjelasan tentang model tersebut menjadi empat tahap yaitu

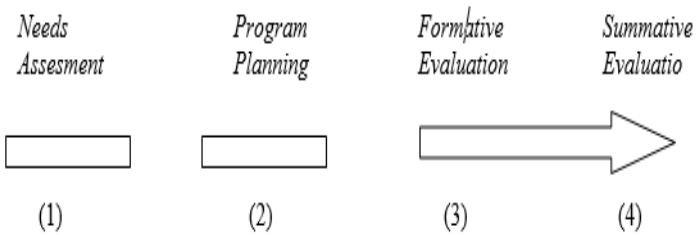

Gambar 2.2 Model Evaluasi CSE-UCLA

1. CSE Model: *Need Assessment*

   Evaluator memusatkan perhatian pada penentuan pertanyaan yang diajukan

   a. Hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program?
   b. Kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan pelaksana program ini?
   c. Tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai melalui program ini?

2. CSE Model: Program *Planning*

   Tahap kedua dari CSE model ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap kesatu. Dalam tahap perencanaan ini program PMB di evaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah di susun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan.

3. CSE Model: Formatif *Evaluation*

   Tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program, karna harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembang program.

4. CSE Model: *Summative Evaluation*

   Tahap keempat, yaitu evaluasi sumatif, para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum, dicari bagian mana yang belum dan penyebabnya.[51]

---

[51]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi*

F. CIPP Evaluation Model

Stufflebeam (1969) & Shinkfield (1985) adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured)* untuk menolong administrator membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai "Suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan" (Stufflebeam, 1973). Dia membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu

1. *Contect evaluation to serve planning decision*. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.
2. Input *evaluation, structuring decision.* Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, h. 44-45.

3. *Process evaluation, to serve implementing decision.* Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki.
4. *Product evaluation, to serve recycling decision.* Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? Huruf pertama dari konteks evaluasi dijadikan ringkasan CIPP, model ini terkenal dengan nama model CIPP oleh Stufflebeam.[52]

Model evaluasi di atas merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh evaluator, oleh karena itu, uraian yang diberikan panjang dibanding dengan model-model lainnya. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan (1967) di Ohio University. CIPP yang merupakan singkatan dari huruf awal dari empat kata, yaitu

1. Context evaluation: evaluasi terhadap konteks
2. Input evaluation: evaluasi terhadap masukan
3. Procces evaluation: evaluasi terhadap proses

---

[52]Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, h.14.

4. Product evaluation: evaluasi terhadap hasil

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang di evaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

Seorang ahli evaluasi dari University of Washington bernama Gilbert Sax (1980) memberikan arahan kepada evaluator tentang bagaimana mempelajari tiap-tiap komponen yang ada dalam setiap program yang di evaluasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Model ini sekarang disempurnakan dengan satu komponen O, singkatan dari *outcome* (s), sehingga menjadi model CIPPO.[53]

Model CIPP hanya berhenti pada mengukur *output* (produk), kalau CIPPO sampai ke implementasi dari produk. Sebagai contoh, kalau produk berhenti pada lulusan, tetapi *outcome* (s) pada bagaimana kiprah lulusan

[53]Suharsimi Arikunto.*Evaluasi Program Pendidikan*, h. 29.

tersebut di masyarakat atau di pendidikan lanjutannya, atau untuk produk pabrik, bukan hanya mengandalkan kualitas barang, tetapi kepada kepuasan pemakai atau konsumen.

1. Evaluasi Konteks

   Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Contoh pengajuan pertanyaan, untuk evaluasi yang diarahkan pada program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS). Ada empat pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dangan evaluasi konteks yaitu

   a. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program, misalnya jenis makanan dan siswa yang belum menerima?
   b. Tujuan pengembangan apakah yang belum dapat tercapai oleh program, misalnya peningkatan kesehatan dan prestasi siswa karena adanya makanan tambahan?
   c. Tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat, misalnya kesadaran orang tua untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya?

d. Tujuan-tujuan mana sajakah yang paling mudah tercapai, misalnya pemerataan makanan, ketepatan penyediaan makanan.

2. Evaluasi Masukan

Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi masukan. Maksudnya dari evaluasi masukan adalah kemampuan awal siswa dan sekolah dalam menunjang PMTAS, antara lain kemampuan sekolah dalam menyediakan petugas yang tepat, mengatur menu yang andal, ahli kesehatan yang berkualitas, dan sebagainya. Pertanyaan yang diajukan untuk program pedidikan yang berkenaan dengan masukan yaitu

a. Apakah makanan yang diberikan siswa berdampak jelas pada perkembangan siswa?
b. Berapa orang siswa yang menerima dengan senang hati atas makanan tambahan itu?
c. Bagaimana reaksi siswa terhadap pelajaran setelah menerima makanan tambahan?
d. Seberapa tinggi kenaikan nilai siswa setelah menerima makanan tambahan?

Menurut stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada "pemecahan masalah" yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan.

3. Evaluasi Proses

   Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada "apa" kegiatan yang dilakukan dalam program, "siapa" siapa orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program yang sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Oleh stuffbeam diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses yaitu

   a. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
   b. Apakah staf yang terlibat dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
   c. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
   d. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan selama palaksanaan program dan kemungkinan program jika dilanjutkan?

4. Evaluasi Produk atau Hasil

   Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah, dalam contoh PMTAS adalah siswa yang menerima makanan tambahan. Evaluasi produk

merupakan tahap akhir dari rangkaian evaluasi program. Dalam program PMTAS, pertanyaan yang dapat diajukan yaitu

a. Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai?
b. Pernyataan-pernyatan apa saja berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan?
c. Dalam hal-hal apa berbagai kebutuhan sudah dapat terpenuhi selama proses pemberian makanan tambahan (misalnya variasi makanan, banyaknya ukuran makanan, dan ketepatan waktu pemberian)?
d. Apa dampak yang diperoleh siswa dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya program makanan tambahan ini?[54]

Model evaluasi CIPP ini dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian sebuah kebijakan yang sedang berjalan dan pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan Efektivitas implentasi suatu program.

G. Discrepancy Model

Kata *Discrepancy* adalah istilah bahasa Inggris, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi

[54]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 45-48.

"kesenjangan". Model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada disetiap komponen.[55]

Dari model yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa model yang menunjuk pada langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi, sebagian penekanan atau objek sasaran, dan ada yang sekaligus menunjukkan sasaran dan langkah atau pentahapan. Khusus untuk model yang dikembangkan oleh *Malcolm Provus*, menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai.

H. Evaluasi Model Kirkpatrick

Kirkpatrick salah seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Kirkpatrick *Four Levels Evaluation Model*. Evaluasi terhadap efektivitas program

---

[55]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 48.

pelatihan (*training*) menurut Kirkpatrick (1998) dalam Eko Putro Widoko (2010) mencakup empat level evaluasi, yaitu: level 1 *reaction*, level 2 *learning*, level 3 *behavior*, dan level 4 *result.*[56]

Model evaluasi ini menekankan pada efektivitas suatu program yang mencakup 4 (empat) tingkat evaluasi yaitu; Level *Reaction*, Level *Training*, Level *Behaviour* dan Level *Result*.

Evaluasi pada level reaksi (*reaction evaluation*) adalah untuk mengetahui bagaimana respons atau reaksi para peserta terhadap aktivitas diklat/program tersebut seperti tingkat kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Apabila respons atau reaksinya adalah memuaskan, maka mereka akan termotivasi terhadap aktivitas diklat/program tersebut atau sebaliknya. Evaluasi level *training* (*training evaluation*).

Pada level evaluasi perilaku (*behavior evaluation*) ini, yang terpenting adalah mengukur bagaimana perubahan perilaku itu bermanfaat dan dapat diimplementasikan di tempat kerja sehari-hari. Evaluasi Hasil (*result evaluation*) merupakan evaluasi dari seluruh proses yang akan terlihat pada dampak, apakah terjadi

---

[56]Misykat Malik Ibrahim, *Evaluasi Program Bidang Pendidikan*, h. 59

peningkatan dampak atau tidak dari seluruh kegiatan program tersebut.

1. Evaluasi Reaksi (*Reaction Evaluation*)

   Mengevaluasi terhadap reaksi peserta *training* berarti mengukur kepuasan peserta. Program *training* dianggap efektif apabila proses *training* dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta *training*, sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Dengan kata lain peserta *training* akan termotivasi apabila proses *training* berjalan secara memuaskan bagi peserta yang pada akhirnya akan memunculkan reaksi dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya apabila peserta tidak merasa puas terhadap proses *training* yang diikutinya mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti *training*.

   Partner (2009) mengemukakan "*the interest, attention and motivation of the participants are critical to the success of any training program, people learn better when they react positively to the learning environment*". Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses kegiatan *training* tidak terlepas dari minat, perhatian, dan motivasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya kegiatan pembelajaran. Orang akan belajar lebih baik manakala mereka memberi reaksi positif terhadap lingkungan belajar.

Kepuasan peserta dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu materi yang diberikan, fasilitas yang tersedia, strategi penyampaian materi yang digunakan oleh instruktur, media pembelajaran yang tersedia, waktu pelaksanaan pembelajaran, hingga gedung tempat pembelajaran dilaksanakan. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan *reaction sheet* dalam bentuk angket sehingga lebih mudah dan lebih efektif.

2. Evaluasi Belajar (*Learning Evaluating*)

   Ada tiga hal yang dapat diajarkan dalam program *training*, yaitu pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Peserta *training* dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan maupun peningkatan keterampilan. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas program *training* maka ketiga aspek tersebut perlu untuk diukur. Tanpa adanya perubahan sikap, peningkatan pengetahuan atau keterampilan pada peserta *training* maka program dapat dikatakan gagal.

   Penilaian *learning evaluating* ini ada yang menyebut dengan penilaian hasil (*output*) belajar. Mengukur hasil belajar lebih sulit dan memakan waktu dibandingkan dengan mengukur reaksi. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan *reaction sheet* dalam bentuk angket sehingga lebih mudah dan lebih efektif.

Menurut Kirkpatrick untuk menilai hasil belajar dapat dilakukan dengan kelompok pembanding. Kelompok yang ikut pelatihan dan kelompok yang tidak ikut pelatihan diperbandingkan perkembangannya dalam periode waktu tertentu. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan hasil *pretest* dengan *posttest*, tes tertulis maupun tes kinerja (*performance test*).

3. Evaluasi Perilaku (*Behavior Evaluation*)

   Evaluasi pada level ke 3 (evaluasi tingkah laku) ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap pada level ke 2. Penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan sehingga lebih bersifat internal, sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku peserta setelah selesai mengikuti pembelajaran, sehingga penilaian tingkah laku ini lebih bersifat eksternal. Karena yang di nilai adalah perubahan perilaku setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan kembali ke lingkungan mereka maka evaluasi level 3 ini dapat disebut sebagai evaluasi terhadap *outcomes* dari kegiatan pelatihan.

   Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan membandingkan perilaku kelompok kontrol dengan perilaku peserta *training*, atau dengan membandingkan perilaku sebelum dan sesudah mengikuti *training*

maupun dengan mengadakan survei atau interview dengan pelatih, atasan maupun bawahan peserta *training* setelah mereka kembali ketempat kerja.

4. Evaluasi Hasil (*Result Evaluation*)

   Evaluasi hasil dalam level ke 4 ini difokuskan pada hasil akhir (*final result*) yang terjadi karena siswa telah mengikuti suatu program pembelajaran. Termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program pembelajaran di antaranya adalah peningkatan hasil belajar, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan (*skills*).

   Beberapa program mempunyai tujuan meningkatkan moral kerja maupun membangun *teamwork* (kerja sama tim) yang lebih baik. Dengan kata lain adalah evaluasi terhadap *impact program* (pengaruh program). Tidak semua pengaruh dari sebuah program dapat diukur dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, evaluasi level 4 ini lebih sulit dibandingkan dengan evaluasi pada level-level sebelumnya. Evaluasi hasil akhir ini dapat dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok peserta pembelajaran, mengukur kemampuan siswa sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran apakah ada peningkatan atau tidak.

Dibandingkan dengan model evaluasi yang lain, model ini memiliki beberapa kelebihan yaitu: 1) lebih komprehensif, karena mencakup *had skill* dan *soft skill*, 2) objek evaluasi tidak hanya hasil belajar semata tapi juga mencakup proses, *output* dan *outcomes,* dan 3) mudah untuk diterapkan. Selain kelebihan tersebut model ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 1) kurang memperhatikan input, 2) untuk mengukur *impact* sulit dilakukan karena selain sulit tolak ukurnya juga sudah di luar jangkauan guru maupun sekolah.

Tabel. 2.1 Contoh Matriks Data pada Model Evaluasi 4 Level[57]

Level	Kisi-kisi Evaluasi
Reaksi	Substansi yang diukur 1. Materi pelatihan, relevan dengan kebutuhan; 2. Kompetensi instruktur/fasilitator pelatihan; 3. Fasilitas menunjang kelancaran pelatihan; 4. Pembagian waktu pelatihan proporsional; 5. Penggunaan waktu efisien dan efektif; 6. Saran untuk memperbaiki program Cara pengukuran

[57]Misykat Malik Ibrahim, *Evaluasi Program Bidang Pendidikan*, h.67-69.

Level	Kisi-kisi Evaluasi
	Menggunakan kuesioner yang dibagikan setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
Learning	Substansi yang diukur 1. Kompetensi peserta (pengetahuan, sikap dan keterampilan) sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan; 2. Partisipasi (kehadiran dan keaktifan) peserta selama pelaksanaan pelatihan; 3. Pengukuran dapat dilakukan melalui pretest dan posttest atau membandingkan hasil pretest dan posttest tersebut dengan kelompok kontrol yang tidak mendapat program pelatihan; 4. Pengukuran dilakukan dengan tes tertulis dan tes unjuk kerja (praktik). Selama tes unjuk kerja diamati sikap dan keterampilan; 5. Materi pengukuran sesuai dengan tujuan pelatihan atau kompetensi yang dilatihkan.
Behavior	Substansi yang diukur 1. Perubahan kepribadian yang dilatihkan misalnya kedisiplinan, sikap kerja, motivasi, pengendalian emosi; 2. Kompetensi sosial yang dilatihkan seperti kemampuan kerja sama dalam tim;

Level	Kisi-kisi Evaluasi
	3. Komunikasi interpersonal yang dilatihkan seperti sopan santun dalam berbicara dan bergaul dengan teman, atasan, atau bawahan. Persyaratan kondisi 1. Perubahan perilaku setelah peserta kembali ke pekerjaannya dapat terjadi apabila peserta mendapat kesempatan untuk menerapkannya; 2. Perubahan perilaku dapat terjadi apabila peserta merencanakan untuk menggunakan perilaku yang baru dengan senang hati. Cara pengukuran 1. Memberi jeda waktu dan kesempatan agar terjadi perubahan pada peserta; 2. Mengevaluasi perilaku sebelum dan sesudah pelatihan; 3. Melakukan survei atau wawancaia kepada alumni program pelatihan, supervisor, dan teman sejawat untuk menilai perubahan perilaku alumni program pelatihan setelah mereka kembali ke lingkungan kerja masing-masing.

Level	Kisi-kisi Evaluasi
Result	Substansi yang diukur 1. Peningkatan keuntungan, kuantitas dan kualitas kerja yang merupakan dampak program pelatihan; 2. Penurunan biaya produksi, penurunan kecelakaan kerja, dan penurunan kegagalan produk; 3. Dampak non finansial seperti peingkatan kemampuan memimpin, peningkatan motivasi kerja, manajemen waktu, pemberdayaan sumber-sumber, efektivitas keputusan, dan peningkatan moral. Dampak non finansial tidak murni dipengaruhi oleh program pelatihan. Cara pengukuran 1. Evaluasi hasil dilakukan setelah peserta pelatihan kembali ke lingkungan kerjanya masing-masing (*tracer study*); 2. Evaluasi hasil dapat menggunakan dokumen hasil kerja yang telah dicapai, kuesioner atau daftar cek sesuai dengan substansi yang hendak diukur.

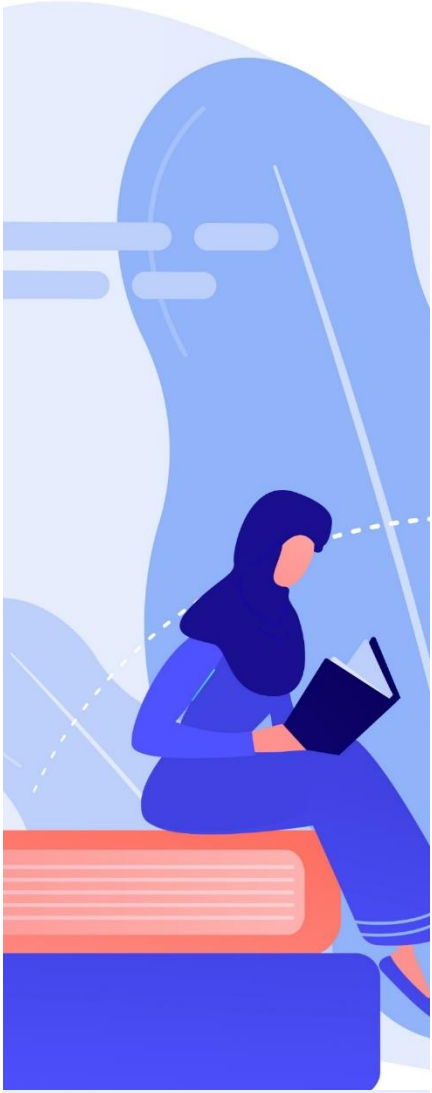

03

Pelaksanaan Kegiatan Mutu Pendidikan Tinggi

Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar

A. Mutu Pendidikan Tinggi

1. Pengertian Mutu Pendidikan

   Mutu berasal dari bahasa latin yaitu "*quails*" yang berarti *what kind of* (tergantung kata apa yang mengikutinya). Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan kebutuhan.[58]

   Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar.[59]

   Menurut Sallis, "*quality assurance is about consistently meeting product specification or getting things right first time, every time*."[60] yang berarti jaminan kualitas adalah tentang konsisten memenuhi

---

[58]Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.407.

[59]Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), h. 33.

[60]Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* (London: Stylus Publishing Inc, 2002), h.17.

spesifikasi produk atau mendapatkan hal yang benar tepat waktu, setiap saat. Lebih lanjut Sallis menjelaskan, "*quality assurance is about disigning quality into the process to attempt to ensure that the products is produced to predetermined specification. Put simply, quality assurance is a means of producing defect and fault-free products*" yang berarti jaminan mutu di desain sedemikian rupa untuk menjamin bahwa proses produksi menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sederhananya, jaminan kualitas adalah alat untuk menghasilkan produk dan bebas dari kesalahan.

Secara istilah mutu adalah "kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan."[61] Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Dalam sekolah mutu, standar mutu ditetapkan untuk setiap rangkaian kerja di dalam keseluruhan proses kerja, bila pekerja mencapai standart mutu untuk masing-masing rangkaian kerja, hasil akhirnya adalah sebuah produk bermutu. Saat membicarakan perbaikan mutu pendidikan, sering kali yang dibicarakan adalah perbaikan peringkat kenaikan kelas atau nilai rapor. Dalam sekolah yang bertepi

[61]M.N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 15.

seperti itu, tanggung jawab perbaikan mutu pendidikan lebih banyak ada pada guru. Secara umum para guru terfokus hanya pada aspek pendidikan seorang siswa: membantu siswa belajar dan mendapatkan pengetahuan. Bila mutu dimulai sebagai proyek terisolasi di sekolah atau ruang kelas, dan hal tersebut hampir mempengaruhi keseluruhan mutu pendidikan.[62]

Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam menggunakan (*easy of use*), estetika (a*esthetic*) dan sebagainya. Definisi strategi dari mutu adalah suatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*). Menurut Gaspersz, kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikkan atau ditetapkan.[63]

---

[62]Jerome S Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 75-76.

[63]Gaspersz Vincent, *Total Quality Management* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 5.

Sedangkan mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan *output* yang setinggi-tingginya.[64]

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Dzaujak bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam mengelola secara operasional dan efisien terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan sekolah sehingga nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.[65]

Penjaminan mutu adalah pemenuhan spesifikasi produk secara konsisten atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal. Untuk mendapatkan produk yang selalu baik sejak awal diperlukan sebuah sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu lebih menekankan tanggung jawab tenaga kerja dibandingkan inspeksi kontrol mutu. Mutu barang/jasa yang baik dijamin oleh sistem, yang dikenal dengan sistem penjaminan mutu, yang memposisikan bagaimana produksi seharusnya berperan sesuai dengan standar.

---

[64]Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h.108.

[65]Ahmad Dzaujah, *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar* (Jakarta: Depdikbud, 1996), h.8.

Istilah penjaminan mutu (*quality assurance*) pada awalnya digunakan di lingkungan dunia bisnis barang dan jasa, dengan maksud untuk menumbuhkan budaya peduli mutu. Jaminan mutu perlu dilakukan oleh perusahaan/lembaga untuk memberikan kepuasan kepada *costumer* pemakai produk. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan *output* pendidikan.[66]

Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan (konsumen).[67] Menurut Sallis dalam Sudarwan mengungkapkan bahwa mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang di terima oleh *costumer* sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Achmad mengemukakan bahwa, mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara

---

[66]Joremo S Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan* (Jakarta: Penerbit Riene Cipta, 2005), h. 85.

[67]Jerri H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 44.

operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.[68]

Philip B. Crosby dalam Makawimbang mengdefinisikan mutu adalah *comformance to requirement*, yaitu sesuatu dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Boleh juga diartikan bahwa “mutu adalah kesesuaian terhadap permintaan persyaratan (*the conformance of requirements*).[69]

Joseph M. Juran dalam Makawimba memberikan pengertian bahwa mutu sebagai "tempat untuk pakai" dan menegaskan bahwa dasar misi mutu sebuah sekolah adalah ''mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat". Lebih lanjut Juran mengatakan bahwa ''tepat untuk pakai" lebih tepat ditentukan oleh pemakai bukan oleh pemberi. Pandangan Juran tentang mutu merefleksikan pendekatan rasional yang berdasarkan fakta terhadap organisasi bisnis dan amat menekankan pentingnya proses perencanaan dan kontrol mutu. Titik fokus filosofi manajemen mutu adalah keyakinan

---

[68]Saudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan* (Cet: I. Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2003) h. 7.

[69] Jerri H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 44.

organisasi terhadap produktivitas individual. Mutu dapat dijamin dengan cara memastikan bahwa setiap individu memiliki bidang yang diperlukannya untuk menjalankan pekerjaan dengan tepat. Dengan perangkat yang tepat, para pekerja akan membuat produk dan jasa secara konsisten sesuai dengan harapan *costumer*.[70]

Beberapa pandangan Juran tentang mutu adalah

a. Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir;
b. Perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan, bukan program sekali jalan;
c. Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator;
d. Pelatihan massal merupakan prasyarat mutu;
e. Setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan.[71]

Mutu memerlukan waktu, proses dan ketelatenan untuk mewujudkan ide-ide baru dengan baik sejak awal. Tiap langkah dalam mewujudkan mutu diperlukan disiplin untuk selalu memenuhi seluruh

---

[70]Jerri H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 42.

[71]Jerri H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 43.

persyaratan pekerjaan agar hasil yang diharapkan terwujud. Dalam sebuah lembaga mutu yang baik lahir dari disiplin bersama, tanggung jawab bersama, dan komitmen bersama.

Menurut Crosby mutu ialah *conformance to retirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau standarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, produk jadi. Menurut Feigenbaum mutu adalah kepuasan pelanggang sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan penuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.[72]

Mutu adalah konsep yang kompleks. Hal ini dinyatakan Dalrymple sebagai berikut: *"quality is conceptually complex and represents a synthesis of lessons, methods, and acquired knowledge from a range of disciplines".* Akibatnya pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dapat difungsikan dengan kompleksitas dan luasnya pandangan mengenai mutu, karena pemahaman akan mutu terkait dengan

[72]Abdul Hadi dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.89.

pengalaman, metode dan pengetahuan dari berbagai bidang keilmuan. Dengan luasnya cakupan mutu, pendidikan hendaknya membuat skala prioritas dalam pengembangan mutu jangka pendek dan jangka panjang.[73] Sollis dalam mengemukakan dua standar utama untuk mengukur mutu, yaitu (1) standar hasil dan standar pelayanan, dan (2) standar *costumer*.[74]

Setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Walupun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan mutu, terutama jika mutu tersebut sudah menjadi kebiasaan kita. Namun, ironisnya kita hanya bisa menyadari keberadaan mutu tersebut saat mutu hilang. Satu hal yang biasa kita yakini adalah mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan yang sebaliknya. Bertolak dari kenyataan tersebut, mutu

---

[73]*Iye Haji Hasan, Evaluasi Implementasi kebijakan Mutu Pendidikan Pada sekolah menengah Atas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, 2013), h. 10-11.*

[74]Saudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, h. 79.

dalam pendidikan akhirnya merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan.[75]

Adapun indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan, misalnya: tes tertulis, anekdot, skala sikap. Dalam konteks pendidikan, indikator mutu berpedoman pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (misalnya: setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun, dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, seperti: ulangan umum, UN, atau prestasi bidang lain, misalnya prestasi dibidang olah raga dan seni. Bahkan prestasi sekolah berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana disiplin, keakraban.[76]

Mutu pendidikan diukur secara universal baik dari segi input, proses, *output* maupun *outcome*. Ada 13 karakteristik yang di nilai dalam hal mutu pendidikan yaitu

---

[75]Edward Sallis, *Total Quality Management In Education* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), h. 29-30.

[76]Nurhasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia*, *Kurikulum untuk Abad 21; Ibdikator Cara pengukuran dan Faktor Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Sindo, 1994), h. 390.

a. Kinerja (*performan*),
b. Waktu wajar (*timelines*),
c. Handal (*reliability*),
d. Data tahan (*durability*),
e. Indah (*aesteties*),
f. Hubungan manusiawi (*personal interface*),
g. Mudah penggunaannya (*easy of use*),
h. Bentuk khusus (*feature*),
i. Standar tertentu (*comformence to specific*ation),
j. Konsistensi (*concistency*),
k. Seragam (*uniformity*),
l. Mampu melayani (*serviceability*),
m. Ketepatan (*acuracy*).[77]

Dari sekian banyak pengertian mutu di atas, dapat digambarkan bahwa mutu merupakan hasil terbaik yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap apa yang dilakukan sehingga mampu memberikan kepuasan, kenyamanan, kesejahteraan dan tidak menerima keluhan dari pelanggan.

Penjaminan mutu (*Quality Assurance/QA*) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian

---

[77] Husasini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 411.

(*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *stakeholders*. Penjaminan mutu memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk desain kegiatan proses perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dan kedua, dalam bentuk budaya mutu (*quality culture*) yang mengandung tata nilai (*values*) yang menjadi keyakinan *stakeholders* pendidikan dan prinsip atau asas-asas yang dianutnya. Dengan demikian penjaminan mutu sebagai suatu sistem mengandung tata nilai dan asas dalam proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.[78]

Memahami mutu pendidikan dapat dilihat berdasarkan kesamaan perspektif produsen dan konsumen. Siswa sebagai konsumen utama dalam pendidikan sudah seharusnya diutamakan dalam pengembangan mutu pendidikan. Namun terkadang dalam pelaksanaan pendidikan, sering kali kepentingan pengembangan kompetensi siswa kurang menjadi perhatian. Akibatnya siswa harus mengalami berbagai

---

[78]*Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, h. 2.*

perubahan sistem dan mutu pendidikan akibat pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dan berkuasa atas pendidikan.

Pemerintah pusat dan daerah serta sekolah sebagai produsen pendidikan selayaknya menerapkan sistem pendidikan profesional sehingga dapat membangun aliansi strategis antara kepentingan pendidikan, komersial dan politik pemerintah dalam pendidikan. Dengan mengadakan aliansi maka pendidikan akan memiliki sumber daya yang lebih mampu mengembangkan program pendidikan bermutu.

Upaya menjaga mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu. Dalam manajemen mutu semua fungsi manajemen dijalankan oleh para kepala sekolah diarahkan agar semua pelayanan diberikan semaksimal mungkin sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Berkaitan dengan upaya tersebut diperlukan upaya pengendalian mutu *(quality control).*

Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan *(assurance),* bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan sekolah mencapai standar mutu tertentu

disebut dengan istilah penjaminan mutu *(quality assurance).*

Dalam penerapan sistem penjaminan mutu, proses yang terjadi menggambarkan semua kegiatan yang menjamin hasil/keluaran yang dihasilkan melalui proses yang dijanjikan. Dengan sistem ini kebutuhan akan kegiatan kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan peningkatan produk.

Mutu dalam pendidikan bukanlah barang akan tetapi layanan, di mana mutu harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan keinginan semua pihak/pemakai dengan fokus utamanya terletak pada peserta didik (*leaners*).[79] Secara konsep mutu dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) konsep absolut, mutu pada konsep ini memungkinkan kepala sekolah untuk merumuskan standar maksimal, kepala sekolah akan berpikir bahwa sekolah yang dipimpin harus selalu menjadi sekolah unggulan baik bertaraf nasional maupun internasional tapi pada kenyataannya hal ini sulit untuk direalisasikan. Pada konsep ini, mutu akan menjadi simbol status bagi pelanggan internal maupun eksternal, sehingga

[79]Lihat Sofan Amri, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), h. 18.

stakeholder akan merasa bangga dan merasa puas, khususnya bagi orang tua peserta didik.

Sistem penjaminan mutu pendidikan, dilakukan beberapa tahap, yaitu: (1) pembakuan mutu, (2) fokus terhadap penjaminan mutu, dan (3) pelaksanaan mutu. Agar pendidikan mengembangkan fokus mutu, setiap pihak dalam sistem sekolah mesti mengakui bahwa setiap *output* lembaga pendidikan adalah konsumen. Sistem pendidikan memerlukan komitmen untuk berfokus pada mutu dan semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan mutu pendidikan. Perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan juga terus menerus dilakukan, karena proses mutu tidak mengenal kesempurnaan, melainkan terus diperbaiki agar lebih bermutu.

Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu tidak ada pola baku yang harus diikuti. Tetapi bukan berarti upaya peningkatan mutu menjadi tidak memiliki bentuknya. Hal inilah yang menjadi perhatian utama bagi setiap pimpinan institusi pendidikan dalam peningkatan kualitas manajemen dan lulusannya. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan mengembangkan penjaminan mutu (*quality assurance*) di institusi pendidikan itu sendiri. Dengan penjaminan mutu ini, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana

menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*continuous quality improvement*).

Sistem manajemen mutu adalah suatu kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk implementasi program mutu, mengukur/mengaudit kinerja organisasi dan untuk perbaikan mutu tanpa akhir. Juga memadukan semua unsur yang dibutuhkan organisasi untuk memperbaiki kepuasan pelanggan melalui produk, jasa, proses yang lebih baik. Strategi penjamin mutu yang harus diambil oleh setiap perguruan tinggi adalah perguruan tinggi menggalang komitmen menjalankan penjaminan mutu perguruan tinggi, perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutunya, perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja penjamin mutu pendidikan tinggi, dan perguruan melakukan *benchmarking* mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar.[80]

---

[80]M. Sukarjo dan Ukum Komarudin, *Landasan Pedidikan*, *Konsep dan Aplikasinya* (Cet. ke-vi; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 92-93.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

2. Dasar dan Prinsip Peningkatan Mutu Pendidikan

   Peningkatan mutu pendidikan bagi sebuah lembaga pendidikan saat ini merupakan prioritas utama. Hal ini bagian terpenting dalam membangun pendidikan yang berkelanjutan. Menurut Hensler dan brunell dalam Husaini Usman, ada empat prinsip utama dalam manajemen mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut

   a. Prinsip pelanggan;
   b. Mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan;
   c. Respek terhadap setiap orang;
   d. Setiap orang di lembaga pendidikan dipandang memiliki potensi;
   e. Manajemen berdasarkan fakta;
   f. Pendidikan berorientasi pada fakta, maksudnya setiap keputusan selalu didasarkan pada fakta, bukan

pada perasaan (*feeling*) atau ingatan semata;

g. Perbaikan terus-menerus;
h. Agar dapat sukses setiap lembaga pendidikan perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan.[81]

Sedangkan menurut Aan Komaria, mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip mutu pendidikan penerapannya sebagai berikut

a. Penerapan khusus prinsip pertama orientasi pada pelanggan;
b. Penerapan khusus prinsip kedua kepemimpinan;
c. Penerapan khusus prinsip ketiga keterlibatan orang-orang;
d. Penerapan khusus prinsip keempat pendekatan proses;
e. Penerapan khusus prinsip kelima menggunakan pendekatan sistem pada manajemen;
f. Penerapan khusus prinsip keenam perbaikan secara berkelanjutan;
g. Penerapan khusus prinsip ketujuh pendekatan aktual dalam pembuatan keputusan;

[81]Husaini Usman, *Manajeman Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan* (Jakart: Bumi Aksara, 2011), h. 572-573.

h. Penerapan khusus prinsip kedelapan hubungan yang saling menguntungkan dengan supplier.[82]

Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut

a. Komitmen pada perubahan

   Pemimpin atau kelompok yang ingin menerapkan program mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Pada intinya, peningkatan mutu adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berbobot. Lazimnya, perubahan tersebut menimbulkan rasa takut, sedangkan komitmen dapat menghilangkan rasa takut.

b. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada

   Banyak kegagalan dalam melaksanakan perubahan karena melakukan Sesuatu sebelum sesuatu itu jelas.

c. Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan

   Hendaknya, perubahan yang akan dilakukan berdasarkan visi tentang perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

d. Pada awalnya, visi tersebut hanya dimiliki oleh pimpinan atau seorang inovator, kemudian

[82]Aan Komariah dkk, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.53.

dikenalkan kepada orang-orang yang akan terlibat dalam perubahan tersebut. Visi dapat menjadi pedoman yang akan membimbing tim dalam perjalanan pelaksanaan program mutu.

e. Mempunyai rencana yang jelas

Mengacu pada visi, sebuah tim menyusun rencana dengan jelas. Rencana menjadi pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu. Pelaksanaan program mutu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal ataupun eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut akan selalu berubah. Rencana harus selalu di *updated* sesuai dengan perubahan-perubahan. Tidak ada program mutu yang terhenti {stagnan) dan tidak ada dua program yang identik karena program mutu selalu berdasarkan dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Program mutu merefleksikan lingkungan pendidikan di manapun ia berada.[83]

Beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan di antaranya sebagai berikut

[83]Nana Syaodih, dkk. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, h. 9.

a. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita.
b. Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi "kegagalan sistem" yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
c. Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.
d. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan Kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, *team work*, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu.

e. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing, dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah dan mengembangkan program baru.
f. Banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan, atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.
g. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh

program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para profesional Pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.

h. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan "program singkat ”peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.[84]

Mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan sebaliknya. Hal tersebut berarti mutu dalam pendidikan merupakan sesuatu hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan pendidikan dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang makin keras. Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk

[84]Nana Syaodih, dkk. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, h. 10-11.

memperoleh kontrol yang lebih baik melalui usahanya sendiri. Kebebasan yang baik harus disesuaikan dengan akuntabilitas yang baik. Institusi-institusi harus mendemonstrasikan bahwa mereka mampu memberikan pendidikan yang bermutu pada peserta didik.

B. Penerapan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Sedangkan pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik).

Penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat ad hoc. Oleh karenanya, proses pengawasan (monitoring) dan evaluasi perlu diterapkan secara terus menerus penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan untuk melakukan tindakan perbaikan terus menerus.[85]

---

[85]Rinda Hedwig, *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Monitoring Dan Evaluasi Internal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 1-2.

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, selanjutnya disingkat SPM-Dikti, merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.[86]

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

[86]Repuplik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, h. 2.

Mengenai mutu pendidikan dijelaskan "Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indinesia".[87] Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana. Dapat dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.[88]

Badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan inilah yang harus disiapkan oleh pemerintah, sehingga mutu pendidikan itu memiliki kriteria minimal yang senantiasa harus dipenuhi oleh pengelola pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan di Indonesia, Depdiknas mengembangkan sebuah Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP). Penjaminan mutu terhadap pendidikan nasional, salah satunya diwujudkan dalam kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

---

[87]Repuplik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pasal 1 ayat 1 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 2.

[88]Repuplik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pasal 2 ayat 1 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 7.

tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional serta mempertegas komitmen pemerintah untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 Ayat (1), yang dirumuskan dalam kalimat berikut "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."[89] Pengertian bermutu yang dimaksud adalah yang memenuhi delapan standar pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP, dan penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.[90] Standar nasional pendidikan adalah penjabaran visi dan misi pendidikan nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)

---

[89]Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas, 2008), h.59.

[90]*Niki Sae, Macintosh Setting*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai Pendidikan *(Jakarta: CV Eko Jaya, 2005), h. 33.*

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada dasarnya Standar Nasional Pendidikan adalah (kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya.

Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan mutu juga tercermin dalam rumusan visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Sedangkan misinya adalah (1) meningkatkan ketersediaan pendidikan; (2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan; (3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; (4) meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; (5) meningkatkan kepastian/jaminan memperoleh layanan pendidikan.[91]

[91]Niki Sae dan Macintosh Setting, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nonor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 57.

Ada beberapa elemen dasar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia

1. Insan pendidikan patut mendapatkan pengahargaan

   Tentunya lebih baik jika pendidikan diberikan penghargaan ekstrinsik (gaji, tunjangan, bonus, dan komisi) maupun penghargaan intrinsik (pujian, tantangan, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan dan pengembangan karir).

2. Meningkatkan profesionalisme pendidik

   Konsep "pendidik profesionalisme" selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang wawasan dan kebijakan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan (tindakan kelas), evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, manajemen pengelolaan kelas/sekolah, serta teknologi informasi dan komunikasi.

3. Sebisa mungkin kurangi dan berantas korupsi

   Sekolah yang diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan praktik korupsi kepada peserta didik.

4. Berikan saran dan prasarana yang layak

   Sekolah harus memiliki persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba lengkap dan cukup, seperti luas lahan, perabotan lengkap,

peralatan/laboratorium/media, insfrastruktur, sarana olahraga, dan buku dengan rasio 1:2.[92]

Dalam persfektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, di antaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, aplikasi metode, strategi dan pendekatan, pendidikan yang mutakhir dan modern, evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional.[93]

Pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015, Bab II Bagian Kesatu, Pasal 4 ayat (1) Standar terdiri atas

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;

---

[92] Muhammad Rifai. *Politik Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ruzzmedia, 2011), h. 156-157.

[93]Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 4.

7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.[94]

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 62 Tahun 2016 adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. SN DIKTI merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing standar nasional pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

   Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,

[94]Repuplik Indonesia, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 6.

standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.[95]

Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL kita akan memiliki patok mutu baik bersifat evaluasi mikro, seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggung jawabkan pada setiap jaiur, jenis, dan jenjang pendidikan. SKL yang dijabarkan ke dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran digunakan sebagai pedoman penilaian.[96]

---

[95]Repuplik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h.17.

[96]Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal

Rumusan CP di susun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. Empat unsur dalam CP diartikan sebagai berikut

a. Sikap dan tata nilai merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak;
b. Kemampuan kerja merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat;
c. Penguasaan pengetahuan merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan;
d. Wewenang dan tanggung jawab merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*, h. 7.

Dengan mengacu pada deskripsi CP KKNI di atas, rumusan CP lulusan dalam SKL dinyatakan kedalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang disesuaikan untuk lulusan perguruan tinggi.

1) Unsur sikap dalam CP (SKL) merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi;
2) Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur "penguasaan pengetahuan" dari CP KKNI, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu;
3) Unsur "keterampilan" merupakan gabungan unsur 'kemampuan kerja' dan unsur kewenangan dan tanggung jawab' dari deskripsi CP KKNI;
4) Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu, sedang keterampilan umum mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.[97]

[97]Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*, 2014. h.8.

Gambar 3.1 Capaian Pembelajaran Lulusan Program studi

Masing-masing unsur CP dalam SKL diartikan sebagai berikut

1) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan ssosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
3) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh

melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut

a) Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
b) Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi bidang tertentu, wajib di susun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh penyelenggara program studi.[98]

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

[98]Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penyusunan CP Lulusan Program Studi*, h. 9.

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Dalam SKL dinyatakan bahwa CP lulusan wajib mengacu kepada deskripsi CP KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

2. Standar Isi Pembelajaran

   Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar sering kali mengacu pada pencapaian minimal begitu juga dengan standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan.

   Standar isi yang dimaksud adalah berdasarkan Standar Nasional Dikti Nomor 44 pasal 8 Tahun 2015, yaitu

   a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
   b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
   c. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Standar isi pendidikan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, serta kalender pendidikan. Berdasarkan acuan umum ini masing-masing perguruan tinggi mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengembangkan standar isi pendidikan yang berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua perguruan tinggi di Indonesia.

Standar isi pendidikan tinggi yang dimaksud adalah

a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.[99] Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 2 juga menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Di samping itu, globalisasi telah mengakibatkan perubahan keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Untuk itu, pengembangan kurikulum merupakan salah satu strategi untuk pembangunan pendidikan nasional agar lulusan dapat memiliki beberapa keahlian, terutama kemampuan menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kecakapan-kecapakan berpikir teoretis dan praktis serta kecakapan-kecakapan lainya untuk dapat melakukan tugas pekerjaan secara efektif sesuai dengan tuntutan standar pekerjaan tertentu.

---

[99]Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 4.

Dengan adanya pengembangan kurikulum diharapkan agar mampu: (1) mutu pendidikan lebih terjamin; (2) lebih dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja; dan (3) peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan masyarakat dapat lebih terpenuhi. Maka, peninjauan kembali terhadap kurikulum dan proses pembelajaran hendaknya difokuskan pada pembinaan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi, pertama, sikap dan tata nilai. Kedua, kemampuan kerja. Ketiga, penguasaan pengetahuan. Keempat, tanggung jawab dan wewenang. Keempat kompetensi tersebut dijabarkan dalam capaian pembelajaran kurikulum berbasis KKNI.

Dalam SN DIKTI dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, sehingga CP merupakan unsur utama dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai CP yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan

kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Dalam KKNI, CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP di susun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab.[100]

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

---

[100]Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*, 2014. h. 7.

3. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompotensi Lulusan.[101] Proses pendidikan di sekolah menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 meliputi empat hal yaitu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.[102]

Standar Proses Pembelajaran yang dimaksud adalah

a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
b. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
   1) Karakteristik proses pembelajaran

      Terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

---

[101]Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasionai Pendidikan, h. 3.

[102]*Niki Sae dan Macintosh Setting*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai Pendidikan, h. 23.

2) Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran yang di susun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar, dan kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.

3) Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS), proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu

pada Standar Nasional Penelitian, dan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

4) Beban belajar mahasiswa

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.[103]

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pelaksanaan proses

[103]Republik Indosensia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 11-15.

pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Dalam Pasal 39 ayat 1 menjelaskan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[104] Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Mutu bukan hanya menekankan pada hasil akhir, melainkan juga pada proses, lingkungan dan manusia. Di samping itu berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka mutu pelayanan dipersepsikan baik atau memuaskan. Sedangkan apabila pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka mutu pelayanan dipersepsikan rendah.

4. Standar Penilaian

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian

[104]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 52.

pembelajaran lulusan.[105] Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran di samping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang

[105]Republik Indosensia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 10, tentang Standar Penilaian Pembelajaran, h. 6.

pembelajaran sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

Elemen Standar Penilaian Pembelajaran terdiri dari

a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
b. Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
c. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran;
d. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah;
e. Kelulusan Mahasiswa.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh

pemerintah.[106] Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Penilaian pendidikan dibagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; (2) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (3) penilaian hasil

---

[106]Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 44.

belajar oleh satuan pendidikan; (4) penilaian hasil belajar oleh pemerintah; dan (5) kelulusan.

5. Standar Pendidik

Sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di perguruan tinggi. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di perguruan tinggi tidak akan berlangsung secara memadai, yang pada gilirannya mengakibatkan sasaran pendidikan tidak akan tercapai. Sumber daya dapat dibagi menjadi dua, sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan dan lain sebagainya) dengan penegasan bahwa sumber daya selebihnya tidak akan mempunyai arti apapun bagi perwujudan sasaran sekolah tanpa adanya campur tangan sumber daya manusia.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

lulusan. Kualifikasi akademik yang dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, berikut penjabarannya

a. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
b. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
c. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;
d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;

e. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;
f. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
g. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
h. Dosen program doktor dan program doktor terapan. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau

doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.[107]

Adapun penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada

a. Kegiatan pokok dosen mencakup
   1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
   2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
   3) Pembimbingan dan pelatihan;
   4) Penelitian; dan
   5) Pengabdian kepada masyarakat.
b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

[107]Republik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 25-27.

c. Kegiatan penunjang.[108]

Dijelaskan bahwa guru/dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[109]

Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input proses *output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar

---

[108]Republik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 28.

[109]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Bab 1 pasal 1 tentang Guru dan Dosen*.

Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikasi keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Finch dan Crunkilton dalam Fathorrahman bahwa yang

dimaksud dengan kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.[110]

Stephen P. Becker dan Jack Gordon dalam Abdul Majid dan Dian Andayani mengemukakan beberapa unsur atau elemen yang terkandung dalam konsep kompetensi di antaranya

a. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya: seorang guru mengetahui bagaimana melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan dan proses pembelajaran terhadap warga belajar;
b. Pemahaman (*understanding*) yaitu kedalaman ranah kognitif dan afektif yang dimiliki oleh siswa. Misalnya: seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan harus memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan dan kondisi warga belajar di lapangan sehingga dapat melaksanakan program

[110]Fathorrahman, *Kompetensi Pedagogik, Profesional, Kepribadian dan Kompetensi Sosial dosen*, (Jurnal AKADEMIKA; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ASIA Malang, Vol. 15. No.1 Februari 2017), h. 3.

kegiatan secara baik dan afektif;

c. Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya: kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk menyusun alat peraga pendidikan secara sederhana;
d. Nilai (*value*), yaitu suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri individu;
e. Sikap (*attitude*), yaitu suatu perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
f. Minat (*interest*), ialah keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi psikologis. Misalnya: guru yang baik selalu tertarik dengan warga belajar dalam hal membina dan memotivasi supaya dapat belajar sebagaimana yang diharapkan.[111]

Keberhasilan dalam mengembang peran sebagai dosen, diperlukan adanya standar kompetensi. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 14 tentang guru dan dosen pasal 10, menentukan bahwa kompetensi guru

[111]Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), h. 51-52.

dan dosen meliputi kompetensi padagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

a. Kompetensi *paedagogik*

Kompetensi *paedagogik* adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[112] Sanjaya mengungkapkan bahwa kompetensi *paedagogik* merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut

1) Pemahaman wawasan/landasan kependidikan;
2) Pemahaman terhadap peserta didik;
3) Pengembangan kurikulum/silabus;
4) Perancangan pembelajaran;
5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
7) Evaluasi Hasil Belajar (EHB);

---

[112]Asrorun Niam, *Membangun Profesionalitas Guru* (Jakarta: ELSAS, 2006), h. 199.

8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[113]

Kompetensi penguasaan atas bahan pengajaran yang dimiliki guru atau dosen adalah penguasaan yang mengarah kepada spesialisasi atas ilmu atau kecakapan/pengetahuan yang diajarkan. Penguasaan yang meliputi bahan bidang studi sesuai dengan kurikulum dan bahan pendalam aplikasi bidang studi. Kesemuanya ini amat perlu dibina karena selalu dibutuhkan dalam

1) Menguraikan ilmu pengetahuan atau kecakapan dan apa yang harus dikerjakan ke dalam bentuk komponen-komponen atau informasi yang sebenarnya dalam bidang ilmu atau kecakapan yang berangkutan;
2) Komponen-komponen atau informasi untuk memudahkan siswa untuk mempelajari pelajaran yang diterimanya.

Kompetensi dalam cara mengajar atau keterampilan mengajar sesuatu bahan pengajaran sangat diperlukan guru dan dosen. Khususnya

---

[113]Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Yogyakarta: Graha Guru, 2011), h. 32.

keterampilan dalam

1) Merencanakan atau menyusun setiap program satuan pelajaran, demikian pula merencanakan atau menyusun keseluruhan kegiatan untuk satuan waktu (semester);
2) Mempergunakan dan mengembangkan media pendidikan (alat peraga) bagi murid dalam proses belajar yang diperlukannya;
3) Mengembangkan dan mempergunakan semua metode-metode mengajar sehingga terjadi kombinasi dan variasi yang efektif.[114]

Kompetensi pedagogis yaitu kemampuan mengelola perkuliahan yang meliputi pemahaman terhadap mahasiswa, perancangan dan pelaksanaan perkuliahan, evaluasi perkuliahan, dan pengembangan mahasiswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

---

[114]Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 263-264.

Standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menyejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.[115]

Setiap guru atau dosen memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri yang unik. Tidak ada yang sama, walaupun mereka sama-sama memiliki kepribadian keguruan. Jadi, pribadi keguruan itu "unik" pula, dan perlu pengembangan secara terus menerus agar dosen itu terampil dalam

1) Mengenal dan mengakui harkat dan potensi dari setiap individu yang diajar;
2) Membina suatu suasana sosial yang meliputi interaksi belajar-mengajar sehingga amat bersifat

[115]E Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 117.

menunjang secara moral (*batiniah*) terhadap murid bagi terciptanya kesepahaman dan kesamaan arah dalam pikiran serta perbuatan murid dan guru;

3) Membina suasana saling menghormati, saling bertanggung jawab dan saling mempercayai antara pendidik dan peserta didik.[116]

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kopetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

c. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua /wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian

[116]Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, h. 263-264.

dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk

1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat;
2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan
4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.[117]

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidiakan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

d. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.[118] Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi, pembelajaran

---

[117]Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, h.33.

[118]Asrorun Niam, *Membangun Profesionalitas Guru*, h. 32.

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya;
2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik;
3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya;
4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi;
5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan;
6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran;
7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.[119]

[119]E Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, h. 35-136.

Pendidik yang di nilai kompoten secara profesional, apabila

1) Mampu mengembang tanggung jawab dengan sebaik-baiknya;
2) Mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil;
3) Mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan intruksional);
4) Mampu menjalankan peranannya dalam proses pembelajaran dalam kelas.

Kewajiban seorang pendidik profesional dituntut untuk

1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang bermutu;
2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompotensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3) Bertindak objektif dan tidak skriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang pengetahuan, teknologi dan seni;

4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.[120]

Dosen berfungsi sebagai agen yang mentransformasikan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa, sehingga jika dosennya berkualitas, maka diharapkan ilmu dan pengetahuan yang ditransformasikan juga berkualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dosen di perguruan tinggi memegang peranan strategis dalam pembinaan akademik dan kemahasiswaan. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan

[120]Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 38.

kualitas dosen.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan instrumen penting dalam pendidikan dan menjadi satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang sarana dan prasarana sekolah. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran yang bersifat langsung. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat 1 menjelaskan

> Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan. Buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.[121] Selanjutnya prasarana pendidikan adalah semua fasilitas untuk mempermudah proses pembelajaran, tapi sifatnya tidak langsung. Misalnya ruang kelas, gedung, meja kursi, dan Iain-Iain.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai Pendidikan passal 42 ayat 2 menjelaskan

---

[121]*Niki Sae dan Macintosh Setting*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai Pendidikan, *h. 33.*

> Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.[122]

Standar sarana dan prasarana mencakup: (1) pengadaan satuan pendidikan, (2) kelengkapan prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan gedung, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, dan (3) kelengkapan sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan.

Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah sangat menunjang proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen sarana dan prasarana secara baik agar kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dapat memenuhi standar. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat

---

[122]*Niki Sae dan Macintosh Setting*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai Pendidikan, h. 34.

diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.[123] Proses-proses yang dilakukan dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan sarana prasarana, meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan.

Perencanaan sarana dan prasarana diawali dengan mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Setelah diidentifikasi kebutuhannya selanjutnya kebutuhan tersebut dituangkan dalam perencanaan sarana dan prasarana sekolah. Proses berikutnya adalah pengadaan yaitu serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Berikutnya adalah proses pengaturan yaitu kegiatan inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Kemudiaan penggunaan, yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Terakhir adalah penghapusan yaitu kegiatan menghilangkan sarana dan prasarana

---

[123]Barnawi dan M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 48.

yang sudah tidak layak pakai.

Sebagai lembaga pendidikan sekolah memerlukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana prasarana yang lengkap akan memudahkan proses belajar mengajar. Selain itu, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu daya tarik bagi calon peserta didik.[124] Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan demi meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian kriteria standar sarana prasarana sekolah adalah: (1) rasio ruang kelas dengan siswa; (2) kelengkapan ruang kantor; (3) kelengkapan laboratorium; (4) kelengkapan buku referensi kelengkapan buku paket.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

   Standar pengelolaan adalah standar nasional pengelolaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas pendidikan.

   Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah

   a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan

[124]Barnawi dan M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, *h. 7.*

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;

b. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;

c. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi;

d. Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

   1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
   2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
   3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
   4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

e. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh *civitas* akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;

1) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
2) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
4) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan

pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan

5) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.[125]

Pengelolaan pembelajaran merupakan proses yang kompleks, di dalamnya mencakup proses/kegiatan belajar dan kegiatan mengajar. Kegiatan belajar terutama terjadi pada siswa dengan segala aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sedangkan kegiatan mengajar diperangkan oleh guru atau doses dalam perannya sebagai fasilitator dan desainer proses pembelajaran. Oleh karena itu, kualitas proses pembelajaran termasuk juga hasil-hasilnya sangat ditentukan oleh kualitas interaksi dalam proses tersebut, meskipun dikarenakan kewenangannya, peran guru/dosen akan lebih menonjol bila dilihat dari sudut manajemen pembelajaran. Proses pembelajaran ialah proses memanusiakan manusia, yakni mengaktualisasikan berbagai potensi manusia, sehingga potensi-potensi tersebut dapat menolong

[125]Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015, Pasal 38, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 34.

dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Sebuah proses belajar mengajar dapat di katakan gagal, jika antara sebelum dan sesudah mengikuti sebuah kegiatan belajar mengajar, namun tidak ada perubahan apa-apa pada diri siswa atau mahasiswa.[126]

Dalam suatu institusi pendidikan, mahasiswa dipandang pihak yang belajar, guru/dosen sebagai pihak yang mengajar dan seluruh konstelasi tersebut serta komponen-komponennya dalam suatu *setting* tertentu pada dasarnya menggambarkan suatu proses pembelajaran yang merupakan salah satu aktivitas penting dalam proses pendidikan pada institusi pendidikan. Proses pembelajaran merupakan suatu interaksi antara pembelajar (siswa/mahasiswa) dan pengajar (guru/dosen) dalam suatu interaksi sosial yang khas (interaksi edukatif) guna mencapai tujuan pembelajaran.

8. Standar Pembiayaan

   Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Untuk komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan

[126]Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 144.

alokasi dana dengan penuh perhitungan pengawasan penggunaan dana, baik untuk keperluan maupun keperluan investasi disertai dengan bukti-bukti fisik dengan besarnya dana yang dikeluarkan.[127]

Besarnya dana yang dikeluarkan pendidikan atau pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan personal.[128] Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan\dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayaan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara berkelanjutan. Biaya operasional pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,

---

[127]Barnawi dan M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, *h. 47*.

[128]*Nike Sae dan Macintosh Setting*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai Pendidikan, h. 34.

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Peningkatan mutu perguruan tinggi bukan hanya yang harus diperhatikan pemenuhan standar mutu yang diuraikan di atas akan tetapi yang tak kalah pentingnya yang harus diperhatikan adalah terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional. Keberadaan perguruan tinggi dalam suatu negara berperan sangat penting, salah satu peranannya yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tri Darma Perguruan Tinggi sendiri tercantum dalam Peraturan Mentristekdikti yang dimaksudkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.[129]

[129]Lihat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Ayat 1 tahun 2015.

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan acuan dasar dalam pendidikan selama di perguruan tinggi dan sebagai pengamalan di dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Pendidikan dan pengajaran

   Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidikan pada hakikatnya merupakan ajang memberikan ilmu pengetahuan. Pendidikan dan Pengajaran disini diartikan sebagai sistem pendidikan yang berkelanjutan atau lebih dikenal dengan istilah *transfer of knowledg*e.

b. Penelitian

   Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

c. Pengabdian masyarakat

   Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan *civitas* akademika yang memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[130]

Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tri Darma Perguruan Tinggi yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu tujuan pencapain yang harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi.

[130]Lihat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Ayat 1 tahun 2015.

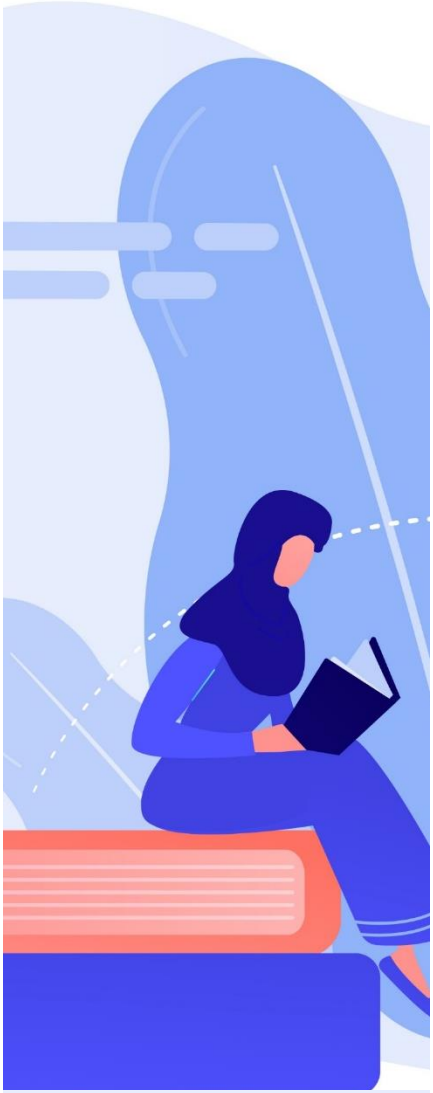

04

Contoh Hasil Penelitian Evaluasi Program Pendidikan

Evaluasi Program Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu
(Suatu Pendekatan Model Stake's Countenance Evaluatif di Universitas Muhammadiyah Makassar)

Evaluasi Program Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu
(Suatu Pendekatan Model Stake's Countenance Evaluatif di Universitas Muhammadiyah Makassar)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

   Peningkatan mutu merupakan dambaan semua peguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan. Meningkatkan mutu perlu rumusan pikiran tentang apa yang hendak ditingkatkan, memilih bagian yang paling dibutuhkan pelanggan, dan menghasilkan produk kegiatan yang paling unggul di antara produk sejenis. Oleh karena itu, peningkatan mutu memerlukan ide baru yang datang dari pikiran cerdas, selalu mengandung bagian yang berbeda dari yang ada sebelumnya, menghasilkan bagian yang lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih mempermudah sehingga lebih diminati.

   Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagaimana tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, bab I, pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip

a. Keberlanjutan

   Terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan non formal.

b. Menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal.

c. Memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi Negara yang seminimal mungkin.

d. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.[131]

Sistem penjaminan mutu pendidikan, merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Kegiatan yang sistemik dan terpadu tersebut dilakukan oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat serta melibatkan dunia usaha.

---

[131]Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Nomor 63 Tahun 2009, h. 3.

Upaya penjaminan kualitas (mutu) dilakukan berdasar pada prinsip *Countinuously Quality Improvement* (CQI) atau perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Prinsip ini baru bisa berlangsung dengan baik *if and only if* (bila dan hanya bila) perguruan tinggi tersebut berhasil membangun *quality culture* menuju *university culture*, melalui sekurang-kurangnya 5 tahap, sebagai berikut

Tahap pertama, merumuskan *quality values*, yaitu mendefinisikan nilai-nilai yang dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan yaitu nilai-nilai yang dibangun bersama oleh semua unsur perguruan tinggi, dan menjadikan nilai tersebut sebagai landasan membangun keunggulan dan pembeda dengan perguruan tinggi lainnya. Kejujuran, kedispilinan, kebersamaan, dan keunggulan merupakan nilai-nilai pokok yang perlu menjadi nilai-nilai dasar bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan daya saingnya. Islam telah memberikan nilai-nilai unggul yang bersifat universal, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda

عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

{الاسلام يعلو ولا يعلى}[132]

[132]Abu> al-Hasan ‘Ali> bin ‘Umar bin Ah}mad bin Mahdi> bin Mas’u>d bin al-Nu’ma>n

Artinya

> Dari ‘Aidzi bin ‘Amr al-Mazani>, dari Nabi saw. bersabda: Islam adalah tinggi dan tidak ada yang mengungguli.

Sistem Islam adalah sistem yang terunggul. Sekian banyak nilai-nilai Islam bisa ditransformasi menjadi nilai-nilai unggul dalam penyelenggaraan perguruan tinggi untuk melahirkan daya saing yang tinggi. Persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah adakah kemauan (niat), kemampuan/kapasitas dan kesungguhan untuk menerapkan nilai-nilai Islam tersebut secara konkret di perguruan tinggi.

Al-Qur'an mengisyaratkan betapa orang-orang mumin tidak konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS al-saff/61:2-3

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya

> "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar

bin Dina>r al-Bagda>di> al-Da>ruqut}ni>, Sunan al-Da>ruqut}ni (Cet. I; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1424 H./2004 M.) Juz IV, h. 371.

kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan"[133]

Ayat tersebut di atas, mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya perlu memiliki nilai-nilai unggul, tetapi juga perlu menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam peningkatan mutu perguruan tinggi.

Tahap kedua, membangun *quality awareness* yaitu melakukan sosialisasi dan motivasi untuk membentuk kesadaran akan kualitas (mutu) terhadap semua unsur perguruan tinggi, mulai dari supra struktur organisasi (pengurus yayasan), pimpinan, dosen, karyawan sampai ke *cleaning service,* termasuk juga segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau *external customer*, sehingga semua unsur memahami, menghayati, dan bersedia terlibat dan melakukan upaya peningkatan mutu perguruan tinggi yang bersangkutan. Membangun kesadaran merupakan awal dari suatu proses untuk melahirkan konsistensi antara nilai-nilai Islam unggul yang dimiliki dengan upaya implementasi secara konkret dan konsisten dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

Tahap ketiga, ketika semua unsur perguruan tinggi telah memiliki kesadaran akan mutu maka segera ditanamkan *quality commitment* sehingga semua unsur

[133]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Gramasurya, 2015), h. 551.

perguruan tinggi tidak hanya memahami dan menghayati mutu tetapi sudah memiliki tekad dan motivasi untuk menghadirkan kualitas (mutu). Komitmen kualitas (mutu) bisa dilakukan secara formal seperti penandatanganan fakta integritas atau berupa '*pembaiatan*' dari semua unsur perguruan tinggi. Semua unsur perguruan tinggi secara bersama berikhtiar mengerahkan seluruh kapasitasnya, bersungguh-sungguh, dan ikhlas tanpa pamrih atau pamrihnya hanya mengharapkan '*mardhatillah*.

Komitmen yang kuat merupakan landasan yang kokoh bagi proses implementasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan penyelenggaraan perguruan tinggi. Namun, dalam proses implementasinya banyak pengaruh lingkungan yang bisa menjadikan komitmen tersebut naik-turun atau tidak stabil (*erratically up and down*). Karena itu komitmen terhadap mutu perlu terus dijaga dan diperkuat.

Tahap keempat adalah mengimplementasikan *quality behavior*, yaitu semua unsur perguruan tinggi berperilaku dan melaksanakan nilai-nilai unggul tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ketika dalam proses melaksanakan fungsi-fungsi organisasi, tetapi juga dalam kehidupan keseharian. Berperilaku berkualitas merupakan

'etalase' bagi nilai-nilai unggul. Perilaku berkualitas sebagai bagian dari *'akhlakul karimah*' merupakan indikator dan ukuran konkret untuk menyatakan keunggulan dan menjadi indikator keunggulan perguruan tinggi. Demikian itu Rasulullah saw. pernah bersabda

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا}[134]

Artinya

> Dari bi Khuraerah berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya.

Quality behavior meliputi perilaku akademik dan perilaku non akademik. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menekankan bahwa untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi maka perguruan tinggi perlu meningkatkan mutunya dengan cara mengembangkan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional baik standar akademik maupun standar non akademik.[135]

---

[134]Abu> Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy'as\ bin Ish|a>q bin Basyi>r bin Syida>d bin 'Amru al-Azdi> al-Sijistani> (Bairut: al-Maktabah al-'As}riyah, t.th.), Juz IV, h. 220.

[135]Mansyur Ramly, *Mengukuhkan Peranan Lembaga Pendidikan dalam Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas (Perspektif Islam)*, (Seminar Nasional, Unismuh Makassar, 30 Mei 2016

Implementasi secara sistematis dan konsisten terhadap keempat tahap tersebut merupakan esensi utama proses penerapan sistem penjaminan mutu yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Pasal 3 ayat (1) Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi.

Agar peningkatan mutu berjalan dengan baik, perlu ada mekanisme atau sistem yang bisa mengendalikan dan menjaminnya. Dalam pendidikan tinggi, mekanisme tersebut lebih dikenal dengan sebutan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT). Upaya sistematis dan berkelanjutan dimanifestasikan ke dalam suatu siklus kegiatan penjaminan mutu.

Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *stakeholder*. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penjaminan mutu memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk desain kegiatan proses perbaikan dan

pengembangan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dan kedua, dalam bentuk budaya mutu (*quality culture*) yang mengandung tata nilai {*values*) yang menjadi keyakinan *stakeholders* pendidikan dan prinsip atau asas-asas yang dianutnya. Dengan demikian penjaminan mutu sebagai suatu sistem mengandung tata nilai dan asas dalam proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.[136]

Untuk menjamin mutu pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (*continuous improvement*) perlu dilakukan.

Selanjutnya pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan. Apa yang menjadi esensi akreditasi adalah sebagai bentuk Akuntabilitas Publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dengan menggunakan instrumen dan kriteria pada Standar Nasional Pendidikan. Standar

[136]Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, h. 2.

Nasional pendidikan mencakup: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan pendidikan; dan 8) standar penilaian.[137]

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 49 Tahun 2015 adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. SN DIKTI merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan menjadi salah satu domain kebijakan publik berdasarkan pertimbangan bahwa aktivitas pendidikan terkait erat dengan kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, penentuan strategi, prioritas, arah, tujuan, dan sasaran pendidikan menjadi sarat dengan kepentingan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

---

[137]Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013, Pasal 2 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 7.

Banyak masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari pendidik, serta mutu profesionalisme dan kinerja pendidik. Mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan. Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak dapat bekerja/tidak diterima di dunia kerja, diterima bekerja, tetapi tidak berprestasi, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat.

Khususnya lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar, dari hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa ada tiga hal yang menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu

a. Dosen belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administrasi sebagai tenaga pendidik;
b. Dosen belum sepenuhnya memahami tahapan pengembangan kurikulum dan menyusun administrasi/bahan pembelajaran;
c. Mutu lulusan dalam hal lama studi, rata-rata IPK, dan masa tunggu mendapatkan pekerjaan belum sepenuhnya terpenuhi.[138]

Evaluasi program dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui analisis perbandingan antara tujuan dan hasil yang dicapai. Keberhasilan program mencapai tujuan yang telah ditetapkan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor aspek masukan (*Antecedents*), proses (*transactions*) dan hasil (*outcomes*) yang dapat dicermati dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam berupa evaluasi program pelaksanaan kegiatan "penjaminan mutu" di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
   a. Fokus penelitian

[138]Rancangan Program Kerja Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016-2017, h. 8.

Penerapan penjaminan mutu menuntut kecermatan, baik pada proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini terfokus pada program pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pada penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Fokus penelitian mencakup persoalan esensial yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan program penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar, meliputi: tenaga pendidik, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan mutu lulusan.

b. Deskripsi fokus

Berdasarkan fokus penelitian di atas, deskripsi fokus penelitian ini mencakup 1) realitas pemenuhan SDM Pendidik dalam hal: sistem rekrutmen dosen baru dan persyaratan administrasi dosen pada tahapan masukan (*antecedents*); 2) realitas pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam hal tahapan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum Unismuh Makassar pada tahapan masukan (*antecedents*); 3) gambaran pelaksanaan pembelajaran dalam hal: penguasaan dosen dalam menyusun dan penyiapan administrasi pembelajaran, penguasaan dosen dalam perkuliahan, interaksi dosen dengan mahasiswa, dan

kemampuan dosen dalam melakukan penilaian pembelajaran pada tahapan proses (*transactions*); 4) hasil capaian mutu lulusan dalam hal: lama studi, predikat lulusan berdasarkan IPK, masa tunggu bekerja, dan relevansi pendidikan dengan pekerjaan alumni pada tahapan hasil (*output* dan *outcomes*).

Gambaran tentang fokus dan deskripsi fokus penelitian ini dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut

Tabel 4.1 Matriks Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1. Tenaga Pendidik	a. Realitas pemenuhan SDM Pendidik pada tahapan masukan (*antecedents*) 1) Rekrutmen tenaga pendidik; 2) Persyaratan administrasi dosen.
2. Standar Isi Kurikulum	b. Realitas pelaksanaan standar isi kurikulum pada tahapan masukan (*antecedents*) 1) Penyusunan kurikulum; 2) Pelaksanaan Kurikulum;
3. Proses Pembelajaran	c. Gambaran pelaksanaan pembelajaran pada tahapan proses (*transactions*) Penguasaans dosen dalam menyusun dan penyiapan

	administrasi pembelajaran. 1) Penguasaan dosen dalam perkuliahan; 2) Interaksi dosen dengan mahasiswa; 3) Kemampuan dosen dalam melakukan penlilaian.
4. Mutu Lulusan	d. Hasil capaian mutu lulusan pada tahapan hasil (*output* dan *outcomes*) 1) Lama studi mahasiswa; 2) Predikat lulusan berdasarkan IPK; 3) Masa tunggu bekerja alumni; 4) Relevansi pendidikan dan pekerjaan alumni.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu (dengan menggunakan *Model Evaluatif Stake's Countenance* di Universitas Muhammadiyah Makassar). Adapun submasalah sebagai berikut

a. Bagaimana realitas pemenuhan SDM pendidik pada tahapan masukan (*antecedents*) di Universitas Muhammadiyah Makassar?
b. Bagaimana realitas pelaksanaan standar isi

pembelajaran pada tahapan masukan (*antecedents*) di Universitas Muhammadiyah Makassar?

c. Bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran pada tahapan proses (*transactions*) di Universitas Muhammadiyah Makassar?

d. Bagaimana hasil capaian mutu lulusan pada tahapan hasil (*output* dan *outcomes*) di Universitas Muhammadiyah Makassar?

4. Kajian Pustaka

Kajian ini dimaksudkan untuk mendudukkan posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian dan karya ilmiah sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian yang dianggap memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Kegiatan yang dilakukan adalah studi referensi awal yang bertujuan untuk mendapatkan temuan-temuan relevan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu

a. Ahmad Sofyan dalam penelitiannya Evaluasi Program Praktik Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan FITK-UIN Jakarta. Tujuan penelitian evaluasi ini adalah untuk: a) mengetahui penentuan sasaran atau tujuan program, sumber-sumber dan standar/kriteria keberhasilan program

PPKT; b) mengetahui tingkat kesesuaian rencana program PPKT yang telah terinstal dengan pelaksanaannya; c) mengetahui proses atau pelaksanaan program PPKT yang berlangsung di sekolah; d) mengetahui hasil program PPKT yang telah dicapai; e) mengetahui perbandingan hasil yang telah diperoleh dengan analisis manfaat dan biaya.[139]

Ahmad Sofyan meneliti dan membahas tentang evaluasi program Praktik Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan FITK-UIN Jakarta. Jika dilihat dari tujuannya, ada kesamaan yang akan diteliti, yaitu sama-sama mengevaluasi program di lingkungan pendidikan tinggi. Perbedaan yang dilakukan, yaitu mengevaluasi pelaksanaan program penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Makassar mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

b. Sahban Liba dalam penelitiannya tentang evaluasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi periode 2003-2010. Tujuan dari penelitian ini adalah: a) melakukan kajian dan analisis atas kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia khususnya di bidang peningkatan mutu pendidikan tinggi; dan

---

[139]Ahmad Sofyan, "*Evaluasi Program Praktik Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan FI*TK-UIN Jakarta", Disertasi (Jakarta: PPs UNJ, 2012).

b) mendapatkan uraian dan analisis konsep penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu di bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian ini lebih berorientasi pada kebijakan pendidikan tinggi secara umum dan nasional yang dapat dilihat pada renstra jangka panjang pendidikan tinggi (HELTS) 2003-2010 yang diintegrasikan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam HELTS tahun 2003-2010 terdapat tiga isu strategis yaitu: a) daya saing bangsa, b) otonomi, dan c) kesehatan organisasi. Ketiga unsur ini merupakan hasil/tujuan akhir dari satu siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi.[140]

Jika dilihat dari tujuan penelitian tersebut, ada kesamaan dengan apa yang akan peneliti lakukan yaitu meneliti dan membahas tentang evaluasi program pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Perbedaannya adalah pada objek penelitian yaitu Sahban Liba meneliti penjaminan mutu pada pendidikan tinggi secara keseluruhan yang ada di wilayah Indonesia sedangkan yang akan dilakukan adalah melakukan penelitian berkaitan dengan penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah

[140]*Sahban Liba, "Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Periode 2003-2010", Disertasi (Jakarta: PPs UNJ, 2011).*

Makassar dengan model *Stake's Countenance Evaluation*. Meskipun pada objek yang berbeda namun penelitian penjaminan mutu adalah sama-sama meneliti pemenuhan standar-standar pendidikan yang telah ditetapkan.

c. Helmiati tahun 2013 dengan judul Evaluasi Penerapan Penjaminan Mutu pada Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri Kota Tangerang. Adapun hasil temuan dari komponen pengoperasian aktivitas penjaminan mutu, diperoleh bahwa secara umum aspek-aspek dalam komponen pengoperasian aktivitas penjaminan mutu cukup memenuhi standar penjaminan mutu pada penyelenggaraan sekolah standar nasional, namun demikian masih terdapat kekurangan. Kesenjangan pada aspek komponen pengoperasian aktivitas penjaminan mutu, yaitu pertama aspek isi, kesenjangan yang terjadi adalah muatan lokal yang tidak mewakili kebutuhan siswa dan tidak mencirikan keunggulan lokal. Kedua aspek tenaga pendidik dan kependidikan, secara umum kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan cukup memenuhi standar. Kesenjangan terjadi pada kurangnya program peningkatan keterampilan dan wawasan akademik guru. Ketiga aspek sarana dan

prasarana, secara umum tidak terpenuhi. Kesenjangan terjadi pada rasio ruang kelas dengan siswa 1:32 di samping itu minimnya kelengkapan laboratorium. Keempat aspek pembiayaan, secara umum cukup terpenuhi namun dana yang ada cukup kegiatan operasional saja.

Kelima aspek proses, secara umum cukup terpenuhi kesenjangan terjadi pada pelaksanaan tugas mengajar kepala sekolah yang sering ditinggalkan dan kewajiban guru berada di sekolah selama 37.5 jam/minggu yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari tingkat kota, provinsi, maupun pusat. Keenam aspek pengelolaan, berdasarkan data 58% responden menyatakan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tidak terpenuhi. Kesenjangan terjadi pada sistem penerimaan siswa baru yang tidak dikelola secara mandiri oleh sekolah. Selain itu sistem penerimaan peserta didik baru secara online menimbulkan peluang-peluang kecurangan yang terbukti dengan tingkat kompetensi peserta didik baru, di mana nilai UN yang dimiliki siswa pada kenyataannya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa, bahkan setelah diadakan tes ujian dengan soal UN yang sama 70% tidak sesuai.

Memerhatikan temuan data dari enam aspek pada komponen pengoperasian aktivitas penjaminan mutu, empat aspek terpenuhi sedangkan dua aspek tidak terpenuhi maka dapat disimpulkan pengoperasian aktivitas penjaminan mutu secara umum dikategorikan cukup terpenuhi.

Hasil selama proses aktivitas penjaminan mutu, hasil yang diperoleh bahwa dari aspek proses dan pengelolaan 75% responden menyatakan efektif. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa hasil selama proses aktivitas penjaminan mutu secara umum dapat dikategorikan cukup terpenuhi.

Pada penelitian tersebut di atas, memfokuskan pada beberapa aspek, yaitu kurikulum, muatan lokal, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana di tingkat SMP. Sedangkan apa yang akan diteliti ada kesamaan dalam hal: kurikulum, peserta didik, dan pendidik. Namun yang membedakan adalah berkaitan dengan permasalahan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, instrumen, dan kisi-kisi penelitian, serta hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu mutu lulusan.

Pada penelitian ini bermaksud lebih memfokuskan pada evaluasi program pelaksanaan

penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebab dengan melihat fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki kualitas yang lebih baik, hal ini terlihat dengan jumlah mahasiswa yang masuk di Perguruan Tinggi tersebut. Penulis menduga pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Makassar berjalan dengan baik.

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

   Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut

   a. Untuk memberikan gambaran realitas pemenuhan SDM pendidik pada tahapan masukan (*antecedents*) di Universitas Muhammadiyah Makassar;
   b. Untuk memberikan gambaran realitas pelaksanaan standar isi pembelajaran pada tahapan masukan (*antecedents*) di Universitas Muhammadiyah Makassar;
   c. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran pada tahapan proses (*transactions*) di Universitas Muhammadiyah Makassar;
   d. Untuk memberikan gambaran hasil capaian mutu lulusan pada tahapan hasil (*output* dan *outcomes*) di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut

a. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai dasar pengembangan keilmuan, khususnya pada aspek kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai masukan bagi pihak penyelenggara pendidikan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Makassar agar senantiasa memperhatikan dan meningkatkan mutu pendidik.

B. Tinjauan Teoretis

1. Konsep Evaluasi Program

1) Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris "*evaluation*" yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi" yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif.[141] Pengertian evaluasi

[141]Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesiat (Edisi ke empa; Jakarta: Pusat Bahasa, 2013), h. 384.

yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, evaluasi adalah to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah.[142]

Terdapat dua pengertian dari evaluasi, yang pertama adalah evaluasi merupakan proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan untuk apa tujuan gelar yang telah atau sedang dicapai. Dan pengertian evaluasi yang kedua adalah evaluasi merupakan proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengambil keputusan.[143]

Menurut al-Ghazali arti evaluasi secara etimologis ialah *muhasabah* berasal dari kata *hasiba* yang berarti menghitung, atau kata *hasaba* yang berarti memperkirakan.

Dalam menguraikan tentang evaluasi dapat berlandaskan pada QS. al-Hasyr/59:18 berikut

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

[142]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar, Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h. 1.

[143]*John Boulmetis dan Phyllis Dutwin, The ABCs of Evaluation: Timeless Techniques for Program and Project Managers (San Fransisco: A Wiley imprint, 2005), h. 4.*

Terjemahnya

> Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[144]

Berdasarkan ayat di atas, pengertian evaluasi dapat dijelaskan dengan memperhatikan kata وَلْتَنْظُرْ yang artinya sepadan dengan kata menimbang (قدر), memikirkan (فكر تدبر), memperkirakan (قدر), dan membandingkan dan mengukur (قيس).[145]

Secara harfiah, evaluasi pendidikan *al-taqdir al-tarbawi* dapat diartikan sebagai penilaian dengan (bidang) pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan sebagai cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan.[146]

---

[144]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 547.

[145]Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al-Gazali tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 105.

[146]Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1992), h. 99.

Sebagai implikasi dari Al-Qur'an *al-Hasyr* ayat 18 yakni teori dasar evaluasi dalam pendidikan Islam, disadari atau pun tidak bahwa evaluasi sangat urgen dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam dunia pendidikan, karena evaluasi ini berfungsi sebagai alat ukur maju dan mundurnya suatu sistem pendidikan, hal ini dapat dilihat dari beberapa komponen di antaranya pendidik, peserta didik, metode, materi pelajaran dan lain sebagainya, hal ini dapat terlihat hasil evaluasi yang telah dilakukan.[147]

Ralph Tyler berpendapat bahwa evaluasi pendidikan adalah merupakan proses penentuan ke arah tujuan.[148] Evaluasi adalah proses dalam penyediaan informasi untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria tentang objek yang sedang di evaluasi. Lebih lanjut, Sutikno berpendapat bahwa tujuan dari kegiatan evaluasi adalah untuk pencerahan, pertanggungjawaban, perbaikan, klarifikasi, pengembangan dan alasan simbolis.[149]

---

[147]Muhammad Deviana Syuju'i, *Implikasi Paedagogis Qs. Al-Hasyr Ayat 18 Tentang Dasar Teori Evaluasi Pendidikan Islam* (Bandung, 13 Juli 2017), h. 3.

[148]*Naftaly S. Glasman dan David Nero Glasman, Evaluation in Decision Making: The Case of School Administration (North America, 1998), h. 3.*

[149]*Muzayanah Sutikno, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: PPS UNJ, 2009), h.1.*

Sedangkan program dapat didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam konsepsi ini, terdapat tiga pengertian penting yang perlu ditekankan dalam menentukan suatu program, yakni: 1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, 2) terjadi dalam waktu yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan 3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal, melainkan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan.

Dari beberapa penjelasan teori-teori di atas tentang evaluasi, maka berikut ini akan dijelaskan teori-teori dari beberapa ahli yang memberikan pengertian evaluasi program, sebagai berikut

Menurut Cronbach dan Stufflebeam, evaluasi program merupakan upaya menyediakan informasi untuk disampaikan pada pengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, Tyler mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan proses untuk

mengetahui apakah tujuan pendidikan dapat terealisasikan.[150]

Evaluasi program pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara cermat untuk mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Melalui metode tertentu secara cermat dan sistematis diperoleh data yang handal dan reliabel sehingga penentuan kebijakan selanjutnya akan tepat, dengan catatan data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tersebut adalah data yang tepat, baik dari segi isi, cakupan format maupun tepat dari segi waktu penyampaian. Untuk dapat menjadi evaluator program, seseorang harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan kemampuan praktik, cermat, objektif, sabar dan tekun, serta hati-hati dan bertanggung jawab.

---

[150]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, h. 4.*

2) Tujuan evaluasi program

Tujuan evaluasi program pendidikan adalah untuk memperoleh informasi akurat dan objektif tentang suatu program, serta mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah menganalisis sampai sejauh mana keterlaksanaan kegiatan program. Cronbach dan Stufflebeam dalam Hamzah, bahwa proses evaluasi tidak sekedar sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria sebagai pembanding dari proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran.[151]

Evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk

1) Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama;
2) Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

[151]Hamzah B. Uno, *Assessment Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 3.

3) Fungsi evaluasi program

Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu mengukur kemajuan, penunjang penyusunan rencanan dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali.[152]

Evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, di antaranya

1) Mengukur kemajuan, dalam hal ini setidak-tidaknya ada dua macam kemungkinan hasil yang diperoleh yaitu menggembirakan dan yang tidak menggembirakan;
2) Menunjang penyusunan rencana, dengan adanya hasil yang diperoleh dapat menunjang para evaluator untuk melakukan perencanaan ulang (*replanning*) atau perencanan baru. Evaluasi secara berkesinambungan, akan membuka peluang bagi evaluator untuk membuat perkiraan (*estimation*);
3) Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali, atas dasar hasil evaluasi yang diperoleh, evaluator perlu memperbaiki dan melakukan

[152]Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2003) h. 8.

penyempurnaan-penyempurnaan, perbaikan-perbaikan yang menyangkut organisasi, tata kerja, dan bahkan tujuan organisasi tersebut;[153]

4) Fungsi evaluasi sebagai sebuah proses pendidikan, secara umum mempunyai empat macam fungsi pokok;
5) Mengukur kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu;
6) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Komponen-komponen tersebut di antaranya adalah tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber belajar, dan prosedur serta alat evaluasi;
7) Untuk keperluan bimbingan dan konseling. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pelayanan bimbingan konseling oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing.

[153]Daryanto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 14-15

8) Untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali kurikulum sekolah.[154]

4) Manfaat evaluasi program

Dalam organisasi pendidikan, evaluasi program dapat disamaartikan dengan kegiatan supervisi. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula.

Evaluasi sangat dibutuhkan terutama dalam memaparkan secara sistematis dan detail, untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu program pendidikan itu telah berjalan. Berikut ada empat faktor pendorong atau kecenderungan yang menyebabkan evaluasi dibutuhkan.

1) Akuntabilitas, merujuk pada justifikasi untuk pencapaian hasil yang realistis suatu program;
2) Pelaporan perihal dana. Jika suatu program akan dipertanggung jawabkan, tentu dibutuhkan

[154]Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 5.

rincian secara detail penggunaan dananya secara transparan;

3) Kegiatan untuk mengetahui sampai sejauh mana performa dan hasil kerja yang sedang atau telah dilakukan baik dalam tahap proses, hasil, dan dampak;
4) Pengambilan keputusan suatu program pendidikan. Untuk memutuskan apakah program dapat terus dilaksanakan, direvisi dan dikembangkan, atau dihentikan.[155]

Kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tidak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan *(decision maker).*

2. Ruang Lingkup Evaluasi Program

Pendidikan dirancang dan dikembangkan sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem pendidikan terdiri dari sejumlah komponen yang saling tergantung,

[155]Marni Serepinah, *Kebermaknaan Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta, 2017). h. 79

terorganisasi dan bergerak bersama ke arah tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut terdiri dari komponen masukan (input), komponen proses (*throughput*), dan komponen keluaran (*output*).

Adapun ruang lingkup evaluasi program yang harus diperhatikan

a. Input pendidikan

   Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Segala sesuatu yang dimaksud adalah berupa sumber daya, perangkat-perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai alat dan pemandu bagi berlangsungnya proses.[156]

   1) Input sumber daya manusia;
   2) Input sumber daya manusia, meliputi: pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
   3) Input sumber daya non manusia, meliputi: peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan lain-lain;

[156]*Dikmenum, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (Jakarta: Depdikbud, 1999), h. 108*

4) Input perangkat lunak yaitu yang meliputi: struktur organisasi lembaga, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana pendidikan, program pendidikan, dan lain-lain;
5) Input harapan-harapan yang berupa: visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut semakin tinggi tingkat kesiapan Input, maka semakin tinggi pula mutu Input tersebut.

Peningkatan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya yang ada. Komponen dan sumber daya lembaga pendidikan.[157]

b. Proses Pendidikan

Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Dalam pendidikan proses yang

[157]Subagio Admodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ardadizya Jaya, 2000), h. 22.

dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lain.[158]

c. *Output* pendidikan

Output atau keluaran adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah siswa lulusan sekolah yang bersangkutan. Untuk dapat menentukan apakah seorang siswa berhak lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan penilaian, sebagai alat penyaring kualitas.[159]

Berkenaan dengan *output* dalam pendidikan dapat disimpulkan bahwa *output* pendidikan adalah hasil atau tolak ukur dari sebuah proses pendidikan yang menentukan baik, buruk atau berhasil atau tidak berhasil dari pelaksanaan program pendidikan itu sendiri.

---

[158]*Lihat Dikmenum, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah, h. 203.*

[159]*Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), h. 5.*

3. Model Evaluasi Program

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program pendidikan. Philips dalam bukunya yang berjudul *Training Evaluation and Measurement Methods* memberi ilustrasi penerapan tujuh macam model evaluasi program yaitu

a. Kirkpatrick approach, model ini banyak diterapkan untuk mengevaluasi program pelatihan. Dalam model ini dikembangkan kerangka kerja pengumpulan data penelitian yang secara konseptual mengacu pada tahap-tahap belajar. Konsep tersebut selanjutnya dinamakan empat level evaluasi yang terdiri dari: *reactic, learning, behavior, and result.* Evaluator behavior kemudian direvisi menjadi transfer;

b. CIPP (Context, Input, Process, and Product) model ini dikembangkan oleh National Study Committee on Evaluation of Phi Delta Kappa. Penggagas model ini adalah Stufflebeam. Menurut klasifikasi model berdasarkan tujuan, model ini termasuk model management analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi keputusan/kebijakan seorang manajer. Dalam perkembangan lebih lanjut, model ini banyak digunakan untuk mengevaluasi program

pendidikan. Komponen evaluasi produk pada program jangka panjang diperluas lagi menjadi evaluasi *impact, effectiveness, sustainability* dan *transportability*;

c. The Bell System approach. Model ini mirip dengan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick tetapi evaluasi lebih banyak dilakukan pada dampaknya saja. Data evaluasi diklasifikasikan menjadi empat yaitu: *reaction outcomes, capability outcomes, application outcomes,* dan *worth outcomes*;

d. Thee CIRO Approach. Model ini mirip dengan CIPP, namun evaluasi proses diganti dengan reaksi. CIRO merupakan singkatan dari Context evaluation, Input evaluation, Reaction evaluation, dan Outcome evaluation;

e. Saratoga Institute approach. Model evaluasi ini hampir sama dengan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick yang digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan. Pengumpulan data evaluasi program diklasifikasikan menjadi 4 macam juga yaitu: *training satisfaction, learning change, behavior change, dan organizational change*;

f. The IBM approach. Model evaluasi ini hampir sama dengan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick. Data

yang dikumpulkan terdiri dari: *reaction, testing, application, business results*;

g. Xerox approach , model ini agak berbeda dengan model yang lain. Kesamaan terletak pada jumlah klasifikasi data yang digunakan. Xerox approach mengklasifikasikan data evaluasi menjadi 4 macam, yaitu: *entry capability, end of course performance, mastery job performance,* dan *organizational performance.*[160]

Model-model evaluasi tersebut di atas menunjukkan satu dengan yang lainnya tampak bervariasi, tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan objek yang di evaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah di evaluasi. Menurut Kaufman dan Thomas, membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu

(a) *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler; (b) *Goal Free Evaluation Model,* dikembangkan oleh Scriven; (c) *Formatif Summatif Evaluation Model,* dikembangkan oleh

[160]Misykat Malik Ibrahim, *Evaluasi Program Bidang Pendidikan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 27-29.

Michael Scriven; (d) *Countenance Evaluation Model,* dikembangkan oleh Stake; (e) *Responsive Evaluation Model,* dikembangkan oleh Stake; (f) *CSE-UCLA Evaluation Model,* menekankan pada "kapan" evaluasi dilakukan; (g) *CIPP Evaluation Model,* dikembangkan oleh Stufflebeam; (h) *Discrepancy Model,* dikembangkan oleh Provus.[161]

a. Goal Oriented Evaluation Model (model evaluasi berorientasi pada tujuan)

   Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, mengecek sejauh mana tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program.[162]

b. Goal Free Evaluation Model (model evaluasi terus-menerus)

   Model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan Tyler, evaluator

[161]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 40.

[162]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 41.

terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah tercapai, dalam model *goal free evaluation* (evaluasi lepas dari tujuan) justru menoleh dari tujuan. Menurut Mechael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi baik hal positif (hal yang diharapkan) maupun hal negatif (memang tidak diharapkan).

c. Formatif Summatif Evaluation Model

Selain model "evaluasi lepas dari tujuan", Michael Scriven juga mengembangkan model lain, yaitu model formatif sumatif. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang di evaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif). Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif

memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan demikian, model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang "apa, kapan, dan tujuan" evaluasi tersebut dilaksanakan.

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program.

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif

dan sumatif maka lingkup sasaran yang di evaluasi juga berbeda.[163]

d. Countenance Evaluation Model

Model evaluasi ini menekankan pada aspek operasi deskripsi (*description*) dan penilaian (*judgement*), yang dibedakan dalam 3 (tiga) fase evaluasi yaitu: persiapan *antecedents*, proses/*transaksi process*/*transactio*n dan keluaran/ hasil *output*/*outcomes*. Model evaluasi Stake ini, tidak hanya membandingkan untuk menentukan kesenjangan, namun juga membandingkannya dengan standar yang ditetapkan agar dapat diketahui sejauh mana hasil dan manfaat dari suatu program tersebut.

Menurut ulasan tambahan yang diberikan Fernandes (1984), model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (judgments); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu *(1)anteseden (antecedents/context), (2) transaksi (transaction/ process), dan (3) keluaran (output-outcomes).* Oleh Stake, model evaluasi yang diajukan untuk diagram,

[163]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 42-43.

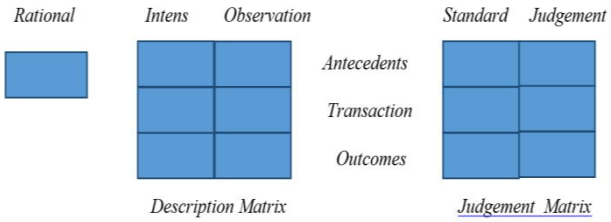

menggambarkan deskripsi dan tahapan seperti berikut

Gambar. 4.1 Evaluasi model Stake[164]

Tiga hal yang dituliskan di antara dua diagram, menunjukkan objek atau sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang di evaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) *anteseden* yang diartikan sebagai konteks, (2) *transaction* yang diartikan sebagai proses, dan (3) *outcomes* yang diartikan sebagai hasil. Selanjutnya, kedua matriks yang digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Stake mengidentifikasi 3 (tiga) tahap dari evaluasi program pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya yaitu

1) *Antecedents phase*, sebelum program diimplementasikan: kondisi/kejadian apa yang

[164]Lihat. Robert E. Stake, *The Countenance of Education Evaluation*, paper, *Center for Intructional Research and Curriculum Evaluatio, University of Illlinois*, 2006, h. 6.

ada sebelum implementasi program? Apakah kondisi/kejadian ini akan mempengaruhi program?

2) *Transactions phase*, pelaksanaan program: Apakah yang sebenarnya terjadi selama program dilaksanakan? Apakah program yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program?
3) *Outcomes phase*, mengetahui akibat implementasi pada akhir program. Apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan? apakah klien menunjukkan perilaku pada level yang tinggi dibanding dengan pada saat mereka berada sebelum program dilaksanakan?[165]

Setiap tahapan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu description (deskripsi) dan *judgment* (keputusan/penilaian) yaitu

1) *Antecedents phase* (masa ketika sebelum program diimplementasikan)

   Description, meliputi; (1) intents (tujuan-tujuan apa yang telah ditetapkan? apa efek; yang diinginkan?); dan (2) *observation* (data yang berhubungan dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi pada *phase* ini deskripsi/gambaran

[165]Lihat. Roger Kaufman dan Susan Thomas, *Evaluasi without Fera*, (London: New Viewpoints, 1980), h. 4.

kondisi yang ada/nyata. *Jugments*, terdiri dari: (1) standar (kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan); dan (2) *judgment* (proses perbandingan intens, observasi dengan standar).

2) *Trancactionals phase* (masa ketika program di implementasikan)

   Description, meliputi; intens (tindakan apa yang akan dilakukan), dan *observasion* (perilaku klien dan dosen, yang dilakukan dosen sehari-hari). *Judgments* terdiri dari (1) standar (kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan) dan (2) *judgment* (proses perbandingan intens, observasi dengan standar).

3) *Outcomes phase*, (periode atau masa setelah program dilaksanakan di mana data-data dikumpulkan)

   Description, meliputi; (1) intens (seperti apa hasil yang diinginkan atau diprediksi), dan (2) *observation* (data yang dikumpulkan diakhir program biasa berupa skor tes dan nilai)

Ketiga fase atau tahapan tersebut saling berhubungan dengan *description* dengan *judgment*. Menurut Stake, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka

mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu

1) Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama;
2) Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

Suatu keistimewaan khusus dari model Stake adalah spesifikasi dari standar yang digunakan dalam membuat keputusan atau penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model Stake memberikan: (1) informasi deskripsi yang lebih banyak dari seluruh fase evaluasi; dan (2) eksplikasi (pemaparan) dari standar-standar yang akan digunakan. Untuk spesifikasi standar-standar yang akan digunakan dalam penilaian, penggunaan independen dimungkinkan, dalam hal ini adalah sejumlah data yang sudah ada, standar-standar yang telah di susun, dan orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan program selayaknya dapat mendeterminasi kegunaan/manfaat dari program.

e. CSE-UCLA Evaluation Model

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. Yang pertama, yaitu CSE, merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari *University of Clifornia in Los Angeles*.

Ciri-ciri model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, inplementasi, hasil, dan dampak. Fernandes (1984) memberikan penjelasan tentang model tersebut menjadi empat tahap yaitu

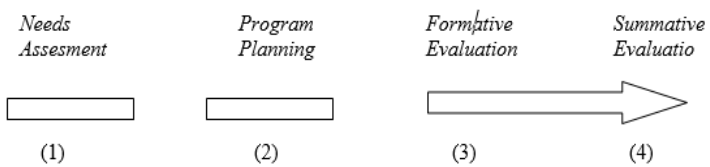

Gambar 4.2. Model Evaluasi CSE-UCLA

1) CSE model: need *assessment*

Evaluator memusatkan perhatian pada penentuan pertanyaan yang diajukan

a) Hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program?
b) Kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan pelaksana program ini?
c) Tujuan jangka panjang apakah yang dapat

dicapai melalui program ini?

2) CSE model: program *planning*

Tahap kedua dari CSE model ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap kesatu. Dalam tahap perencanaan ini program PMB di evaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah di susun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan.

3) CSE model: formatif *evaluation*

Tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program, karna harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembang program.

4) CSE model: summative *evaluation*

Tahap keempat, yaitu evaluasi sumatif, para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum,

dicari bagian mana yang belum dan penyebabnya.[166]

f. CIPP Evaluation Model

Stufflebeam (1969) & Shinkfield (1985) adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured)* untuk menolong administrator membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai "Suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan" (Stufflebeam, 1973). Dia membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu

1) *Contect evaluation to serve planning decision.* Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program;
2) Input *evaluation, structuring decision.* Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang

[166]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 44-45.

diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya;

3) *Process evaluation, to serve implementing decision.* Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki;

4) *Product evaluation, to serve recycling decision.* Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? Huruf pertama dari konteks evaluasi dijadikan ringkasan CIPP, model ini terkenal dengan nama model CIPP oleh Stufflebeam.[167]

Model evaluasi CIPP ini dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian sebuah kebijakan yang sedang berjalan dan pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan efektivitas implentasi suatu program.

[167]Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, h.14.

g. Discrepancy Model

Kata *Discrepancy* adalah istilah bahasa Inggris, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi "kesenjangan". Model yang dikembangkan oleh *Malcolm Provus* ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada disetiap komponen.[168]

Dari model yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa model yang menunjuk pada langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi, sebagian penekanan atau objek sasaran, dan ada yang sekaligus menunjukkan sasaran dan langkah atau pentahapan. Khusus untuk model yang dikembangkan oleh *Malcolm Provus*, menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai.

[168]Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, h. 48.

h. Evaluasi model Kirkpatrick

Kirkpatrick salah seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Kirkpatrick *Four Levels Evaluation Model*. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan (*training*) menurut Kirkpatrick (1998) dalam Eko Putro Widoko (2010) mencakup empat level evaluasi, yaitu: level 1 *reaction*, level 2 *learning*, level 3 *behavior*, dan level 4 *result.*[169]

Model evaluasi ini menekankan pada efektivitas suatu program yang mencakup 4 (empat) tingkat evaluasi yaitu; level *reaction*, level *training*, level *behaviour*, dan level *result*. Evaluasi pada level reaksi (*reaction evaluation*) adalah untuk mengetahui bagaimana respons atau reaksi para peserta terhadap aktivitas diklat/program tersebut seperti tingkat kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Apabila respons atau reaksinya adalah memuaskan, maka mereka akan termotivasi terhadap aktivitas diklat/program tersebut atau sebaliknya. Evaluasi level *training* (*training evaluation*).

[169]Misykat Malik Ibrahim, *Evaluasi Program Bidang Pendidikan*, h. 59

Pada level evaluasi perilaku (*behavior evaluation*) ini, yang terpenting adalah mengukur bagaimana perubahan perilaku itu bermanfaat dan dapat diimplementasikan di tempat kerja sehari-hari. Evaluasi Hasil (*result evaluation*) merupakan evaluasi dari seluruh proses yang akan terlihat pada dampak, apakah terjadi peningkatan dampak atau tidak dari seluruh kegiatan program tersebut.

Dibandingkan dengan model evaluasi yang lain, model ini memiliki beberapa kelebihan yaitu: 1) lebih komprehensif, karena mencakup *had skill* dan *soft skill*. 2) objek evaluasi tidak hanya hasil belajar semata tapi juga mencakup proses, *output* dan *outcomes.* 3) mudah untuk diterapkan. Selain kelebihan tersebut model ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 1) kurang memperhatikan Input. 2) untuk mengukur *impact* sulit dilakukan karena selain sulit tolak ukurnya juga sudah di luar jangkauan guru maupun sekolah.

4. Pelaksanaan Kegiatan Mutu Pendidikan Tinggi
   a. Pengertian mutu pendidikan

   Secara istilah mutu adalah "kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan."[170] Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran

[170]M.N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 15.

yang dihasilkan. Dalam sekolah mutu, standar mutu ditetapkan untuk setiap rangkaian kerja di dalam keseluruhan proses kerja, bila pekerja mencapai standar mutu untuk masing-masing rangkaian kerja, hasil akhirnya adalah sebuah produk bermutu. Saat membicarakan perbaikan mutu pendidikan, sering kali yang dibicarakan adalah perbaikan peringkat kenaikan kelas atau nilai rapor. Dalam sekolah yang bertepi seperti itu, tanggung jawab perbaikan mutu pendidikan lebih banyak ada pada guru. Secara umum para guru terfokus hanya pada aspek pendidikan seorang siswa: membantu siswa belajar dan mendapatkan pengetahuan. Bila mutu dimulai sebagai proyek terisolasi di sekolah atau ruang kelas, dan hal tersebut hampir mempengaruhi keseluruhan mutu pendidikan.[171]

Penjaminan mutu (*Quality Assurance/QA*) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum

[171]Jerome S Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 75-76.

pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *stakeholders*. Penjaminan mutu memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk desain kegiatan proses perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dan kedua, dalam bentuk budaya mutu (*quality culture*) yang mengandung tata nilai (*values*) yang menjadi keyakinan *stakeholders* pendidikan dan prinsip atau asas-asas yang dianutnya. Dengan demikian penjaminan mutu sebagai suatu sistem mengandung tata nilai dan asas dalam proses perubahan, perbaikan, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.[172]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

[172]*Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, h. 2.*

b. Dasar dan prinsip peningkatan mutu pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan bagi sebuah lembaga pendidikan saat ini merupakan prioritas utama. Hal ini bagian terpenting dalam membangun pendidikan yang berkelanjutan. Menurut Hensler dan brunell dalam Husaini Usman, ada empat prinsip utama dalam manajemen mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip pelanggan

Mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan.

2) Respek terhadap setiap orang

Setiap orang di lembaga pendidikan dipandang memiliki potensi.

3) Manajemen berdasarkan fakta

Pendidikan berorientasi pada fakta, maksudnya setiap keputusan selalu didasarkan pada fakta, bukan pada perasaan (*feeling*) atau ingatan semata.

4) Perbaikan terus-menerus

Agar dapat sukses setiap lembaga pendidikan perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan.[173]

[173]Husaini Usman, *Manajeman Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan* (Jakart: Bumi

Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut.

5) Komitmen pada perubahan

Pemimpin atau kelompok yang ingin menerapkan program mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Pada intinya, peningkatan mutu adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berbobot. Lazimnya, perubahan tersebut menimbulkan rasa takut, sedangkan komitmen dapat menghilangkan rasa takut.

6) Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada

Banyak kegagalan dalam melaksanakan perubahan karena melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu jelas.

7) Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan

Hendaknya, perubahan yang akan dilakukan berdasarkan visi tentang perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

8) Pada awalnya, visi tersebut hanya dimiliki oleh pimpinan atau seorang inovator, kemudian dikenalkan kepada orang-orang yang akan terlibat dalam perubahan tersebut. Visi dapat menjadi

---

Aksara, 2011), h. 572-573.

pedoman yang akan membimbing tim dalam perjalanan pelaksanaan program mutu.

9) Mempunyai rencana yang jelas

Mengacu pada visi, sebuah tim menyusun rencana dengan jelas. Rencana menjadi pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu. Pelaksanaan program mutu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal ataupun eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut akan selalu berubah. Rencana harus selalu di *updated* sesuai dengan perubahan-perubahan. Tidak ada program mutu yang terhenti (stagnan) dan tidak ada dua program yang identik karena program mutu selalu berdasarkan dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Program mutu merefleksikan lingkungan pendidikan di manapun ia berada.[174]

c. Penerapan penjaminan mutu perguruan tinggi

Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Sedangkan pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara transparan

[174]Nana Syaodih, dkk. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, h. 9.

untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*akuntabilitas publik*).

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, selanjutnya disingkat SPM Dikti, merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.[175]

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

---

[175]Republik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, h. 2.

Mengenai mutu pendidikan dijelaskan "Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia".[176] Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana. Dapat dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.[177]

Pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015, Bab II Bagian Kesatu, Pasal 4 ayat (1) Standar terdiri atas: 1. Standar kompetensi lulusan; 2. Standar isi pembelajaran; 3. Standar proses pembelajaran; 4. Standar penilaian pembelajaran; 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan 8. Standar pembiayaan pembelajaran.[178]

---

[176]Repuplik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pasal 1 ayat 1 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 2.

[177]Repuplik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pasal 2 ayat 1 Tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 7.

[178]Repuplik Indonesia, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 6.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 62 Tahun 2016 adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. SN DIKTI merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing standar nasional pendidikan

1) Standar kompetensi lulusan

   Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran,

dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.[179]

2) Standar isi pembelajaran

Standar isi yang dimaksud adalah berdasarkan Standar Nasional Dikti Nomor 44 pasal 8 Tahun 2015, yaitu

a) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
c) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

[179]Repuplik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h.17.

Standar isi pendidikan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, serta kalender pendidikan. Berdasarkan acuan umum ini masing-masing perguruan tinggi mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya.

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

3) Standar proses pembelajaran

Standar proses yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.[180] Proses pendidikan di sekolah menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 meliputi empat hal yaitu: setiap

[180]*Niki Sae dan Macintosh Setting*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 12.

satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.[181]

Standar proses pembelajaran yang dimaksud adalah

a) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
b) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   (1) Karakteristik proses pembelajaran;
   (2) Perencanaan proses pembelajaran;
   (3) Pelaksanaan proses pembelajaran;
   (4) Beban belajar mahasiswa.[182]

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya

[181]*Niki Sae dan Macintosh Setting*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 23.

[182]Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 11-15.

tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dalam Pasal 39 ayat 1 menjelaskan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan dimaksud adalah kepala sekolah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran yang efektif.

4) Standar penilaian

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.[183] Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang mahasiswa telah

[183]Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 10, tentang Standar Penilaian Pembelajaran, h. 6.

mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

Elemen Standar Penilaian Pembelajaran terdiri dari

a) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
b) Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
c) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran;
d) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah;
e) Kelulusan Mahasiswa.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian pendidikan dibagi menjadi lima bagian, yaitu: (a) penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; (b) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (c) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; (d) penilaian hasil belajar oleh pemerintah; dan

(e) kelulusan.

5) Standar pendidik

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik yang dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, berikut penjabarannya

a) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik

paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;

b) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;

c) Dosen program Diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;

d) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;

e) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan

dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;

f) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;

g) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;

h) Dosen program doktor dan program doktor terapan. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan

berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dan dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.[184]

Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input proses *output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

[184]Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 25-27.

Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

6) Standar pengelolaan pembelajaran

Standar pengelolaan adalah standar nasional pengelolaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Standar pengelolaan pembelajaran adalah

1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

pembelajaran pada tingkat program studi;

2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
3) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi;
4) Unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
   (1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
   (2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
   (3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
   (4) Melakukan kegiatan pemantauan dan

evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

(5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

a) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh *civitas* akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
b) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi

perguruan tinggi;

d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;

e) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan

f) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.[185]

7) Standar pembiayaan

Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Untuk komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan alokasi dana dengan penuh perhitungan pengawasan penggunaan dana, baik untuk keperluan maupun keperluan investasi disertai dengan bukti-bukti fisik dengan besarnya dana yang dikeluarkan.[186]

---

[185]Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2015, Pasal 38, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, h. 34.

[186]Barnawi dan M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, h. 47.*

Besarnya dana yang dikeluarkan pendidikan atau pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan personal.[187] Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan\dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk pembiayaan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara berkelanjutan. Biaya operasional pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

---

[187]*Nike Sae dan Macintosh Setting*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai Pendidikan, h. 34.

8) Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual digambarkan dalam diagram sebagai berikut

a) Landasan Religius

Al-Qur'an dan Hadis

b) Landasan Yuridis Formal

a. UU RI No. 20 Tahun. 2003 Tentang Sisdiknas;
b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosan;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Bab II, Pasal 2 Tentang Standar Nasional Pendidikan tahun 2005;
d. Permen Mendikbud No. 49 Tahun 2015 Tentang SNP;
e. Peraturan Menristekdikti, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c) Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Pedoman SPMI Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Aisyiyah.

d) Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar.

e) Manajemen Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar.

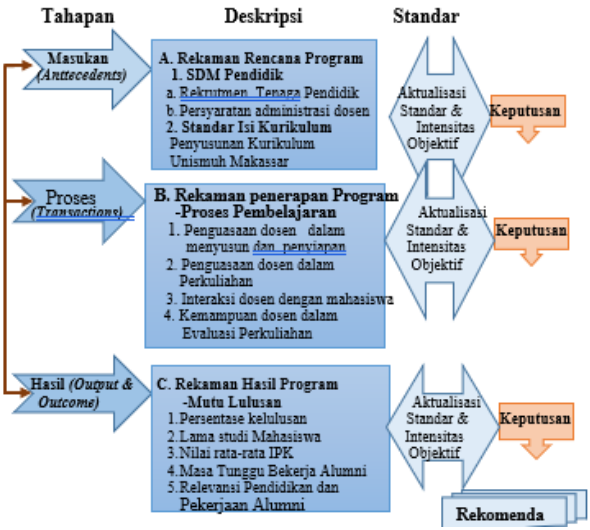

Gambar 4.3 Kerangka Konseptual

C. Metodologi

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

   a. Jenis penelitian

   Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi dengan menggunakan jenis penelitian kombinasi (*mixed methods*). Menurut Johnson dan Cristensen dalam Sugiyono, memberikan definisi tentang metode penelitian kombinasi (*Mixed Methods*) sebagai berikut: "*Research that involve the mixing of quantitative and qualitative approach*.

(Penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif)".[188]

Penelitian kombinasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *sequential exploratory design* di mana model ini pada tahap awal dilakukan pengumpulan data kuantitatif selanjutnya dilengkapi dengan analisis data kualitatif. Kombinasi data kedua bersifat *connecting* (menyambung) hasil penelitian tahap pertama (hasil penelitian kuantitatif) dan tahab berikutnya (hasil penelitian kualitatif).

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar yang terletak di Jalan Sultan Alauddin No. 259 Kota Makassar. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain biaya, waktu, tenaga yang dimiliki oleh peneliti, serta letaknya yang begitu strategis dan mudah dijangkau peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan sesuai kebutuhan yang diteliti.

---

[188]Sugiyono, *Metode Peneltian Kombinasi* (*Mixed Methoods*), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 404.

b. Pendekatan Penelitian

Setiap pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, akibatnya, suatu pendekatan bisa sangat menjelaskan suatu fenomena dibandingkan pendekatan lainnya, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap pendekatan memiliki perbedaan pada penekanan atau fokus pada satu atau beberapa aspek saja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus observasi. Hal tersebut mengutamakan teknik pengumpulan datanya melalui observasi peran serta atau pelibatan (*participant observation*), sedangkan fokus studinya pada suatu organisasi. Bagian-bagian organisasi yang menjadi fokus studinya antara lain: (a) suatu tempat; (b) satu kelompok; dan (c) kegiatan organisasi.

c. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah tergolong *field research*, maka data yang diperlukan tidak hanya berasal dari lapangan, melainkan juga diperlukan data tertulis (*library research*) untuk mendukung data yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian, maka sumber data dari penelitian ini adalah

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan lembar observasi terhadap evaluasi program pelaksanaan penjaminan mutu di Unismuh Makassar. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara langsung dan mengedarkan lembar observasi dengan pihak–pihak yang dianggap kompeten dan mengetahui permasalahan yang diteliti;
b. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian dokumen, buku, majalah, dan referensi lain yang dianggap relevan.

Melalui sumber ini, peneliti mencari dan menelusuri bahan-bahan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang dibahas yang mencakup

pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen serta informasi lain dari berbagai media tertulis yang meliputi pelaksanaan penjaminan mutu di Unismuh Makassar.

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk membantu peneliti melaksanakan fungsinya sebagai instrumen utama penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data meliputi

a. Observasi (Pengamatan),
b. Wawancara,
c. Studi Dokumentasi.

e. Instrumen Penelitian

Evaluasi program pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan instrumen yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu: masukan, proses, dan hasil.

1) Instrumen masukan

Instrumen masukan (*antecedents*) terdiri dari analisis dokumen, lembar observasi, dan wawancara. Pertama, wawancara, dan penelusuran dokumen tentang pemenuhan SDM pendidik melalui rekrutmen tenaga pendidik dan persyaratan administrasi dosen Universitas Muhammadiyah

Makassar. Kedua, lembar observasi, penelusuran dokumen, dan wawancara tentang standar isi pembelajaran dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

2) Instrumen proses

Instrumen pada tahapan proses merupakan rekaman proses aktual yang terdiri dari: lembar berkaitan dan wawancara proses pembelajaran.

Pertama, Lembar observasi yang digunakan untuk menilai proses kegiatan pembelajaran di kampus. Observer bertugas mengawasi dan mengamati proses penelitian sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan dan dituangkan pada lembar observasi yang telah disediakan peneliti. Menggunakan instrumen lembar observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya format atau blangko pengamatan sebagai instrumen dan mengadakan penilaian dengan skala bertingkat.[189] Kaitannya dengan ini, di susun instrumen lembar observasi dengan ceklis untuk memudahkan

[189]Suahrsimi Arikunto, *Presedur Penelitian: suatu pendekatan praktik* (Rineka cipta 2001), h. 204.

pengambilan data dari responden atau observer. Pilihan jawaban ceklis menggunakan skala 4 (empat) yang yaitu; (1) tidak pernah, (2) sebagian kecil, (3) setengahnya, dan (4) sebagian besar. Untuk observasi menggunakan 4 (empat) yang merentang dari tingkat rendah hingga tinggi. Selanjutnya dasar pertimbangan peneliti atas hasil penilaian dalam tiga pilihan 1 sampai 2 berarti rendah, 2.01-3 berarti sedang, dan 3,01-4 berarti tinggi.

Hasil dari observasi yang dilakukan oleh observer (Ketua Prodi) kemudian peneliti menganalisis secara deskriptif selanjutnya disesuaikan dengan kriteria/ standar objektif yang telah ditetapkan. Kedua, wawancara baku terbuka dengan Pimpinan Universitas, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unismuh Makassar, dan Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas.

3) Instrumen Hasil

Untuk mengungkap efektivitas hasil (*output* dan *outcomes*) evaluasi pelaksanaan program penjaminan mutu digunakan analisis dokumen dan wawancara. Analisis dokumen yang dimaksud yaitu: a) lama studi; b) predikat kelulusan berdasarkan IPK; c) masa tunggu kerja alumni; dan relevansi pendidikan dan pekerjaan alumni.

f. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut model Stake, yaitu dengan membandingkan data hasil yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti mendeskripsikan kondisi, aktivitas dengan deskripsi data secara kuantitatif.

Hasil penelaahan data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar pelaksanaan penilaian. Data yang diperoleh dari tahap deskripsi pada tahap evaluasi masukan, proses maupun hasil kemudian dibandingkan dengan kriteria/standar objektif yang telah ditetapkan. Selanjutnya peneliti melakukan *judgment* atas perbandingan data deskripsi dengan standar yang ada untuk menghasilkan keputusan. Keputusan tersebut berupa skor empiris. Skor empiris dari masing-masing responden dikelompokkan menurut standar untuk dihitung rata-rata skor/nilainya. Selanjutnya akan dirata-rata nilainya. Nilai/skor digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui pemberian rata-rata nilai dengan kriteria tertentu. Tujuan penggunaan rata-rata nilai dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat ketercapaian pelaksanaan atau untuk membuat keputusan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, lembar observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian evaluasi ini dianalisis menurut jenis data dan teknis analisis yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagian data dalam penelitian digunakan analisis secara kualitatif.

Data-data berupa dokumen hasil dokumentasi, wawancara dan data pendukung lain seperti dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Tinggi standar nasional, laporan penerapan penjaminan mutu lembaga pendidikan, laporan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan evaluasi pada masing-masing unit yang dianalisis secara kualitatif.

Analisis data kualitatif dilakukan secara langsung dan bertahap mengikuti prosedur yang dikemukakan Miles dan Huberman yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).[190]Langkah-langkah yang dilakukan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

[190]*Miles dan Huberman, Qualitative Data Analysis terjemahan Tjetjep R. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), h. 16-20.*

Reduksi data dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul dan kemudian memilih data yang relevan dan bermakna untuk disajikan. Data yang relevan dan bermakna, memfokuskan pada persoalan untuk memecahkan masalah, penemuan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian menyederhanakan, menyusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang penting tentang hasil, temuan serta maknanya.

b. Penyajian (*display)* data

Penyajian (*display*) data adalah upaya mengorganisasikan data dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram, dan lain sejenisnya. Pada langkah ini, data di susun berdasarkan relevansinya sehingga menjadi informasi yang memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi

Berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Penyimpulan data adalah mengambil intisari dari

setiap bentuk penyajian data ke dalam bentuk pernyataan yang mengandung makna lebih luas. Kesimpulan awal perlu didukung oleh bukti kuat pada tahap analisis data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi pada saat kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

g. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan hasil penelitian adalah cara-cara memperoleh tingkat kepercayaan dari hasil penelitian, Moleong menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan sembilan langkah yaitu: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian kunci, audit, dan audit kepastian. Karena data atau informasi merupakan bahan pokok dalam penelitian, oleh karenanya kredibilitas atau keabsahannya perlu diperiksa agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh kredibilitas data yang tinggi diperlukan pengujian keabsahan data yang dilakukan melalui triangulasi data. Menurut Arikunto triangulasi dapat meningkatkan kredibilitas hasil yang diperoleh, dengan membandingkan sebuah data dengan data yang diperoleh dari sumber lain untuk mempertajam analisis terhadap hubungan sejumlah data.[191] Dalam upaya untuk memperoleh tingkat kepercayaan atas data dan informasi yang diperoleh dilakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan dua teknik triangulasi yaitu: (1) triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang sama yang diperoleh melalui metode yang berbeda; dan (2) triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data yang sama yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Analisis data diarahkan untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang karakteristik dari setiap aspek yang di evaluasi. Hasil analisis data kemudian diuraikan dalam bentuk

---

[191]Suharsimi Arikuton, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 167.

paparan naratif sehingga diperoleh temuan dan yang dapat memperkaya data kualitatif.

Justifikasi hasil evaluasi untuk setiap komponen dan aspek yang di evaluasi ditetapkan dalam tiga kategori yaitu terpenuhi, kurang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Proses untuk mendapatkan justifikasi tersebut dilakukan melalui perbandingan antara kondisi objektif yang ditemukan di lapangan dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan pada perancangan aktivitas penjaminan mutu perbandingan tersebut dijadikan acuan untuk menetapkan kesimpulan hasil evaluasi dari setiap komponen dan aspek yang di evaluasi.

D. Evaluasi Program Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

   1) Sejarah singkat universitas muhammadiyah makassar

      Gambaran umum tentang Universitas Muhammadiyah Makassar dapat diawali dengan melihat secara singkat sejarah berdirinya. Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian

Perguruan Tinggi ini adalah sebagai realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng.

Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, lewat surat Nomor: E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/ 12 Juli 1963 M. kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaris R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaris Nomor: 71 tanggal 19 Juni 1963. Unismuh Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.[192]

Pada awal berdirinya perguruan tinggi ini, membuka dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (menggunakan kurikulum yang sama dengan IKIP Makassar) dan Fakultas Tarbiyah (menggunakan kurikulum yang sama dengan IAIN Alauddin Makassar). Kedua fakultas yang ada terus dikembangkan yaitu dengan membuka cabang di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Cabang untuk FKIP berada di Kabupaten Bone, Bulukumba, Sidrap, Enrekang dan

[192]Profil Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2017, h. 2.

Parepare. Semua cabang tersebut saat ini telah berdiri sendiri sebagai Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), kecuali Parepare yang telah berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). Sementara untuk cabang Fakultas Tarbiyah yang dibuka di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Enrekang, Maros dan Pangkep telah berdiri sendiri, Unismuh Makassar saat ini berkonsentrasi melaksanakan pendidikan di Makassar.[193]

Berdasar pada kondisi kekinian dan Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi, yang diarahkan pada peningkatan daya saing bangsa, dengan dilandasi otonomi penyelenggaraan pendidikan dan organisasi yang sehat menuju peningkatan kinerja, maka visi-misi Unismuh Makassar sangat relevan dengan amanah dan cita-cita Muhammadiyah.

2) Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar

Adapun yang menjadi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu

[193]Profil Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2017, h. 4.

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri pada Tahun 2024.

b. Misi

Misi Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu

a) Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan;
b) Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan;
c) Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul, dan berdaya saing;
d) Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuah;
e) Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan *civitas* akademika, alumni, dan masyarakat

c. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu

a) Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri.

b) Meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan
c) Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian
d) Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah
e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.[194]

3) Kebijakan Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar

Adapun kebijakan strategi Unismuh Makassar sebagai berikut

a. Peningkatan *akhlaqul karimah* (pendidikan karakter) dengan pengembangan kehidupan kampus yang islami yang ditandai dengan sikap, pandangan, tata kehidupan masyarakat kampus;
b. Peningkatan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan terprogram melalui pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan;

[194]Profil Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2017, h. 5-6.

c. Peningkatan kualitas Catur Darma melalui penguatan lembaga penjaminan mutu dengan mekanisme PDCA (*Plan, Do, Chek, and Action*);
d. Mengoptimalkan pelaksanaan catur dharma sebagai pencitraan akademik dan ciri khas perguruan Tinggi Muhammadiyah;
e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi Sistem Informasi yang menunjang pengembangan perguruan tinggi, dan pengendalian mutu;
f. Membangun Kerja sama internal dan eksternal dengan PT dan stakeholder.

Strategi program yang menjadi rancangan Unismuh Makassar sebagai berikut

1) Meningkatkan kualitas produk Unismuh Makassar yang meliputi: lulusan, penelitian, pengabdian masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui peningkatan mutu proses pembelajaran, mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermuara pada produk yang berkualitas dan berintegritas dengan memperkokoh karakter melalui pendidikan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) serta peningkatan sistem penjaminan mutu baik SPMI oleh LPM (QA) maupun sistem penjaminan mutu

Eksternal oleh Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, BAN-PT, Kopertis Wilayah IX, Kemenristek Dikti, Lembaga Akreditasi lainnya di level Regional, Nasional, dan internasional.

2) Meningkatkan kualitas sumber daya yang meliputi: dosen, karyawan, sarana prasarana yang mendukung peningkatan seluruh produk Unismuh Makassar melalui peningkatan derajat pendidikan tinggi, kepangkatan dan jabatan fungsional tertinggi, sertifikasi dosen, peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, seni, skill serta kesejahteraannya. Begitupun peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pembelajaran di kelas maupun di laboratorium yang mendukung peningkatan kualitas seluruh produk Unismuh.
3) Peningkatan dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni melalui pembinaan bakat, minat, penalaran wawasan dan prestasi mahasiswa tertinggi serta kesejahteraan melalui beasiswa dari pemerintah maupun swasta.
4) Pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan melalui peningkatan kajian, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah.

5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama antar institusi, baik dalam maupun luar negeri yang mendukung peningkatan kualitas seluruh produk Unismuh dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengamalan ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan sunnah.

Perencanaan pengembangan SDM Unismuh Makassar dilakukan secara sistematis dan terencana secara jangka pendek dengan periode tahunan. Pengembangan wawasan dan keterampilan akademik dosen merupakan penguatan budaya organisasi yang diorentasikan Unismuh Makassar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rektor Unismuh Makassar sebagai berikut

1) *Integrity*

Integritas (*integrity*) yang dimaksud adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi yang menjadi gambaran keseluruhan pribadi anggota organisasi.

2) Profesional

Profesional yang dimaksud adalah semua pegawai dan dosen Unismuh Makassar memiliki kemampuan yang tinggi, keterampilan, dan keahlian dalam menjalankan profesi/pekerjaan sesuai dengan keahliannya.

3) *Entrepreneurship*

Entrepreneurship yang dimaksud adalah sesuatu yang ada dalam diri yang memberikan dorongan semangat dan membuat selalu bergerak ke depan, ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Inilah inti sari e*ntrepreneurship* yaitu melakukan inovasi terus menerus, mandiri, visioner, kreatif, realistis, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan mandiri.[195]

4) Fakultas dan program studi Universitas Muhammadiyah Makassar

Adapun Fakultas dan Program studi/jurusan yang bina Universitas Muhammadiyah Makassar. Fakultas berjumlah 7 dan Program studi berjumlah 32.

[195]Rahman Rahim (55 tahun), Rektor Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 20 Maret 2017.

5) Pelaksanaan manajemen mutu universitas muhammadiyah makassar

Sistem manajemen mutu Unismuh Makassar diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai yang dianut. Manajemen mutu yang dimaksud berorientasi pada model/konsep manajemen modern yaitu Manajemen Mutu Menyeluruh (*Total Quality Management)* dan biasa juga disebut Manajemen Mutu Terpadu (MMT)

Unismuh Makassar menggunakan model manajemen mutu menyeluruh (total *quality management*) atau biasa juga disebut Manajemen Mutu Terpadu (MMT). Manajemen mutu menyeluruh adalah suatu konsep atau model manajemen yang sangat populer dalam dunia industri dan bisnis pada masa kini. Manajemen mutu terpadu dapat disebut sebagai seperangkat filsafat, di mana sistem manajemen ini dapat mengarahkan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, untuk menjamin kepuasan pelanggan dan memaksimalkan nilai *stakeholders.* Berdasarkan rumusan tersebut, maka manajemen mutu akademik Unismuh Makassar dipahami sebagai berikut, yaitu: "pengelolaan atas seluruh kegiatan akademik beserta seluruh sumber daya dan aset yang ada secara efisien, yang ditujukan

untuk menjamin kepuasan pelanggan dan meningkatkan nilai yang dimiliki oleh pemangku kepentingan". Berdasarkan pengertian tersebut maka ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen mutu akademik, yaitu sifatnya yang "menyeluruh" (total) dan "efisien" *(efficient),* dengan tujuan untuk "kepuasan pelanggan" *(customer satisfaction)* dan "maksimalisasi nilai pemangku kepentingan" *(maximize stakeholder value).* Di samping itu, dalam pengelolaan manajemen mutu akademik perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip penyempurnaan secara berkelanjutan *(continuous improvement),* pengelolaan berdasarkan fakta *(managing with facts),* dan penghargaan terhadap orang lain *(respect for people)*.[196]

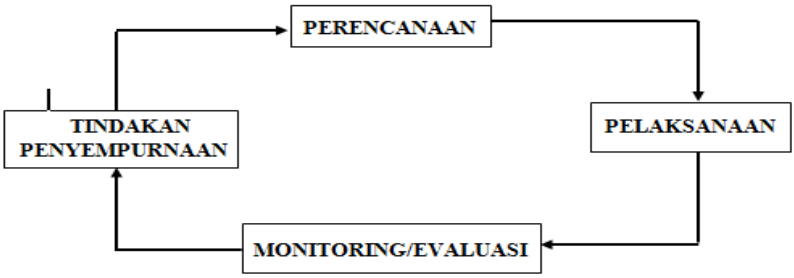

Gambar 4.4: *Roda Deming*[197]

[196]Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2010, h. 2.

[197]Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2010, h. 3-4.

Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas menyelenggarakan fungsi: mengoordinasi, melaksanakan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan pengembangan profesi serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas memiliki tugas pokok mengkaji sistem mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kemahasiswaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)) Universitas bekerja sama dengan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi.

2. Realitas Pemenuhan SDM Pendidik pada Tahapan Masukan (*Antecedents*) di Universitas Muhammadiyah Makassar

   Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan di tiap Universitas merupakan kebutuhan utama bagi pengembangan kelembagaan. Pemenuhan tersebut akan memberikan masukan positif bagi stabilitas

pengelolaan institusi. Realitas pemenuhan SDM pendidikan pada tahap masukan di Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dilihat pada alur skema evaluasi masukan sebagai berikut

Tahapan Deskripsi Standar

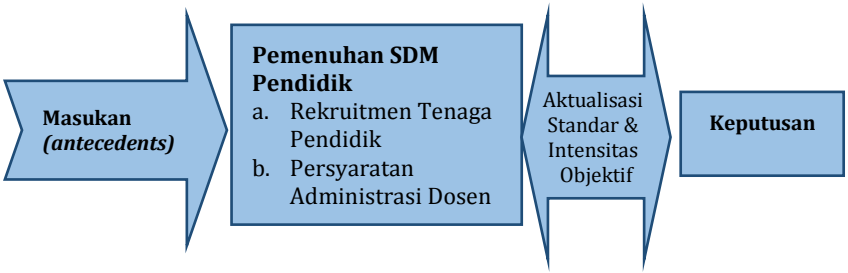

Gambar 4.5. Skema Evaluasi Masukan

Skema pada gambar 7 tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Masukan *(antecedents)* berorientasi pada suatu program yang dapat dicapai dan apa yang diinginkan, sub-sub komponen yang menjadi fokus dalam mengevaluasi tahapan masukan program pemenuhan SDM meliputi: 1) sistem rekrutmen tenaga pendidik dan 2) persyaratan administrasi dosen. Lebih rinci tentang pelaksanaannya di Universitas Muhammadiyah Makassar diuraikan sebagai berikut.

a. Rekrutmen tenaga pendidik

   Sistem penerimaan dosen mengandung pengertian adanya mekanisme penerimaan dosen yang terstruktur dan terarah yang merupakan salah satu prasyarat yang diselenggarakan pihak universitas.

Penerimaan dosen baru melalui seleksi diharapkan akan mendapatkan dosen yang berkualitas guna mendukung visi, misi, dan tujuan Unismuh Makassar.

Kriteria atau patokan standar objektif yang dijadikan rujukan dalam penerimaan calon dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu: 1) penerimaan calon dosen baru berdasarkan dokumen formal yang dimiliki Unismuh Makassar, 2) Penerimaan dosen dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas, 3) Penerimaan dosen disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia di masing-masing fakultas atau program studi, 4) Calon dosen mengikuti seluruh rangkaian tes Kompetensi (tes tertulis, tes keterampilan, dan tes wawancara), 5) dosen yang dinyatakan lulus/diterima semuanya memenuhi syarat yang telah ditentukan, dan 6) dosen yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan perolehan skoring tertinggi (urutan peringkat skor).

Kriteria standar tersebut di atas merupakan ukuran atau patokan standar objektif. Selanjutnya hasil evaluasi atau intensitas objektif dari lapangan dibandingkan dengan standar objektif yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan keputusan aktualitas pada setiap tahapan evaluasi atau aspek dilakukan dengan cara pengukuran pada setiap fokus

evaluasi, kemudian dibandingkan dengan intensitas objektif yaitu berupa hasil rekaman nyata dilapangan.

Hasil evaluasi dari 32 Ketua Program Studi berkaitan dengan sistem rekrutmen tenaga pendidik dengan menggunakan lembar observasi. Hasil jawaban observer dapat dilihat pada tabel tabulasi skor berikut

Tabel. 4.2 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Sistem Rekrutmen Tenaga Pendidik di Unismuh Makassar

No	Standar Objektif	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
1	Penerimaan calon dosen baru berdasarkan dokumen formal yang dimiliki Unismuh Makassar	0	5	5	22	32	113	3.53	T
2	Penerimaan dosen dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas	0	6	10	16	32	106	3.31	T
3	Penerimaan dosen disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia di masing-masing fakultas	0	0	27	5	32	101	3.15	T

No	Standar Objektif	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
	atau program studi								
4	Calon dosen mengikuti seluruh rangkaian tes Kompetensi (tes tertulis, tes keterampilan, dan tes wawancara)	0	0	5	27	32	123	3.84	T
5	Dosen yang dinyatakan lulus/diterima semuanya memenuhi syarat yang telah ditentukan	0	0	16	16	32	112	3.5	T
6	Dosen yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan perolehan skoring tertinggi (urutan peringkat skor)	0	0	7	26	32	125	3.9	T
	Jumlah	**0**	**11**	**70**	**112**		**680**	**3.5**	**T**

Keterangan: T= Tinggi (3,01-4), S= Sedang (2,01-3), dan R= Rendah (1-2)

Hasil analisis data instrumen observasi dari tabel di atas berkaitan sistem rekrutmen tenaga pendidik menunjukkan dengan capaian semua sub aspek yang di evaluasi berkategori tinggi atau berada pada nilai rata-rata 3,50 dari 6 sub-aspek yang di evaluasi.

Untuk memperoleh kredibilitas data yang tinggi berkaitan dengan sistem rekrutmen tenaga pendidik yang diperoleh lewat lembar observasi yang dilakukan oleh observer maka diperlukan pengujian keabsahan data lebih lanjut melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk mempertajam analisis terhadap hubungan sejumlah data.

Sistem penerimaan dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki dokumen formal tentang sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), terdiri dari: perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, remunerasi dan sanksi. Semua sistem tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berbasis pada keadilan serta kesejahteraan SDM di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengangkatan dosen baru Universitas Muhammadiyah Makassar berdasar Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 2012.[198] Dalam implementasinya, telah memiliki SOP yang mengatur sistem dan fungsi operatif manajemen SDM, meliputi: perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi, dan penempatan tenaga kependidikan, pengembangan karier, remunerasi, penghargaan dan sanksi. Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut adalah 1) rencana pengadaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan; 2) penerimaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan; 3) usul kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan; 4) penerbitan kenaikan pangkat; (5) penerbitan SK fungsional; 6) kenaikan gaji berkala; 7) pemberhentian tenaga dosen dan tenaga kependidikan; (8) perpindahan tenaga dosen dan tenaga kependidikan; 9) daftar urut kepangkatan; dan 10) tanda penghargaan/tanda jasa.

Adapun persyaratan standar minimal pelamar dosen yang perlu dipenuhi, yaitu

1) Warga Negara Indonesia (WNI);

---

[198]Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Bab IX, Pasal 27, Tahun 2012, h. 8.

2) Beragama Islam;
3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
4) Berusia:
   a) Minimal 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun pada tanggal 01 Juni 2016 bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S2; dan
   b) Maksimal 50 (Lima puluh) tahun pada tanggal 01 Juni 2016 bagi pelamar dengan kualifikasi Pendidikan S3.
5) Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba;
6) Tidak berkedudukan sebagai dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7) Bagi pegawai negeri/pegawai tetap lainnya, memperoleh ijin dari institusi masing-masing.[199]

Hasil penelusuran studi dokumen calon dosen yang mendaftar tahun 2017 diperoleh data bahwa dari 542 pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi atau lulus berkas setelah diverifikasi sebanyak 438 orang[200] untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya yang telah ditentukan oleh tim seleksi. Calon tenaga dosen yang lulus berkas

[199]Manul Prosedur Sistem Seleksi Penerimaan Dosen Persyarikan Sumber Daya Manusia (SDM) Unismuh Makassar, Tahun 2016, h. 2.
[200]Dokumen Berita Acara Penerimaan calon dosen persyarikatan Unismuh Makassar, 16 Agustus 2017.

selanjutnya akan mengikuti tes kompetensi dalam beberapa tahapan sebagaimana diungkapakan oleh Wakil Rektor I, yaitu

1) Tes akademik,
2) Tes Kemampuan IT,
3) Praktik *Micro Teaching*,
4) Wawancara oleh Ketua BPH, WR I, II, III dan IV,
5) Kemampuan membaca Al-Qur'an.[201]

Berkaitan kelulusan calon dosen tentunya yang menjadi dasar pertimbangan kelulusan adalah berdasarkan pada skoring tertinggi (kebutuhan berdasarkan urutan peringkat skor tertinggi) setelah mengikuti seluruh tahapan yang dilakukan oleh tim seleksi. Selain mempertimbangkan hasil skoring tes, tentunya yang terpenting yang menjadi prasyarat tambahan kelulusan adalah latar belakang pengabdian atau pengalaman mengajar minimal 2 tahun. Untuk mengetahui pengalaman sebelumnya bagi calon dosen dapat dilihat pada saat memasukkan berkas lamaran dan diperkuat pada saat tes wawancara.

[201]Rahim Nanda (55tahun), Wakil Rektor 1 Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 20 Maret 2017.

Setelah penentuan kelulusan dosen baru yang terpenting dilakukan oleh pihak Universitas adalah penempatan dosen sesuai kualifikasi keilmuan yang dimiliki dan berdasarkan kebutuhan fakultas/program studi. Penempatan dosen disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia di masing-masing fakultas atau program studi. Penempatan yang tepat merupakan cara untuk mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dosen untuk mendukung pembelajaran yang baik dan lulusan yang berkualitas. Hal ini merupakan bagian proses pengembangan dosen. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya memperhatikan prinsip efisiensi (kesesuaian antara keahlian yang dipersyaratkan dengan yang dimiliki dosen).

Berdasarkan kondisi objektif penerimaan dosen di atas jika memperhatikan kriteria atau standar objektif pemenuhan SDM pendidik melalui rekrutmen tenaga pendidik di mana sumber data yang didapat mulai dari lembar observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, maka keputusan hasil evaluasi pada tahapan masukan (*antecedents*) untuk aspek rekrutmen dosen baru sudah terpenuhi berdasarkan kriteria objektif.

Sumber daya manusia yang berkualitas pada umumnya lahir melalui proses pelatihan dan pengembangannya yang bermutu. Menyadari bahwa faktor dominan dalam kelangsungan kegiatan lembaga, institusi, organisasi atau perusahaan, maka perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan perhatian terhadap apa yang dibutuhkan.

b. Persyaratan administrasi dosen

Persyaratan administrasi dosen yang dapat menjadi standar objektif bagi keberhasilan perguruan tinggi adalah: 1) pendidikan minimal magister (S2), 2) mengajar sesuai latar belakang pendidikan, 3) memiliki NIDN, dan 4) memiliki pangkat akademik. Terpenuhinya standar objektif tersebut, tentunya dapat memberi pengaruh besar terhadap capaian visi dan misi institusi serta catur darma perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan penelusuran studi dokumen berkaitan persyaratan administrasi dosen dapat di gambarkan berikut ini

1) Jenjang pendidikan dosen

Pengembangan SDM dosen pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan tenaga pendidik sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga dapat

memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Dosen merupakan ilmwan dan pengajar profesional dengan tugas utama menyebarkan ilmu pengetahuan. Untuk itu, jenjang pendidikan dosen merupakan batasan minimal yang harus dipenuhi secara akademis. Hal ini dikarenakan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dalam bidang keilmuan tertentu. Secara umum jenjang pendidikan dosen yang telah dimiliki Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 4.3 Jenjang Pendidikan Dosen

No	Fakultas	Program Studi/Jurusan	Jumlah Dosen	Jenjang Pendidikan		
				S1	S2	S3
1	Fakultas Agama Islam	1. Pendidikan Agama Islam	30	0	24	6
		2. Pendidikan Bahasa Arab	9	0	6	3
		3. Hukum Ekonomi Syariah	11	0	8	3
		4. Ahwal Syaksiyah	9	0	7	2
		5. Komunikasi Penyiaran Islam	9	0	8	1
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1. Kurikulum & Teknologi Pendidikan	10	0	8	2
		2. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	41	0	30	1
		3. Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris	45	0	36	9

		4. Pendidikan Matematika	44	0	34	0
		5. Pendidikan Fisika	22	0	19	3
		6. Pendidikan sosiologi	24	0	19	5
		7. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	29	0	27	2
		8. Pendidikan Seni Rupa	8	0	6	2
		9. Pendidikan Kewarganegaraan	8	0	6	2
		10. Pendidikan Biologi	14	0	11	3
		11. Pendidikan Anak Usia Dini	8	0	8	0
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. Ilmu Administrasi Negara	34	0	25	9
		2. Ilmu Pemerintahan	17	0	8	9
		3. Ilmu Komunikasi	6	0	6	0
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1. Ekonomi Pembangunan	16	0	13	3
		2. Manajemen	37	1	26	0
		3. Akuntansi	32	1	28	3
		4. Perpajakan (D3)	7	0	7	0
		5. Ekonomi Islam	7	0	6	1
5	Fakultas Pertanian	1. Agribisnis	35	0	29	6
		2. Budidaya Perairan	13	0	10	3
		3. Manajemen Hutan	12	0	10	2
		4. Agroteknologi	6	0	3	3
6	Fakultas Teknik	1. Teknik Pengairan	22	0	20	2
		2. Teknik Elektro	25	1	21	3
		3. Teknik Arsitektur	17	1	14	2
7	Fakultas Kedokteran	1. Pendidikan Dokter	34	3	28	3
		2. Profesi Dokter	24	0	20	4
	Jumlah		**665**	**7**	**531**	**127**
	Persentasi		**100**	**1,05**	**79,85**	**19,09**

Sumber Data: Dokumen Penjaminan Mutu Unismuh Makassar, tahun 2017

Gambaran jenjang pendidikan dosen dapat pula dilihat pada diagram batang berikut ini

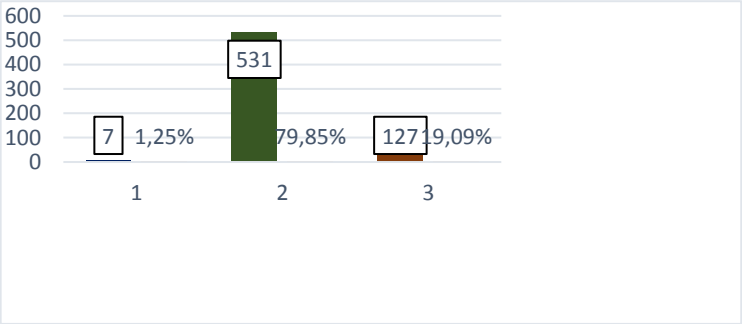

Gambar. 4.6 Diagram Jenjang Pendidikan Dosen Unismuh Makassar

Uraian pada tabel dan diagram tersebut di atas menunjukkan jenjang pendidikan dosen yang sudah dimiliki Unismuh Makassar dari jumlah dosen tetap sebanyak 665 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 7 atau 1,25% dosen memiliki kualifikasi jenjang pendidikan S1, 531 atau 79,85% dosen memiliki kualifikasi jenjang pendidikan S2, dan 127 atau (19,09%) dosen memiliki kualifikasi jenjang pendidikan S3.

Berdasarkan data tersebut di atas berkaitan dengan jenjang pendidikan dosen maka dapat disimpulkan bahwa dosen yang sudah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi dosen sebanyak 658 orang atau 98.75%. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan

lewat wawancara dengan Ketua Unit Penjaminan Mutu Universitas mengungkapkan bahwa dosen yang masih berpendidikan sarjana (S1) merupakan alumni terbaik di tingkat universitas yang diangkat langsung menjadi dosen tetap. Dosen tersebut sementara melanjutkan pendidikan magister (S2) dengan besiswa *full* yang diberikan oleh pihak universitas.

Berkaitan gambaran dokumen pendidikan dosen melalui tabel tersebut di atas, dapat pula digambarkan lewat hasil wawancara dengan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas.

Hasil wawancara dengan Abd. Samat T, mengungkapkan bahwa: dapat diakui khususnya di fakultas kami masih lebih banyak dosen yang berstatus magister (S2) dibanding dengan yang sudah doktor (S3). Minat dosen untuk melanjutkan pendidikan sebenarnya cukup tinggi namun memiliki keterbatasan dari segi biaya. Pihak universitas belum sepenuhnya menyediakan biaya studi lanjut begitu pula biaya penelitian dan biaya penyelesaian. Namun demikian, ada beberapa dosen yang sementara studi lanjut tentunya atas biaya sendiri.[202]

[202]Abd. Samad T (61 tahun), Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Agama Islam

Berkaitan pengembangan kompetensi dosen, Universitas Muhammadiyah Makassar telah memberi bantuan beasiswa studi lanjut ke jenjang Pendidikan S2 (terkhusus wisudawan berprestasi tingkat universitas) dan studi lanjut ke jenjang Pendidikan S3. Hal ini dituangkan dalam SK Rektor yang diatur dalam peraturan kepegawaian No.124 Tahun 1427 H/ 2006 M, pasal 20 Tentang Pendidikan Lanjut. Pemberian bantuan studi lanjut bagi dosen Unismuh Makassar. Untuk program S2 dan S3 diatur dalam SK Rektor No. 100 tahun 1431 H/ 2010 M Tentang Ketentuan Studi Lanjut Dosen. Bantuan beasiswa diharapkan dapat memotivasi dosen dalam meningkatkan kapasitas kualitas dan kompetensinya di dalam pengelolaan akademik di Institusi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dosen di perguruan tinggi memegang peranan strategis dalam pembinaan akademik dan kemahasiswaan. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dosen. Hal itu karena dosen berfungsi sebagai agen yang mentransformasikan ilmu dan pengetahuan

---

Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 20 Maret 2017.

kepada mahasiswa, sehingga jika dosennya berkualitas, maka diharapkan ilmu dan pengetahuan yang ditransformasikan juga berkualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Miller mengungkapkan bahwa dalam pendidikan berlaku "*the man behind the system*", manusia merupakan faktor kunci yang menentukan kekuatan pendidikan.[203] Sallis Bahkan, pendidikan sebagai industri jasa merupakan "*front line provider and determine the quality of service delivery system*", dosen berada pada garis terdepan dalam menentukan kualitas pelayanan.[204] Sehingga dosen yang berkompeten merupakan sasaran yang harus terus diupayakan oleh perguruan tinggi.

2) Mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan

Mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan merupakan tuntutan profesionalitas bagi setiap dosen yang harus dipatuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Unit

[203]Fathorrahman, Kompetensi *Pedagogik, Profesional, Kepribadian Dan Kompetensi Sosial Dosen* (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ASIA Malang, AKADEMIKA 15. No.1 Februari 2017), h. 2.

[204]Fathorrahman, Kompetensi *Pedagogik, Profesional, Kepribadian Dan Kompetensi Sosial Dosen*, h. 3.

Penjaminanan Mutu Universitas berkaitan dengan mengajar dosen sesuai dengan latar belakang pendidikan, mengungkapkan bahwa: dosen yang dimiliki Unismuh Makassar sudah mengajar sesuai dengan kualifikasi keilmuannya. Sebab dari awal penerimaan dosen yang paling utama yang menjadi syarat kelulusan administrasi adalah memperhatikan latar belakang pendidikannya dan program studi yang dilamarnya serta penempatannya.[205]

Hasil studi dokumen daftar dosen Unismuh Makassar tahun 2017 dengan jumlah 665 orang, menunjukkan bahwa 90% dosen tersebut diterima dan terdistribusi sesuai dengan latar belakang pendidikan. Distribusi dosen yang sesuai dengan latar belakang pendidikan tersebut merupakan standar formal yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menyelenggarakan proses pembelajaran secara profesional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penempatan yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar sudah baik, hal ini

[205]Lukman Hakim (55 tahun), Ketua Penjaminan Mutu Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 21 Maret 2017.

terlihat pada penempatan tenaga dosen dalam pembagian mata kuliah sudah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, dan proses penempatan tenaga dosen diserahkan sepenuhnya kepada jurusan berdasarkan disiplin ilmu dosen. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan dosen meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.[206]

3) Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Unismuh Makassar

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) diberikan kepada dosen tetap yang memenuhi persyaratan melalui kementerian yang berlaku sampai dengan Dosen Tetap mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun daftar dosen yang memiliki

[206]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 2 pasal 3 tentang Guru dan Dosen

dan yang belum memiliki NIDN dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.4 Daftar Dosen yang memiliki NIDN

No	Fakultas	Program Studi/Jurusan	Jumlah Dosen	NIDN
1	Fakultas Agama Islam	1. Pendidikan Agama Islam	30	28
		2. Pendidikan Bahasa Arab	9	9
		3. Hukum Ekonomi Syariah	11	8
		4. Ahwal Syaksiyah	9	7
		5. Komunikasi Penyiaran Islam	9	9
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1. Kurikulum & Teknologi Pendidikan	10	9
		2. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	41	40
		3. Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris	45	41
		4. Pendidikan Matematika	44	40
		5. Pendidikan Fisika	22	20
		6. Pendidikan sosiologi	24	22
		7. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	29	28
		8. Pendidikan Seni Rupa	8	8
		9. Pendidikan Kewarganegaraan	8	8
		10. Pendidikan Biologi	14	11
		11. Pendidikan Anak Usia Dini	8	7
3	Fakultas Ilmu Sosial	1. Ilmu Administrasi Negara	34	32

No	Fakultas	Program Studi/Jurusan	Jumlah Dosen	NIDN
	dan Ilmu Politik	2. Ilmu Pemerintahan	17	15
		3. Ilmu Komunikasi	6	6
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1. Ekonomi Pembangunan	16	12
		2. Manajemen	37	35
		3. Akuntansi	32	31
		4. Perpajakan (D3)	7	6
		5. Ekonomi Islam	7	6
5	Fakultas Pertanian	1. Agribisnis	35	32
		2. Budidaya Perairan	13	10
		3. Manajemen Hutan	12	9
		4. Agroteknologi	6	6
6	Fakultas Teknik	1. Teknik Pengairan	22	20
		2. Teknik Elektro	25	23
		3. Teknik Arsitektur	17	15
7	Fakultas Kedokteran	1. Pendidikan Dokter	34	23
		2. Profesi Dokter	24	20
	Jumlah		**665**	**535**
	Persentasi		**100**	**89.62%**

Sumber Data: Dokumen Penjaminan Mutu Unismuh Makassar, tahun 2017

Tabel di atas menunjutkan bahwa dari jumlah keseluruhan dosen Unismuh Makassar, yaitu 665, yang sudah memiliki NIDN sebanyak 535 orang atau (89,62%), sedangkan yang belum memiliki NIDN adalah sebanyak 130 atau (1,38%). Data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan Ketua Unit Penjaminanan Mutu Universitas berkaitan dosen yang memiliki NIDN dan yang belum. diungkapkan bahwa: dosen yang dimiliki Unismuh Makassar sebagian besar

sudah memiliki NIDN, namun diakui masih ada dosen yang belum memiliki NIDN dikarenakan masih sementara pengurusan khusunya dosen yang baru dinyatakan lulus dan dosen masih sementara menyelesaikan pendidikannya kejenjang magister (S2).[207]

Dengan demikian dosen Universitas Muhammadiyah Makassar sebagian besar sudah memiliki NIDN dan sudah memenuhi standar objektif sebagai dosen tetap. NIDN dalam perguruan tinggi sangat penting dimiliki karena merupakan identitas yang menunjukan dosen tersebut adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 pasal 4 yaitu persyaratan untuk memperoleh NIDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1: 1) sebagai dosen tetap perguruan tinggi dan 2) memiliki kualifikasi akademik.[208]

---

[207]Lukman Hakim (55 tahun), Ketua Penjaminan Mutu Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 21 Maret 2017.

[208]Republik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 pasal 4 yaitu persyaratan untuk memperoleh NIDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1.

4) Jabatan fungsional akademik dosen

Jabatan fungsional akademik dosen dapat dimaknai sebagai posisi dalam *civitas* akademik yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan akademik dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun dosen yang sudah memiliki dan yang belum memiliki pangkat akademik dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 4.5 Gambaran Jabatan Fungsional Akademik Dosen

No.	Fakultas	Program Studi	Jumlah Dosen	Tenaga Pengajar	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
1		1. Pendidikan Agama Islam	30	2	8	16	4	0
		2. Pendidikan Bahasa Arab	9	0	4	3	2	0
		3. Hukum Ekonomi Syariah	11	1	6	3	1	0
		4. Ahwal Syaksiyah	9	1	5	3	0	0
		5. Komunikasi Penyiaran Islam	9	0	4	5	0	0
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidi-kan	1. Kurikulum & Teknologi Pendidikan	10	2	5	3	0	0
		2. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	41	3	17	15	5	1

		3. Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris	45	2	20	17	6	0
		4. Pendidikan Matema-tika	44	3	16	20	4	1
		5. Pendidikan Fisika	22	2	6	11	3	0
		6. Pendidikan sosiologi	24	1	7	9	7	0
		7. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	29	2	9	10	8	0
		8. Pendidikan Seni Rupa	8	2	6	0	0	0
		9. Pendidikan Kewarga-negaraan	8	2	3	2	1	0
		10. Pendidikan Biologi	14	2	4	6	2	0

		11. Pendidikan Anak Usia Dini	8	2	3	3	0	0
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi	1. Ilmu Administrasi Negara	34	2	14	8	9	1
		2. Ilmu Pemerintahan	17	4	8	4	1	0
		3. Ilmu Komunikasi	6	2	3	1	0	0
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1. Ekonomi Pembangunan	16	2	7	4	3	0
		2. Manajemen	37	6	16	9	6	0
		3. Akuntansi	32	8	4	14	6	0
		4. Perpajakan (D3)	7	3	3	1	0	0
		5. Ekonomi Islam	7	3	3	1	0	0

5	Fakultas Pertanian	1. Agribisnis	35	2	19	9	4	1
		2. Budidaya Perairan	13	2	4	4	2	0
		3. Manajemen Hutan	12	3	2	6	1	0
		4. Agroteknologi	6	3	3	0	0	0
6	Fakultas Teknik	1. Teknik Pengairan	22	3	10	7	2	0
		2. Teknik Elektro	25	2	14	7	2	0
		3. Teknik Arsitektur	17	2	10	3	2	0
7	Fakultas Kedokteran	1. Pendidikan Dokter	34	12	14	7	1	0
		2. Profesi Dokter	24	7	11	5	1	0
	Jumlah		**665**	**167**	**511**	**420**	**164**	**4**
	Persentasi			**25.11**	**76.84**	**63.16**	**24.67**	**50**

Sumber Data: Dokumen Penjaminan Mutu Unismuh Makassar, tahun 2017

Adapun gambaran pangkat akademik dosen Unismuh Makassar berdasarkan fakultas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.6 Persentase Jabatan Fungsional Akademik Dosen Unismuh Berdasarkan Fakultas

No.	Fakultas	Tenaga Pengajar	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar	Jumlah Dosen
		-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	FAI	4	27	30	7	0	68
2	FKIP	23	96	96	36	2	253
3	Fisipol	8	25	13	10	1	57
4	FEBIS	22	33	29	15	0	99
5	Pertanian	10	28	19	7	2	66
6	Teknik	7	34	17	6	0	65
7	Kedokteran	19	25	12	2	0	58
Jumlah		93	268	216	83	5	665
Persentasi		14%	40.30 %	32.48%	12.48 %	0.75 %	

Sumber Data: Dokumen Penjaminan Mutu Unismuh Makassar, tahun 2017

Gambaran jabatan fungsional akademik dosen dapat pula dilihat pada diagram lingkaran berikut

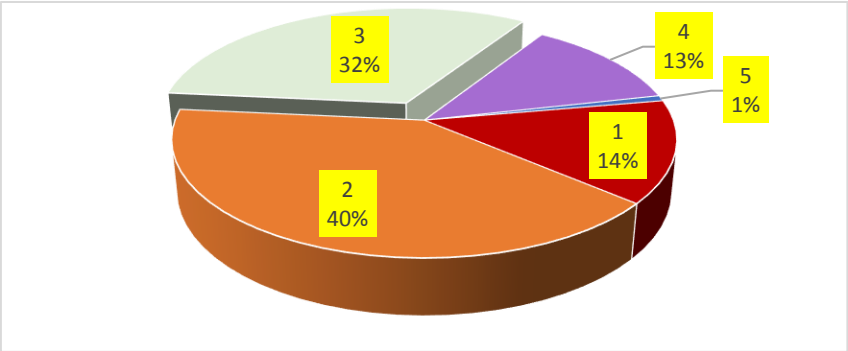

Gambar 4.7 Diagram Jabatan Fungsional Akademik Dosen Unismuh Makassar

Keterangan

a) Tenaga Pengajar
b) Asisten Ahli
c) Lektor
d) Lektor Kepala
e) Guru Besar

Uraian pada tabel dan diagram lingkaran tersebut di atas menunjukkan jabatan fungsional akademik dosen yang sudah dimiliki Unismuh Makassar dari jumlah dosen tetap sebanyak 665 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 93 atau 14% dosen belum memiliki jabatan fungsional (tenaga pengajar), 268 atau 40.30% dosen memiliki jabatan fungsional asisten ahli, 216 atau 32.48% dosen memiliki jabatan fungsional Lektor, 83 atau 12.48% yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, dan 5 atau 0,75% dosen sebagai guru besar.

Berdasarkan data tersebut berkaitan dengan jabatan fungsional dosen maka dapat disimpulkan bahwa dosen yang sudah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi dosen sebanyak 572 orang atau 86.00%. Namun demikian ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan yaitu masih

kurangnya dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala begitu pula dosen yang bergelar guru besar.

Jabatan fungsional dosen dapat menggambarkan kinerja yang dimilikinya. Oleh karena itu, penting bagi pimpinan perguruan tinggi untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja dosen di antaranya pemberian motivasi yang tepat dan pelatihan-pelatihan secara terus menerus dalam pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan penelitian dan penulisan jurnal ilmiah nasional maupun internasional serta atmosfer akademik yang baik. Dengan demikian, terpenuhinya kualitas perguruan tinggi salah satunya dapat dilihat dari jabatan fungsional yang dimiliki dosen.

Berkaitan gambaran jabatan fungsional dosen melalui tabel tersebut di atas, dapat pula digambarkan lewat hasil wawancara dengan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas.

Hasil wawancara dengan Abd. Samat T, mengungkapkan bahwa: Khususnya di fakultas kami, sebagian besar dosen telah memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli (III B) dan

Lektor (III C) sedangkan untuk Lektor Kepala baru beberapa orang dan yang Guru Besar (Profesor) belum ada. Ada beberapa permasalahan yang dialami dosen kami dalam mengurus kenaikan pangkat di antaranya yaitu terkendala dalam menpublikasikan karyanya lewat jurnal yang terepotasi Dikti, begitu pula jurnal internasional, buku ajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat.[209]

Selanjutnya Agusriadi menyatakan bahwa: problem yang kami alami sama dengan fakultas-fakultas yang ada di Unismuh ini masih lebih banyak yang berstatus Lektor (III C) dibanding yang sudah Lektor Kepala dan Guru Besar. Namun demikian, pihak universitas memberikan pendampingan agar kelengkapan pengurusan pangkat akademik bisa terpenuhi.[210]

Untuk memenuhi kualitas SDM dosen Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dilaksanakan secara baik akan sangat tergantung jika ada kebijakan strategis dan program strategis yang dilakukan untuk pengembangan sumber

[209]Abd. Samad T (61 tahun), Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 20 Maret 2017.
[210]Agustriadi (37 tahun), Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 21 Maret 2017.

daya manusia di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengembangan tenaga pendidik dapat dilakukan melalui pendidikan (studi lanjut) dan pelatihan-pelatihan.

Adapun bentuk pengembangan SDM Dosen Unismuh Makassar, yaitu

Pertama adalah pengembangan kompetensi, berkaitan dengan peningkatan kemampuan: menguasai bahan, mengelola program pembelajaran, memilih dan menggunakan media dan sumber belajar, menguasai landasan kependidikan, mengelola kelas, mengelola interaksi pembelajaran, melaksanakan fungsi dan proses bimbingan dan penyuluhan, menilai prestasi hasil pembelajaran, menyelenggarakan administrasi, memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian untuk pembelajaran, mengembangkan pengetahuan dengan metode ilmiah, mempublikasikan dan menerapkan pengetahuan, dan mengembangkan diri.

Kedua adalah pengembangan disiplin kerja, diarahkan pada konsistensi individu dalam memahami, menghayati, melaksanakan, dan memasyarakatkan ketentuan, perilaku dalam

sistem kelembagaan. Penyosialisasi berbagai ketentuan atau aturan mengenai disiplin harus dilakukan.

Ketiga adalah mengembangkan semangat kerja, memiliki karakter yang berlainan dengan pengembangan disiplin kerja. Semangat kerja berkaitan dengan ketulusan hati karena adanya kepuasaan kerja sebagai akibat terpenuhinya kebutuhan dasar dari pekerjaan yang dilakukan. Kehadiran, kelemahan, antusiasme, kerja sama merupakan indikator-indikator penting untuk mengukur semangat kerja.

Keempat adalah pengembangan karir dan kesejahteraan, pengembangan ini sangat dibutuhkan usaha-usaha pengembangan sebelumnya. Pengembangan ini memiliki fungsi pemeliharaan atas upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan-pengembangan sebelumnya. Harus diakui bahwa penghargaan berupa kesejahteraan untuk profesi mengajar umumnya, khususnya dosen, secara bertahap kesejahteraan dosen terus ditingkatkan.

Adapun upaya yang dilakukan Universitas Muhamadiyah Makassar untuk meningkatkan kinerja dosen yaitu

a) Memberikan kesempatan dan fasilitas kepada dosen yang akan studi lanjut;
b) Memberikan kesempatan dan fasilitas dosen untuk memperoleh sertifikasi keahlian di bidangnya;
c) Mendorong dosen untuk dapat menjadi pemakalah pada seminar nasional dan internasional;
d) Memberikan kesempatan bagi dosen muda untuk magang di kelas dosen senior;
e) Pengembangan metode pembelajaran, penguatan *content,* dengan pelatihan pembuatan buku ajar dan bahan ajar;
f) Pengembangan dan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi sehingga menjadi *competitive advantage*;
g) Pengembangan program unggulan di masing-masing program studi, sehingga menjadi *centre of excellence*;
h) Pengembangan konsep kelas unggulan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa unggulan dan meningkatkan suasana akademik;
i) Studi banding atau magang dengan PT lain.[211]

[211]Rahim Nanda (50 tahun), Wakil Rektor 1 Unismuh Makassar,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dosen yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Makassar sebagian besar sudah memenuhi syarat administrasi, namun demikian masih banyak yang perlu diperhatikan sehingga pengembangan SDM dosen terus ditingkatkan. Pembinaan sumber daya manusia yang terus ditingkatkan adalah melalui: a) pengembangan dosen melalui pertemuan pertemuan ilmiah; b) penataran atau lokakarya, c) bimbingan senior-junior; dan d) memberikan kesempatan kepada para dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dosen pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Wawancara, Unismuh Makassar, 20 Maret 2017.

Tabel. 4.7 Hasil Evaluasi Masukan (*antecedents)* Berdasarkan Kriteria/Standar Objektif Pemenuhan SDM Dosen Unismuh Makassar

Standar Objektif	Intensitas Objektif	Ketercapaian			Keputusan
Pemenuhan SDM Dosen		T	KT	TT	
1. Rekrutmen Tenaga Pendidik	1. Penerimaan calon dosen baru berdasarkan dokumen formal yang dimiliki Unismuh Makassar 2. Penerimaan dosen dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas 3. Penerimaan dosen disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia di masing-masing fakultas atau program studi 4. Calon dosen mengikuti seluruh rangkaian tes Kompetensi (tes tertulis, tes keterampilan, dan tes wawancara) 5. Dosen yang dinyatakan lulus/diterima semuanya memenuhi syarat yang telah ditentukan 6. Dosen yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan perolehan skoring tertinggi (urutan peringkat skor)	**T**			Berdasarkan standar objektif pada aspek rekrutmen tenaga pendidik maka keputusan hasil evaluasi pada tahapan masukan (*antecedents*) dari 6 sub aspek yang di evaluasi semuanya sudah tercapai sesuai dengan standar objektif yang telah ditentukan.

2. Persyaratan Administrasi Dosen	**1. Jenjang Pendidikan Dosen** Jenjang pendidikan dosen Unismuh Makassar: 7 atau 1, 05% dosen tetap berpendidikan S1, 583 atau 79,85% dosen tetap berpendidikan Magster (S2), dan 141 atau 19,09 % dosen tetap berpendidikan Doktor (S3).	**T**			Sesuai kriteria objektif pada aspek persyaratan dosen pada kategori standar dari 4 sub aspek tahapan sudah tercapai sesuai kriteria meliputi: 1. 98,55% dosen tetap sudah memenuhi kualifikasi akademik (jenjang pendidikan) 2. 90 % dosen mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, hal tersebut sudah menunjukkan ketercapaian standar objektif 3. 89,62 % dosen sudah memiliki NIDN menandakan sudah memenuhi standar objektif 4. 95,31%, yang sudah memiliki pangkat akademik Dari syarat administrasi yang harus dipenuhi dosen pada umumnya sudah terpenuhi sesuai standar objektif namun demikian ada beberapa persyaratan yang perlu ditingkatkan dan diperhatikan yaitu jenjang
	2. Mengajar sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan Dosen Unismuh Makassar menunjukkan bahwah 90% dosen tersebut mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan.	**T**			
	3. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Unismuh Makassar Dosen Unismuh Makassar yang sudah memiliki NIDN sebanyak 535 orang atau (89,62%), sedangkan yang belum memiliki NIDN adalah sebanyak 130 atau (1,38%) dari jumlah dosen 665 orang	**T**			
	4. Pangkat Akademik Dosen Dosen Unismuh Makassar yang sudah memiliki pangkat akademik	**T**			

	sebanyak 572 orang atau (74,89%), sedangkan yang belum memiliki pangkat akademik sebanyak 93 orang atau (25,11%) dari jumlah dosen 665				pendidikan dosen masih lebih banyak yang berpendidikan S2 dibandingkan dengan yang berpendidikan S3, begitu pula masih lebih banyak dosen yang berpangkat akademik asisten ahli dibandingkan dengan yang lektor dan lektor kepala serta guru besar yang masih sedikit jumlahnya

Keterangan: T= Tercapai, KT=Kurang Tercapai, TT= Tidak Tercapai

c. Realitas Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran pada Tahapan Masukan (*antecedents*) di Universitas Muhammadiyah Makassar

Pelaksanaan standar isi pembelajaran merupakan implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Realitas pelaksanaan standar isi pembelajaran pada tahapan masukan di Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dilihat pada alur sebagai berikut

Tahapan Deskripsi Standar

Gambar 4.8 Skema Evaluasi Masukan Standar Isi Pembelajaran

Analisis evaluasi masukan (*antecedents*) standar isi pembelajaran menggunakan lembar observasi, wawancara, dan studi dokumen. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi.

Kriteria atau patokan standar objektif yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kurikulum di Unismuh Makassar, yaitu: 1) Kurikulum dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Universitas, 2) Penerimaan dosen dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas, 3) Penyusunan kurikulum senantiasa memperhatikan spesifikasi Program Studi, 4) Kurikulum di susun berdasarkan kompetensi lulusan, 5) Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran KKNI, 6) Kurikulum AIK dikembangkan dengan memperhatikan ciri khas PTM 7) Penyusunan kurikulum melibatkan dosen dan pakar, dan 8) Evaluasi atau peninjauan kurikulum dilakukan secara periodik.

Kriteria standar tersebut di atas merupakan ukuran atau patokan standar objektif. Selanjutnya hasil evaluasi atau intensitas objektif dari lapangan dibandingkan dengan standar objektif yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan keputusan aktualitas pada setiap tahapan evaluasi atau aspek dilakukan dengan cara pengukuran pada setiap fokus evaluasi lalu kemudian dibandingkan dengan intensitas objektif yaitu berupa hasil rekaman nyata dilapangan.

Kaitan dengan standar objektif penyusunan kurikulum di Unismuh Makassar, digunakan instrumen lembar observasi dengan ceklis untuk memudahkan pengambilan data. Hasil evaluasi dari 32 observer (Ketua Program Studi) berkaitan penyusunan kurikulum diobservasi dengan menggunakan instrumen observasi. Hasil jawaban observer dapat dilihat tabel skor sebagai berikut

Tabel 4.8 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Penyusunan Kurikulum Unismuh Makassar

No.	Standar Objektif	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
1	Kurikulum dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi universitas	0	0	0	32	32	128	4	T
2	Kurikulum dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi program studi	0	0	2	30	32	126	3,93	T
3	Penyusunan kurikulum senantiasa memperhatikan spesifikasi program studi	0	0	12	20	32	116	3,62	T
4	Kurikulum di susun berdasarkan kompetensi lulusan	0	0	9	24	32	123	3,84	T
5	Standar kompetensi lulusan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran KKNI	0	4	8	20	32	112	3,5	T
6	Kurikulum AIK dikembangkan dengan memperhatikan ciri khas PTM	0	5	6	21	32	112	3,5	T
7	Penyusunan kurikulum melibatkan dosen dan pakar	0	0	13	19	32	115	3,59	T

No.	Standar Objektif	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
8	Evaluasi atau peninjauan kurikulum dilakukan secara periodik	0	0	4	28	32	124	3,87	T
	Jumlah	**0**	**9**	**54**	**194**		**956**	**3,72**	**T**

Ket. T = Tinggi (3, 01-4), S= Sedang (2, 01-3), dan R= Rendah (1-2)

Hasil analisis data instrumen observasi dari tabel di atas tentang penyusunan kurikulum Unismuh Makassar menunjukkan dengan capaian berkategori tinggi atau berada pada nilai rata-rata 3,72 dari 8 sub aspek yang di evaluasi dengan jawaban observer dengan standar objektif yang akan dicapai. Data tersebut menunjukkan capaian hasil evaluasi masukan (*antecedents)* observer berdasarkan kriteria/standar objektif penyusunan kurikulum Unismuh Makassar dengan kategori ketercapaian Tinggi. Dengan demikian, realitas pelaksanaan standar isi pembelajaran sudah sangat baik berdasarkan standar objektif yang di evaluasi.

Untuk memperoleh kredibilitas data yang tinggi berkaitan dengan realitas pelaksanaan standar isi pembelajaran yang diperoleh lewat lembar observasi yang dilakukan oleh observer maka diperlukan pengujian keabsahan data lebih lanjut melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk mempertajam analisis terhadap hubungan sejumlah data.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, bahwa: kurikulum yang dirancang dan diterapkan di Unismuh Makassar tentunya harus mampu menjamin tercapainya

tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin pembelajar untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang pembelajar dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.[212]

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran.

---

[212]Rahim Nanda (50 tahun), Wakil Rektor 1 Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 20 Maret 2017.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu

1) Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi;
2) Kurikulum harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada pelajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus, dan rencana pembelajaran;
3) Kurikulum harus di nilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi;
4) Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis)

untuk menyesuaikannya dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan;

5) Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarki;
6) Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber;
7) Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar;
8) Sistem perwalian: banyaknya mahasiswa per dosen wali, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian;
9) Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi): rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, ketersediaan panduan, dan waktu penyelesaian

penulisan;

10) Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir;
11) Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, interaksi akademik antara dosen mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.

Berkaitan dengan rasional tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Makassar menyusun panduan pengembangan kurikulum bagi program studi. Panduan ini berfungsi sebagai: (i) kebijakan dalam menentukan dan mengembangkan kemampuan (kompetensi) untuk melakukan tugas-tugas dan standar informasi tertentu yang termuat dalam spesifikasi program studi; (ii) filosofi yang akan memaknai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; (iii) patron atau pola pembelajaran; (iv) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial Unismuh Makassar dalam mencapai tujuan pembelajaran; (v) rujukan kualitas diri proses penjaminan mutu; (vi) ukuran keberhasilan Unismuh Makassar dalam

menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 3 sampai 5 tahun dengan melibatkan *Technical Assistance* (TA), *stakeholder* (user, dosen, dan mahasiswa). Evaluasi kurikulum mengacu pada hasil analisis monitoring. Selain itu, proses evaluasi kurikulum tetap memperhatikan perkembangan iptek serta aturan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI, Peraturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Tahun 2012 serta UU RI No. 20 Tahun. Hasil evaluasi kurikulum disahkan oleh Rektor melalui rapat senat akademik universitas.

Berkaitan dengan rasional tersebut maka Universitas Muhammadiyah Makassar menyusun panduan pengembangan kurikulum bagi program studi. Panduan ini sebagai berfungsi

1) Kebijakan dalam menentukan dan mengembangkan kemampuan (kompetensi) untuk melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu yang termuat dalam spesifikasi program studi;

2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik;
3) Patron atau pola Pembelajaran;
4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial Universitas Muhammadiyah Makassar dalam mencapai tujuan pembelajarannya;
5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; dan
6) Ukuran keberhasilan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, panduan pengembangan kurikulum memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.

Pengembangan panduan kurikulum Unismuh Makassar mengacu pada beberapa peraturan akademik, yaitu

1) Kebijakan akademik yang dikeluarkan oleh Rektor melalui SK Rektor No. 103/II.3.AU/F/2010 Tanggal 07 Agustus 2010;
2) Standar akademik yang dikeluarkan oleh Rektor melalui SK Rektor No. 104/II.3.AU/F/2010 Tanggal 07 Agustus 2010;

3) Peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Rektor melalui SK Rektor No. 105/IsI.3.AU/F/2010 Tanggal 07 Agustus 2010.

Adapun kurikulum program Diploma dan program Strata Satu, yaitu

1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas
   a) Kurikulum inti, yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus tercakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional dan diatur oleh menteri;
   b) Kurikulum institusional, yaitu sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan, serta ciri khas Universitas Muhammadiyah Makassar sesuai dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2) Kurikulum inti sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 poin (a) terdiri atas
   a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) yaitu kelompok mata kuliah untuk pengembangan mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Allah Swt. berbudi pekerti luhur serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

b) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK) yaitu kelompok mata kuliah yang ditujukan terutama untuk memberikan penguasaan dasar keilmuan dan keterampilan tertentu;

c) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) yaitu kelompok mata kuliah yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan yang berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

d) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) yaitu kelompok mata kuliah yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan mahasiswa dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.[213]

Adapun Pembobotan Kurikulum terdiri dari

a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) 10%-20%;

[213] Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2010, h. 26

b) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK) 30%-50%;
c) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB); dan
d) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MKBB) 30%-60%.[214]

Ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah bukan hanya menjalankan Tri Darma PT akan tetapi menjalankan Catur Darma PT, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang merupakan hal yang membedakan PT lain, di mana tetap dipertahankan sampai saat ini adalah dimasukannya mata Kuliah AIK di semua lembaga pendidikan (formal) milik muhammadiyah. AIK dalam sistem pendidikan muhammadiyah juga memiliki status sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa. Penerapan kurikulum AIK di PTM.
Adapun standar kurikulum Unismuh Makassar dapat dilihat pada tabel berikut

[214] Peraturan Akademik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2010, h. 27

Tabel. 4.9 Standar Mutu Kurikulum Unismuh Makassar[215]

Standar Objektif	Aktualisasi	Dokumen Pendukung
1. Landasan Ideal Kurikulum Unismuh Makassar	1.1 Menjunjung tinggi visi dan Misi Unismuh Makassar	1. Pedoman Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2010 2. Dokumen Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2010 3. Manual Book Manajemen Mutu Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016
	1.2 Memenuhi asas dan fungsi kurikulum a. Lulusan mempunyai pengetahuan dan pemahaman bidang keilmuan yang dapat digunakan untuk berkarya, studi lanjut, dan pengembangan kepribadian. b. Kurikulum di evaluasi secara teratur dalam kurung waktu 3-5 tahun oleh senat fakultas dan senat universitas	
	1.3 Memenuhi karakteristik kurikulum Unismuh Makassar a. Kurikulum harus berbasis kompetensi b. Kurikulum harus berbasis keislaman c. Memungkinkan mahasiswa mengikuti kuliah lintas program, jurusan atau fakultas	
2. Spesifikasi Program Studi	2.1 Mempunyai tujuan pendidikan	
	2.2 Kompetensi lulusan	
	2.3 Struktur kurikulum a. Struktur kurikulum dibuat secara sistematik per semester dan terlihat dengan jelas keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. b. Struktur kurikulum berada dalam kisaran sebagai berikut: 1) Kompetensi utama : (40-80)% 2) Kompetensi Pendukung (20-40) %	

[215]Dokumen Akademik Unismuh Makassar, Tahun 2010. h. 10-11

	3) Kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi utama (0-30)% c. Struktur kurikulum harus memungkinkan terjadinya pembelajaran lintas program, lintas jurusan an lintas fakultas	
	2.4 Isi kurikulum menunjang kompetensi lulusan a. Materi kurikulum yang membentuk keahliaan dan kepribadian. b. Mata kuliah pembentuk keahlian mencakup: 1) Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK); 2) Mata Kuliah Keilmuan (MKK); 3) Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKKK). c. Mata Kuliah Pembentuk Kepribadian mencakup mata kuliah pengayaan wawasan, budi pekerti, dan keterampilan pendidikan tinggi.	
3. Kompetensi Kurikulum	3.1 Kompetensi lulusan **a.** Berdasarkan capaian visi dan misi Unismuh Makassar; **b.** Kebutuhan masyarakat dan pengembangan iptek budaya dan seni; **c.** Tuntutan pembangunan bangsa dan permintaan *stakeholders*; **d.** Tuntutan belajar sepanjang hayat.	.
	3.2 Materi/isi pembelajaran a. Kurikulum memuat pengelompokan mata kuliah sebagai berikut 1) Kelompok Mata Kuliah; 2) Keilmuan dan Keterampilan (MKK); 3) Mata Kuliah Berkarya (MKB);	

	4) Mata Kuiiah Perilaku Berkarya (MPB); 5) Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB); 6) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). b. Setiap mata kuliah mempunyai Rancangan Pengajaran (Silabus) dan Satuan Acara Pengajaran. c. Antara mata kuliah satu dengan yang lainnya terlihat jelas hubungannya dan bermuara pada pencapaian kompetensi lulusan.	
	3.3 Sumber Belajar Tersedia sumber belajar di perpustakaan, internet dan mengikuti perkembangan terkini	
	3.4 Strategi dan Metode Pembelajaran Pembelajaran berfokus pada mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran aktif kreatif.	
	3.5 Beban dan masa studi Beban dan masa studi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unismuh Makassar, dan dinyatakan dalam buku pedoman pendidikan	
	3.6 Sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa a. Sistem evaluasi belajar mahasiswa menggambarkan kemajuan belajar; b. Penilaian menggunakan PAP (Penilaian Acuan Patokan); c. Penilaian memperhatikan berbagai kegiatan dalam pembelajaran; d. Kriteria penilaian harus emplisit, konsisten, dan diketahui oleh masyarakat.	

4. Pelaksanaan Kurikulum	4.1 Pelaksanaan sesuai dengan pedoman kurikulum a. Tersedianya dokumen berupa: 1) Silabus, Satuan Acara Pengajaran, Buku Pedoman Kerja Mahasiswa (BPKM), daftar hadir, soal ujian dan sebagainya; 2) Laporan evaluasi pelaksanaan perkuliahan dan hasil ujian. b. Pelaksanaan kurikulum tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat metode.	
5. Peninjauan Kurikulum	5.1 Kurikulum ditinjau secara periodik	
6. Produk Lulusan	6.1 Jumlah dan mutu lulusan sesuai dengan rencana a. Jumlah lulusan yang dihasilkan pertahun berimbang dengan jumlah mahasiswa yang diterima b. Indeks Prestasi Kumulatif lulusan minimal 3,00	
	6.2 Lama tunggu para lulusan memperoleh pekerjaan Lama tunggu para lulusan memperoleh pekerjaan paling lama 2-3 tahun.	

Berdasarkan paparan dokumen di atas terlihat bahwa struktur kurikulum yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar bersama seluruh program studi telah menyusun kelompok mata kuliah dan jumlah SKS sesuai program yang ditetapkan berdasarkan standar kurikulum KKNI.

Struktur kurikulum yang telah dirumuskan diterapkan oleh masing-masing program studi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kurikulum. Dari perspektif mutu kurikulum dapat dikatakan bahwa secara teoritis kurikulum yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi memiliki kualitas yang sama.

Dalam proses penetapan dan perumusan kurikulum masing-masing program studi menempuh berbagai cara agar kurikulum yang dirumuskan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan dengan beberapa tahapan dan memperhatikan Standar Penjaminan Mutu Internal. Penyusunan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Makassar sesuai dengan konsep teori Ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu perencanaan

kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum.[216]

Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bekerja sama dengan masing-masing ketua program studi dalam rangka mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa dan dosen. Pimpinan fakultas melaksanakan monitoring terhadap implementasi kurikulum dan proses pembelajarannya.

Dari hasil observasi dan studi dokumentasi, serta wawancara ditemukan, bahwa penyusunan kurikulum setiap program studi melalui proses dan langkah-langkah sebagai upaya untuk menghasilkan kurikulum sesuai standar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang telah ditempuh itu mulai pelibatan tim penyusun yang terdiri dari: pimpinan universitas, fakultas, lembaga penjaminan mutu, program studi, dosen, mahasiswa, dan pegawai. Serta ditambah dari kalangan pakar/ahli dan pengguna lulusan. Melaksanakan *workshop* untuk memberi wawasan kepada tim penyusun tentang muatan kurikulum, baik substansi maupun standar operasionalnya, kemudian melakukan diskusi

[216]Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 149.

dengan melibatkan narasumber, melakukan reviu dan revisi, serta finalisasi dan penilaian serta yang terakhir mendokumentasikan secara tercatat yang telah di susun tersebut untuk dipedomani oleh masing-masing dosen.

Adapun hasil evaluasi masukan berkaitan pelaksanaan standar isi pembelajaran sebagai berikut

Tabel 4.10 Hasil Evaluasi Masukan (*antecedents)* Observer Berdasarkan Kriteria/Standar Objektif Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Unismuh Makassar

Standar Objektif	Intensitas Objektif	Ketercapaian			Kepetusan
Implementasi Program		T	T	T	
Penyusunan Kurikulum	1. Kurikulum dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Universitas	T			Aktualisasi penyusunan Kurikulum terdapat 8 sub aspek yang di evaluasi, di mana semua sub aspek sudah tercapai sesuai dengan standar objektif
	2. Kurikulum dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Program Studi	T			
	3. Penyusunan kurikulum senantiasa memperhatikan spesifikasi Program Studi	T			
	4. Kurikulum di susun berdasarkan kompetensi lulusan	T			
	5. Standar Kompetensi Lulusan				

	mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran KKNI				
	6. Kurikulum AIK dikembangkan dengan memperhatikan ciri khas PTM	T			
	7. Penyusunan kurikulum melibatkan dosen	T			
	8. Evaluasi atau peninjauan kurikulum dilakukan secara periodik				

Keterangan: T= Tinggi KT= Kurang Tercapai, TT= Tidak Tercapai

d. Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran pada Tahapan Proses (*Transactions*) di Universitas Muhammadiyah Makassar

Secara umum gambaran pelaksanaan pembelajaran pada tahapan proses *(transactions)* di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penelitian ini dapat dilihat pada alur proses berikut

Tahapan Deskripsi Standar

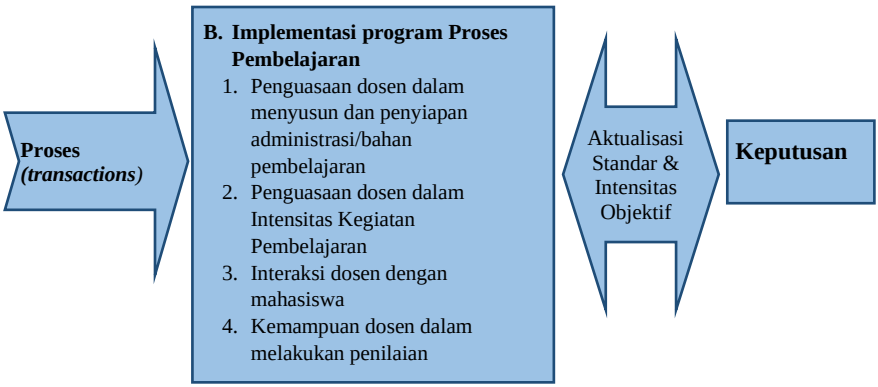

Gambar 4.9 Skema Evaluasi Proses

Evaluasi proses terhadap standar proses pembelajaran, mencakup: penguasaan dosen dalam menyusun dan penyiapan administrasi/bahan pembelajaran, penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan dan kemampuan dosen dalam mengevaluasi perkuliahan. Berikut diuraikan pembahasan dan hasil pengukuran masing-masing fokus yaitu

1) Penguasaan dosen dalam menyusun dan menyiapkan administrasi pembelajaran

Tugas pokok dosen adalah mengajar dan mendidik yang meliputi memberi kuliah, praktikum, tutorial, pelatihan, dan evaluasi atau ujian, serta tugas pembelajaran lainnya kepada mahasiswa, sesuai dengan jenjang jabatan

akademik dosen yang bersangkutan. Penguasaan dosen dalam menyusun dan menyiapkan administrasi perkuliahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: (1) penyusunan silabus, penyusunan RPS, penyusunan buku ajar, dan penyerahan dokumen (silabus, RPS, dan buku ajar) ke program studi.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran dosen terlebih dahulu harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP dan buku ajar. Pelaksanaan pembelajaran dibutuhkan dosen yang memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, serta metode yang bervariasi dalam menyampaikan materi pelajaran.

Hasil evaluasi dari 32 program studi berkaitan dengan penguasaan dosen dalam menyusun dan menyiapkan administrasi perkuliahan diobservasi dengan menggunakan instrumen lembar observasi. Hasil jawaban observer dapat dilihat pada tabulasi skor berikut

Tabel 4.11 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Penguasaan Dosen dalam Menyusun dan Menyiapkan Administrasi Perkuliahan[217]

No.	Hal yang di nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kate gori
		1	2	3	4				
1	Dosen menyusun silabus mata kuliah	0	0	6	26	32	122	3.81	T
2	Dosen menyusun RPS perkuliahan	0	0	9	23	32	119	3.71	T
3	Dosen menyusun buku ajar	3	2	19	8	32	88	2.72	S
4	Dosen menyusun perkuliahan yang mempertimbangkan kerkembangan keilmuan jurusan	0	5	13	14	32	105	3.28	T
5	Dosen menyerahkan silabus ke jurusan/prodi	0	1	7	24	32	119	3.71	T
6	Dosen menyerahkan RPS perkuliahan ke jurusan/prodi	0	0	15	17	32	113	3.53	T
7	Dosen merevisi silabus dan RPS setiap awal semester	0	4	6	22	32	114	3.56	T
	Jumlah	**3**	**12**	**75**	**134**			**3.47**	**T**

Keterangan T = Tinggi (3, 01-4), S= Sedang (2, 01-3), dan R= Rendah (1-2)

Hasil analisis data instrumen observasi dari tabel di atas tentang penguasaan dosen dalam menyusun dan menyiapkan administrasi perkuliahan menunjukkan bahwa terdapat 6 sub komponen yang berkategori tinggi atau memperoleh nilai rata-rata 3,49 dan 1 sub

[217]Sumber Data: Hasil olah angket jawaban observer (32 Prodi).

komponen berkategori sedang dengan nilai rata-rata 2,72.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa penguasaan dosen dalam menyusun dan menyiapkan administrasi perkuliahan berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 3,47. Sedangkan dalam menyusun buku ajar belum sepenuhnya di susun oleh dosen sesuai dengan ketentuan. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian oleh dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar agar memperhatikan penyusunan buku ajar yang sangat penting karena dapat menjadi rujukan keberhasilan dalam mengajar.

Berdasarkan data observasi yang didapatkan dari observer pada tabel tersebut di atas dari 7 item yang di nilai telah menunjukkan ketercapaian standar objektif. Untuk akuratnya data tersebut peneliti melakukan komfirmasi atau wawancara langsung dengan beberapa informan terkait penguasaan dosen dalam penyusunan dan menyiapkan administrasi perkuliahan.

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya dosen secara keseluruhan telah menyusun administrasi perkuliahan dalam hal Silabus dan

RPS. Kenyataan di lapangan menunjukkan pula masih ada yang belum terpenuhi yaitu masih sebagian kecil dosen menyusun buku ajar. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa buku ajar adalah hal yang penting di susun oleh dosen untuk dijadikan salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ummi Hanifah bahwa buku ajar merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran.[218]

2) Penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan

Tugas dan tanggung jawab seorang dosen bukan hanya menyusun administrasi perkuliahan, akan tetapi bagaimana menjalankan apa yang telah di susunnya. Penguasaan dosen terhadap materi perkuliahan sebagai seorang profesional, sudah selayaknya menguasai materi perkuliahan yang diampunya. Seorang dosen harus memiliki spesialisasi yang jelas dalam penguasaan keilmuannya. Penguasaan suatu ilmu tidak bisa dilakukan seperti pepatah "sambil menyelam

---

[218]Ummi Hanifa. *Pentingnya Buku Ajar Yang Berkualitas Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab*. Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid" 3, No. 1, Januari 2014

minum air". Penguasaan terhadap ilmu atau mata kuliah yang diampunya harus merupakan persyaratan mutlak bagi seorang dosen ketika di jadwal kuliah. Kemampuan dosen dalam mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampunya diharuskan untuk memiliki kemampuan. Seorang dosen dituntut mampu melakukan pembelajaran yang jelas, benar, penuh kreativitas, dan memiliki keinovasian dalam strategi pembelajaran.

a) Hasil evaluasi dari 32 ketua prodi

Adapun evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan penguasaan dosen dalam perkuliahan di susun instrumen lembar observasi untuk memudahkan pengambilan data hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya evaluasi penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan terhadap 32 Ketua Prodi, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut

Tabel. 4.12 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Penguasaan Dosen dalam Pelaksanaan Perkuliahan[219]

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
1	Dosen mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	0	0	15	17	32	113	3.53	T
2	Dosen menyampaikan tata tertib perkuliahan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa	0	1	12	18	32	109	3.4	T
3	Dosen melakukan absensi kehadiran mahasiswa setiap pertemuan	0	0	2	30	32	126	3.93	T
4	Keaktifan dosen dalam memberikan perkuliahan	0	0	4	28	32	116	3.62	T
5	Dosen memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit	0	0	16	16	32	112	3.5	T
6	Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan yang akan dicapai mahasiswa	0	2	16	14	32	108	3.37	T
7	Dosen mengisi berita acara perkuliahan dan menandatangani-nya	0	0	4	28	32	116	3.62	T

[219]Sumber Data: Hasil olah angket jawaban observer (32 Prodi)

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
8	Kesuaian materi perkuliahan yang disampaikan dengan silabus yang telah ditetapkan	0	0	16	16	32	112	3.5	T
9	Dosen menyiapkan dan menggunakan media pembelajaran dalam perkuliahan	0	0	21	11	32	107	3.34	T
10	Materi yang diajarkan dosen mudah dipahami	0	2	19	11	32	105	3.28	T
11	Dosen menyampaikan materi kuliah berbasis IT	3	7	12	10	32	93	2.9	S
12	Dosen menggunakan metode mengajar sesuai dengan materi kuliah	0	0	20	12	32	108	3.45	T
13	Dosen melakukan pembelajaran yang interaktif	0	0	11	21	32	117	3.65	T
14	Dosen mengajar 16X tatap muka di kelas	0	0	12	20	32	116	3.62	T
15	Dosen memberikan pertemuan tambahan jika jumlah pertemuan belum mencapai 16 tatap muka	0	0	28	4	32	96	3	T
	Jumlah	3	12	142	180			3.44	T

Keterangan: T = Tinggi (3,1-4), S= Sedang (2,1-3), dan R = Rendah (0-2)

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa penguasaan dosen dalam efektivitas/pelaksanaan perkuliahan berdasarkan analisis lembar observasi dari 15 sub aspek yang di evaluasi menunjukkan capaian unit berkategori tinggi atau berada pada nilai rata-rata 3,44 dari 32 jawaban responden. Namun demikian terdapat 1 sub aspek yang berada di kategori sedang atau belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan standar objektif yang telah ditentukan, yaitu dosen menyampaikan materi kuliah berbasis IT dengan nilai rata-rata 2,9.

b) Hasil evaluasi dari 70 ketua tingkat

Selain penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan yang di evaluasi datanya dari 32 Ketua Prodi, dilakukan pula evaluasi yang sumber datanya diambil dari 70 mahasiswa/Ketua Tingkat. Hal ini dilakukan agar keabsahan data yang diperoleh dari 32 Ketua Prodi memiliki kredibilitas yang tinggi. Untuk lebih jelasnya evaluasi penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan terhadap 70 mahasiswa/ketua tingkat dari masing-masing perwakilan dari setiap fakultas sebanyak 10 orang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 4.13 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Penguasaan Dosen dalam Pelaksanaan Perkuliahan[220]

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
1	Dosen mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	3	17	17	33	70	220	3.14	T
2	Dosen menyampaikan tata tertib perkuliahan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa di awal pertemuan	2	5	23	40	70	241	3.44	T
3	Dosen melakukan absensi kehadiran mahasiswa setiap pertemuan	3	17	17	33	70	220	3.14	T
4	Keaktifan dosen dalam memberikan perkuliahan	0	11	32	27	70	226	3.22	T
5	Dosen memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit	3	22	33	15	70	206	2.94	S

[220]Sumber Data: Hasil olah lembar observasi jawaban responden (70 Mahasiswa/Ketua Tingkat)

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
6	Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan yang akan dicapai mahasiswa	1	5	22	42	70	245	3.5	T
7	Ketepatan waktu dosen dalam mengawali dan mengakhiri perkuliahan	3	6	46	15	70	213	3	T
8	Ketertiban dosen dalam mengisi berita acara perkuliahan dan menandatanganinya	0	0	23	47	70	257	3.67	T
9	Dosen menyiapkan dan menggunakan media pembelajaran dalam perkuliahan	2	9	25	34	70	231	3.3	T
10	Materi yang diajarkan dosen mudah dipahami	3	8	32	27	70	223	3.18	T
11	Dosen menyampaikan materi kuliah berbasis IT	14	42	10	4	70	144	2.05	R
12	Dosen menggunakan metode mengajar yang bervariasi	0	2	37	31	70	237	3.38	T

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
13	Dosen melakukan pembelajaran yang interaktif	0	3	32	35	70	212	3.02	T
14	Dosen mengajar 16x tatap muka di kelas	4	19	19	28	70	211	3	T
15	Dosen memberikan pertemuan tambahan jika jumlah pertemuan belum mencapai 16x tatap muka	7	7	17	39	70	228	3.25	T
	Jumlah	45	173	385	450			3.14	T

Keterangan: T = Tinggi (3,1- 4), S= Sedang (2,1-3), dan R = Rendah (0-2)

Dari tabel 4.13 dapat diketahui hasil evaluasi penguasaan dosen dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil analisis data observasi di mana hasil capaian menunjukkan bahwa dari 15 sub aspek yang di evaluasi terdapat 13 sub aspek berkategori tinggi, 1 sub aspek yang berkategori sedang, dan 1 sub aspek yang berkategori rendah.

Dapat disimpulkan bahwa penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan menunjukkan capaian unit berkategori tinggi dengan nilai rata-rata 3,14 dari 15 sub aspek yang di evaluasi. Namun demikian, perlu adanya perhatian perbaikan atas 2 sub aspek yang berkategori sedang dan rendah atau belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan standar objektif yang telah ditentukan, yaitu 1) dosen memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit mengikuti perkuliahan dengan nilai rata-rata 2,94; 2) dosen menyampaikan materi kuliah belum berbasis IT dengan nilai rata-rata 2,05. Dari hasil evaluasi yang dilakukan lewat observer (ketua prodi dan ketua tingkat) dengan menggunakan lembar observasi, dilakukan pula wawancara untuk

menguatkan data yang telah didapatkan lewat observer.

Perkuliahan dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat, tentunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap bagi dosen dalam hal kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen. Abd. Samad, T mengungkapkan bahwa: program studi melakukan monitoring terhadap proses pembelajaran di kelas dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Proses yang dipantau adalah kesesuaian antara capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran prodi, dengan konten/materi yang diajarkan oleh dosen. Monitoring ini bertujuan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan program studi.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa: evaluasi pembelajaran dilakukan dalam bentuk pertemuan tim *teaching* mata kuliah untuk mengkaji isi materi kuliah, urutan materi, dan buku referensi pendukung mata kuliah tertentu. Tim *teaching* mengadakan pertemuan berdasarkan komitmen bersama, biasanya pertemuan ini dilaksanakan menjelang semester berikutnya. Di samping itu

program studi mengedarkan angket yang tidak mencantumkan identitas mahasiswa. Angket tersebut digunakan untuk menilai proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Angket ini disebar menjelang pelaksanaan final tes dan hasil evaluasi melalui sebaran angket tersebut diperlihatkan kepada dosen sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran untuk semester berikut.

Dari hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap dosen yang menjalankan tugasnya dalam mengajar sudah sesuai dengan standar objektif yang menjadi ketentuan. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu proses pembelajaran belum berbasis IT. Pembelajaran IT merupakan proses pembelajaran dengan melibatkan teknologi di dalamnya. Menurut Ali Muhson, keberadaan teknologi pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dosen sebagai penyampai pesan memiliki kepentingan yang besar untuk memudahkan tugasnya dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada

mahasiswa. Dosen juga menyadari bahwa tanpa media, materi pembelajaran terasa sulit untuk dapat dicerna dan dipahami oleh mahasiswa, apalagi bila materi pembelajaran yang harus disampaikan tergolong rumit dan kompleks. Untuk itu penggunaan media mutlak harus dilakukan agar materi dapat sampai ke mahasiswa secara efektif dan efisien.[221]

3) Interaksi Dosen dengan Mahasiswa dalam Perkuliahan

Seorang dosen sudah selayaknya memiliki sosok pribadi yang hangat, positif dan konstruktif. Disinilah dituntut agar dosen memiliki kepribadian positif terutama dalam cara berpikir dan bersikap konstruktif. Dalam perkuliahan dosen senantiasa dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, begitu pula memiliki kompetensi sosial kepada mahasiswanya, dalam artian interaksi dosen dengan mahasiswa berjalan dengan penuh keakraban. Olehnya itu dosen perlu menguasai praktik-praktik pengajaran yang berpusat pada tujuan dan menguasai teknik-teknik pendekatan

[221]Ali Muhson, *Pengembangan media berbasis Teknologi Informasi.* Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia 8, No.2-Tahun 2010.

terhadap mahasiswa secara perorangan maupun kelompok yang terarah.

a) Hasil evaluasi dari 32 ketua prodi

Selain penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan yang di evaluasi di atas selanjutnya yang di evaluasi, yaitu berkaitan dengan interaksi dosen dengan mahasiswa. Hasil observasi evaluasi ini diambil dari 32 Ketua Prodi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.14 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Interaksi Dosen dengan Mahasiswa dalam Perkuliahan[222]

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kate gori
		1	2	3	4				
1	Kemampuan dalam memotivasi mahasiswa dalam pembelajaran	0	2	7	23	32	117	3.65	T
2	Penggunaan bahasa dalam pelaksanaan perkuliahan (kejelasan dan sopan santun dalam berbahasa)	0	4	10	19	32	114	3.64	T
3	Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran.	0	5	13	14	32	105	3.28	T
4	Bersikap kooperatif menerima pendapat mahasiswa dalam berdiskusi	0	4	5	23	32	115	3.59	T
	Jumlah	**0**	**15**	**35**	**79**		**451**	**3.54**	**T**

Keterangan: T= Tinggi (3, 01-4), S= Sedang (2, 01-3), dan R= Rendah (1-2)

[222]Sumber Data: Hasil olah lembar observasi dari jawaban responde (32 Ketua Prodi)

Data di atas menunjukkan bahwa interaksi dosen dengan mahasiswa berdasarkan hasil analisis 4 sub aspek yang di evaluasi semuanya berkategori tinggi atau dengan capaian nilai rata-rata 3,54. Hal tersebut menunjukkan terpenuhinya semua standar objektif yang di evaluasi.

b) Hasil evaluasi dari 70 ketua tingkat

Selain interaksi dosen dengan mahasiswa dalam perkuliahan yang di evaluasi datanya dari 32 ketua prodi, dilakukan pula evaluasi yang sumber datanya diambil dari 70 mahasiswa/Ketua Tingkat. Hal ini dilakukan agar keabsahan data yang diperoleh dari 32 ketua prodi memiliki kredibilitas yang tinggi.

Untuk lebih jelasnya interaksi dosen dengan mahasiswa dalam perkuliahan dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan terhadap 70 ketua tingkat dari masing-masing perwakilan dari setiap fakultas sebanyak 10 orang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.15 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Interaksi Dosen dengan Mahasiswa dalam Perkuliahan[223]

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
1	Kemampuan dalam memotivasi mahasiswa dalam pembelajaran	2	2	43	23	70	225	3.21	T
2	Penggunaan bahasa dalam pelaksanaan perkuliahan (kejelasan dan sopan santun dalam berbahasa)	0	4	15	51	70	257	3.67	T
3	Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran.	0	5	33	32	70	237	3.38	T
4	Bersikap kooperatif menerima pendapat dalam berdiskusi	0	12	32	26	70	224	3.2	T
	Jumlah	2	23	123	132		943	3,25	T

Keterangan: T= Tinggi (3, 01-4), S= Sedang (2, 01-3), dan R= Rendah (1-2)

[223]Sumber Data: Hasil olah lembar observasi dari jawaban responden (70 Ketua Ketua Tingkat)

Dari tabel 4.15 dapat diketahui bahwa interaksi dosen dengan mahasiswa berdasarkan hasil analisis dari 4 sub aspek yang di evaluasi semuanya berkategori tinggi dengan capaian unit nilai rata-rata 3,25 dari 4 sub aspek yang di evaluasi. Dosen harus pintar-pintar dalam mengelola proses pembelajaran, bukan lagi seperti guru yang mengajari siswa di bangku sekolah tetapi dosen dituntut lebih kreatif dalam pengelolaan pembelajaran, mulai dari memotivasi mahasiswa dengan bahasa jelas, sopan dan santun agar potensi-potensi dalam dirinya dapat dimunculkan dan dosen bersikap kooperatif.

Koeswara mengatakan bahwa dalam disiplin ilmu psikologi, motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja pada diri organisme atau individu yang menjadi penggerak dan pengarah tingkah laku individu tersebut. Para teoritikus motivasi dalam menyusun konsepsi teori mengenai motivasi bisa dikategorikan dalam tiga pendekatan yang utama, yakni: (1) pendekatan biologis, (2) pendekatan behavioristik, dan (3) pendekatan kognitif.[224]

[224]Koeswara, *Motivasi Teori dan Penelitian*, (Bandung: Penerbit Angkasa,

Dosen yang mempunyai kompetensi yang baik dalam pembelajaran, akan mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik input mahasiswa seperti kecenderungan gaya belajar, motivasi, pengelolaan kelas serta evaluasi yang tepat untuk mahasiswanya. Motivasi dalam belajar dilakukan dengan mengatur situasi atau atmosfer pembelajaran yang kondusif. Kondisi yang diciptakan ini dapat menjadi penguatan (*reinforcement*). Penguatan dalam belajar ini dapat diciptakan antara lain: jika seorang pengajar dapat memberikan pengaruh positif dalam proses belajar mengajar dengan menunjukkan kompetensi yang baik sehingga menimbulkan respons positif dari mahasiswa.[225]

Salah satu unsur kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogis, dosen berperan dalam membangun kemampuan belajar mahasiswa dengan cara membangkitkan motivasi belajar yang menentukan dalam peningkatan usaha serta keberhasilan pembelajaran. Proses pembelajaran

---

1995), h. 1-2

[225]Sri Kustiyati, *Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dosen untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Mahasiswa* (Indonesia Jurnal Kebidanan, I No.I (2017) h. 37

bisa berlangsung dengan baik jika dosen mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

4) Kemampuan dosen dalam melakukan evaluasi hasil perkuliahan

Pelaksanaan penilaian yang dilakukan dosen harus objektif dan transparan. Mahasiswa harus tahu apakah mereka dapat melakukan remedial pada saat nilainya masih kurang atau dalam suatu tugas masih mendapat nilai yang terkategori belum lulus menurut standar penilaian. Setiap penilaian yang dilakukan dosen harus adil, terbuka dan objektif. Pemberian tugas dalam perkuliahan salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan seorang dosen adalah dengan cara pemberian tugas dalam perkuliahan. Tugas-tugas yang diberikan perlu mempertimbangkan kapasitas mahasiswa dalam melakukannya, waktu yang dibutuhkan dan bobot kesulitan dari setiap tugas yang diberikan. Pemberian tugas dalam perkuliahan bukan suatu upaya mempersulit mahasiswa dalam belajar dan menyiksa mereka terutama pada aspek waktu yang digunakan dan pertimbangan aspek psikologis lainnya. Tugas-tugas dalam perkuliahan harus diberikan secara

tepat, proporsional, bermanfaat, dan terjangkau oleh mahasiswa yang mengerjakannya.

Dosen perlu memiliki kemantapan keterampilan dalam menyusun program pengajaran dan sekaligus program penilaian yang berorientasikan pada kompetensi peserta didik. Prosedur evaluasi atau penilaian yang dilakukan sekaligus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran yang menyeluruh perlu benar-benar dikuasai.

a) Hasil evaluasi dari 32 ketua program studi

Observasi dilakukan terhadap dosen untuk menjaring tingkat penguasaan dosen dalam melakukan evaluasi kepada mahasiswa setelah dilakukan kegiatan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan terhadap 32 ketua program studi sebagai berikut ini

Tabel. 4.16 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Kemampuan Dosen dalam Melakukan Evaluasi Perkuliahan[226]

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
1	Dosen melaksanakan ujian tengah semester sesuai dengan waktu yang	0	0	5	27	32	123	3.84	T

[226]Sumber Data: Hasil olah lembar observasi dari jawaban responden (32 Ketua Prodi Prodi)

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
	telah ditetapkan/kalender akademik								
2	Dosen melaksanakan ujian akhir semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik	0	0	12	20	32	116	3.62	T
3	Dosen melayani mahasiswa mengikuti UAS yang jumlah kehadirannya dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka	0	0	6	26	32	122	3.81	T
4	Kesesuaian antara materi yang diujikan dengan materi kuliah yang disampaikan	0	0	5	27	32	123	3.84	T
5	Pengawasan ujian dilakukan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah	0	0	6	26	32	122	3.81	T
6	Transparansi dalam penetapan nilai akhir dan pengumuman nilai akhir	0	2	15	15	32	107	3.34	T

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
	kepada mahasiswa								
7	Dosen memberikan ujian susulan bagi mahasiswa Peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian Akhir Semester dengan alasan yang kuat	0	0	14	18	32	114	3.56	T
8	Dosen penanggung jawab mata kuliah menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan	0	0	10	22	32	118	3.68	T
9	Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **D** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai	0	0	17	15	32	114	3.45	T

No.	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
	akhir mata kuliah diumumkan								
10	Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **E** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan	2	20	5	5	32	77	2.4	S
11	Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada dosen penanggung jawab	0	0	21	12	32	101	3.15	T
12	Objektivitas dalam memberikan nilai kepada mahasiswa	1	0	17	14	32	108	3.58	T
	Jumlah	3	22	133	227		1345	3.50	**T**

Keterangan: T= Tinggi (3, 01-4), S= Sedang (2, 01-3), dan R= Rendah (1-2)

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa penguasaan dosen dalam melakukan penilaian berdasarkan hasil analisis adalah relevansinya berkategori tinggi dan pada setiap sub aspek ditemukan ada 12 berkategori tinggi dan 1 berkategori sedang. Hasil analisis data observasi dari tabel di atas tentang penguasaan dosen dalam melakukan penilaian dengan capaian unit berkategori tinggi atau berada pada nilai rata-rata 3,50 dari 12 sub aspek yang di evaluasi.

b) Hasil evaluasi dari 70 ketua tingkat

Selain kemampuan dosen dalam melakukan evaluasi hasil perkuliahan yang di evaluasi datanya dari 32 Ketua Prodi, dilakukan pula evaluasi yang sumber datanya diambil dari 70 ketua tingkat. Hal ini dilakukan agar keabsahan data yang diperoleh dari 32 ketua program studi memiliki kredibilitas yang tinggi. Untuk lebih jelasnya kemampuan dosen dalam melakukan evaluasi hasil perkuliahan dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan terhadap 70 ketua tingkat dari masing-masing perwakilan dari setiap fakultas sebanyak 10 orang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.17 Tabulasi Skor Hasil Penilaian Observer terhadap Kemampuan Dosen dalam Melakukan Evaluasi Perkuliahan[227]

No	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
1	Dosen melaksaksanakan ujian tengah semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik	0	24	34	22	70	238	3.4	T
2	Dosen melaksanakan ujian akhir semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik	0	8	25	37	70	239	3.41	T
3	Dosen melayani mahasiswa mengikuti UAS yang jumlah kehadirannya dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka	0	5	37	28	70	233	3.32	T
4	Kesesuaian antara materi yang diujikan dengan materi kuliah yang disampaikan	4	3	35	28	70	227	3.24	T

[227]Sumber Data: Hasil olah lembar observasi dari jawaban observer (32 Ketua Prodi Prodi)

No	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
5	Pengawasan ujian dilakukan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah	3	17	21	29	70	213	3.04	T
6	Transparansi dalam penetapan nilai akhir dan pengumuman nilai akhir kepada mahasiswa	0	17	20	33	70	226	3.22	T
7	Dosen memberikan ujian susulan bagi mahasiswa Peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian akhir semester dengan alasan yang kuat	2	7	20	41	70	242	3.45	S
8	Dosen penanggung jawab mata kuliah menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan	6	14	13	37	70	221	3.13	T
9	Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **D** pada	11	17	36	6	70	177	2.52	S

No	Hal yang di Nilai	Rating				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4				
	semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan								
10	Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **E** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan	2	35	30	0	70	162	2.31	S
11	Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada dosen penanggung jawab	0	11	44	15	70	214	3	T
12	Objektivitas dalam memberikan nilai kepada mahasiswa		8	48	14	70	274	3.91	T
	Jumlah	**3**	**22**	**133**	**227**		**1345**	**3.50**	**T**

Keterangan: T= Tinggi (3, 01-4), S= Sedang (2, 01-3), dan R= Rendah (1-2)

Dari tabel 4.17 dapat ketahui bahwa penguasaan dosen dalam melakukan evaluasi hasil perkuliahan berdasarkan analisis 12 sub aspek yang di evaluasi terdapat 10 sub aspek yang berkategori tinggi dan 2 sub aspek berkategori sedang dari standar objektif yang di evaluasi. Namun demikian, evaluasi tersebut menunjukkan unit capaian nilai rata-rata 3,50 atau berkategori tinggi.

Berdasarkan pada deskripsi hasil studi tentang pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen Unismuh Makassar dan kajian pustaka tentang standar penilaian menurut ketentuan UU Guru dan Dosen serta standar penilaian dalam PP SNP Tahun 2005, maka dapat diperoleh poin penting bahwa kinerja dosen Unismuh Makassar dalam pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran cukup baik. Analisis ini dibenarkan oleh beberapa ketua penjaminan mutu di tingkat fakultas maupun ketua prodi pada saat triangulasi data-data hasil studi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan oleh dosen Unismuh Makassar telah memenuhi

unsur legalitas formal. Dikatakan demikian karena para dosen Unismuh Makassar dalam melakukan evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan tuntutan UU Guru dan Dosen serta standar proses dalam SNP Tahun 2005.

Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses pembelajaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh mahasiswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Melaksanakan penilaian proses pembelajaran merupakan bagian tugas dosen yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung.

Keputusan hasil evaluasi proses (*transactions)* berdasarkan penilaian 32 ketua prodi dan 70 ketua tingkat masing-masing dari 7 fakultas se Unismuh Makassar, berkaitan dengan proses perkuliahan yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu penguasaan dosen dalam menyusun dan menyiapkan administrasi perkuliahan, penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan, interaksi dan kemampuan dosen dalam melakukan penilaian.

Tabel 4.18 Hasil Evaluasi Proses (*Transactions)* Berdasarkan Kriteria/Standar Objektif Penyelenggaraan Program Penjaminan Mutu Unismuh Makassar

Standar Objektif Implementasi Program	Intensitas Objektif	Ketercapaian			Kepetusan
		T	KT	TT	
A. Penguasaan dosen dalam menyusun dan menyiapkan administrasi perkuliahan					
	a. Dosen menyusun silabus mata kuliah	T			Berdasarkan evaluasi proses berkaitan dengan: penguasaan dalam menyusun dan menyiapkan administrasi perkuliahan terdapat 7 sub aspek yang di evaluasi. Dari 7 sub aspek terdapat 1 sub aspek yang kurang terpenuhi dari standar objektif, yaitu dosen belum sepenuhnya menyusun buku ajar dengan nilai rata-rata 2,9.
	b. Dosen menyusun RPS perkuliahan	T			
	c. Dosen menyusun buku ajar		KT		
	d. Dosen menyusun materi perkuliahan yang mempertimbangkan perkembangan keilmuan jurusan	T			
	e. Dosen menyerahkan silabus ke jurusan/prodi	T			
	f. Dosen menyerahkan RPS perkuliahan ke jurusan/prodi	T			
	g. Dosen merevisi silabus dan RPS setiap awal semester	T			
B.Penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan					
1. Hasil Evaluasi dari 34 Ketua Prodi	a. Dosen mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	T			Penguasaan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan terdapat 15 sub aspek yang di evaluasi terdapat 1 sub aspek yang kurang terpenuhi sesuai standar objektif yaitu dosen menyampaikan materi kuliah berbasis IT dengan nilai rata-rata 2,9 atau berkategori sedang. Namun capaian unit
	b. Dosen menyampaikan tata tertib perkuliahan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa	T			
	c. Dosen melakukan absensi kehadiran mahasiswa setiap pertemuan	T			
	d. Keaktifan dosen dalam memberikan perkuliahan	T			
	e. Dosen memberikan sansi kepada mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit	T			
	f. Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan yang akan	T			

	dicapai mahasiswa				berkategori tinggi dengan rata-rata nilai 3,44.
	g. Dosen mengisi berita acara perkuliahan dan menandatanganinya	T			
	h. Kesuaian materi perkuliahan yang disampaikan dengan silabus yang telah ditetapkan	T			
	i. Dosen menyiapkan dan menggunakan media pembelajaran dalam perkuliahan	T			
	j. Materi yang diajarkan dosen mudah dipahami	T			
	k. Dosen menyampaikan materi kuliah berbasis IT		KT		
	l. Dosen menggunakan metode mengajar sesuai dengan materi kuliah	T			
	m. Dosen melakukan pembelajaran yang interaktif	T			
	n. Dosen mengajar 16X tatap muka di kelas	T			
	o. Dosen memberikan pertemuan tambahan jika jumlah pertemuan belum mencapai 16 tatap muka	T			
2. Hasil Evaluasi dari 70 Ketua Tingkat	a. Dosen mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	T			Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 15 sub aspek yang di evaluasi terdapat 2 yang belum terpenuh yaitu 1) dosen memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit dalam mengikuti perkuliahan berkategori sedang dengan nilai rata-rata 2.94, 2) dosen menyampaikan materi kuliah berbasis IT berkategori rendah dengan nilai rata-rata 2.05. Namun demikian, capaian
	b. Dosen menyampaikan tata tertib perkuliahan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa di awal pertemuan	T			
	c. Dosen melakukan absensi kehadiran mahasiswa setiap pertemuan	T			
	d. Keaktifan dosen dalam memberikan perkuliahan	T			
	e. Dosen memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit mengikuti perkuliahan		**KT**		
	f. Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan yang akan dicapai mahasiswa	T			
	g. Ketepatan waktu dosen dalam mengawali dan mengakhiri perkuliahan	T			

	h. Ketertiban dosen dalam mengisi berita acara perkuliahan dan menandatanganinya	T			unit berkategori tinggi atau nilai rata-rata 3.14 dari 15 sub aspek yang di evaluasi.
	i. Dosen menyiapkan dan menggunakan media pembelajaran dalam perkuliahan	T			
	j. Materi yang diajarkan dosen mudah dipahami	T			
	k. Dosen menyampaikan materi kuliah berbasis IT			**TT**	
	l. Dosen menggunakan metode mengajar yang bervariasi	T			
	m. Dosen melakukan pembelajaran yang interaktif	T			
	n. Dosen mengajar 16x tatap muka di kelas	T			
	o. Dosen memberikan pertemuan tambahan jika jumlah pertemuan belum mencapai 16x tatap muka	T			
C. Interaksi dosen dengan mahasiswa dalam perkuliahan					
1. Hasil evaluasi dari 32 Ketua Prodi	a. Kemampuan dalam memotivasi mahasiswa dalam pembelajaran	T			Berdasarkan evaluasi proses berkaitan dengan interaksi dosen dengan mahasiswa dalam perkuliahan terdapat 4 sub aspek yang di evaluasi semuanya telah memenuhi standar objektif atau berkategori tinggi dengan nilai rata-rata 3.54.
	b. Penggunaan bahasa dalam pelaksanaan perkuliahan (kejelasan dan sopan santun dalam berbahasa)	T			
	c. Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran.	T			
	d. Bersikap kooperatif menerima pendapat dalam berdiskusi	T			
2. Hasil evaluasi dari 70 Ketua Tingkat	a. Kemampuan dalam memotivasi mahasiswa dalam pembelajaran				Berdasarkan evaluasi proses berkaitan dengan interaksi dosen dengan mahasiswa dalam perkuliahan terdapat 4 sub aspek yang di evaluasi semuanya telah memenuhi
	b. Penggunaan bahasa dalam pelaksanaan perkuliahan (kejelasan dan sopan santun dalam berbahasa)				
	c. Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran.				

	d. Bersikap kooperatif menerima pendapat dalam berdiskusi				standar objektif atau berkategori tinggi dengan nilai rata-rata 3,25.
D. Evaluasi/Penilaian Perkuliahan (Kemampuan dosen dalam melakukan penilaian)					
1. Hasil evaluasi dari 32 Ketua Prodi	a. Dosen melaksanakan ujian tengah semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik	T			4. Kemampuan dosen dalam melakukan evaluasi perkuliahan terdapat 12 sub aspek yang di evaluasi. Dari 12 sub aspek tersebut 11 sub aspek telah memenuhi standar objektif dan 1 sub aspek yang belum terpenuhi standar objektif yaitu Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **E** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan. Capaian unit dengan nilai rata-rata 3,50.
	b. Dosen melaksanakan ujian akhir semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik	T			
	c. Dosen melayani mahasiswa mengikuti UAS yang jumlah kehadirannya dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka	T			
	d. Kesesuaian antara materi yang diujikan dengan materi kuliah yang disampaikan	T			
	e. Pengawasan ujian dilakukan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah	T			
	f. Transparansi dalam penetapan nilai akhir dan pengumuman nilai akhir kepada mahasiswa	T			
	g. Dosen memberikan ujian susulan bagi mahasiswa Peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian Akhir Semester dengan alasan yang kuat	T			
	h. Dosen penanggung jawab mata kuliah menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan	T			
	i. Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **D** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai	T			

	akhir mata kuliah diumumkan				
	j. Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **E** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan		**KT**		
	k. Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada dosen penanggung jawab	T			
	l. Objektivitas dalam memberikan nilai kepada mahasiswa	T			
b. Hasil evaluasi dari 70 Ketua Tingkat	a. Dosen melaksanakan ujian tengah semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/ kalender akademik	T			Hasil evaluasi penguasaan dosen dalam melakukan evaluasi hasil perkuliahan berdasarkan analisis 12 sub aspek yang di evaluasi terdapat 10 sub aspek yang berkategori tinggi dan 2 sub aspek berkategori sedang dari standar obyektif yang di evaluasi, yaitu 1) dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **D** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan dengan nilai rata-rata 2,52, 2) dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang
	b. Dosen melaksanakan ujian akhir semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik	T			
	c. Dosen melayani mahasiswa mengikuti UAS yang jumlah kehadirannya dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka	T			
	d. Kesesuaian antara materi yang diujikan dengan materi kuliah yang disampaikan	T			
	e. Pengawasan ujian dilakukan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah	T			
	f. Transparansi dalam penetapan nilai akhir dan pengumuman nilai akhir kepada mahasiswa	T			
	g. Dosen memberikan ujian susulan bagi mahasiswa Peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian akhir semester dengan alasan yang kuat	T			
	h. Dosen penanggung jawab mata kuliah menentukan		KT		

	waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan				memperoleh nilai **E** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan dengan nilai rata-rata 2,31.Namun demikian evaluasi tersebut menunjukkan unit capaian nilai rata-rata 3,2 atau berkategori tinggi.
	i. Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **D** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan		KT		
	j. Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai **E** pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan	T			
	k. Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada dosen penanggung jawab	T			
	l. Objektivitas dalam memberikan nilai kepada mahasiswa	T			

Keterangan: T = Tercapai, KT=Kuran Tercapai, TT= Tidak Tercapai

e. Hasil Capaian Mutu Lulusan pada Tahapan Hasil (*Output dan Outcomes*) di Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil capaian mutu lulusan mencakup rekaman hasil program mutu lulusan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Skema evaluasi hasil mutu lulusan ini dapat dilihat pada gambar skema sebagai berikut

Tahapan Deskripsi Standar

Gambar 4.10 Skema Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil (*output* dan *outcomes)* adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program. Ruang lingkup evaluasi pada tahapan hasil meliputi: analisis hasil dokumen persentase kelulusan, lama studi mahasiswa, predikat lulusan mahasiswa, masa tunggu mendapatkan pekerjaan, dan relevansi pendidikan dengan pekerjaan alumni.

Kinerja dosen memiliki kontribusi dan pengaruh positif terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian kinerja dosen memberikan kontribusi terhadap mutu lulusan dalam hal *output* dan *outcome.*

1) Persentase kelulusan mahasiswa angkatan 2012/2013

   Mutu lulusan perguruan tinggi tidak terlepas dari kualitas tenaga pendidik dan proses pembelajaran yang dilakukan. Apa yang telah dilaksanakan pihak Unismuh Makassar mulai dari seleksi dosen, pengembangan kurikulum, dan proses perkuliahan, maka hasil capaiannya dapat dilihat pada mutu lulusannya. Mutu lulusan dapat dilihat dari lama studi dan IPK yang diperoleh oleh mahasiswa. Perolehan data gambaran efektivitas hasil secara akademik dilakukan analisis dokumen berkaitan dengan jumlah mahasiswa program studi yang masuk di tahun ajaran 2012/2013 lalu kemudian melihat persentase kelulusan mahasiswa di tahun 2016. Untuk mengetahui persentase kelulusan mahasiswa maka terlebih dahulu digambarkan jumlah mahasiswa yang masuk di Unismuh Makassar melalui analisis dokumen mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013.

Tabel 4.19 Daftar Mahasiswa Setiap Prodi Anggkatan 2012/2013

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa
1	Agama Islam	293
2	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	3,043
3	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	397
4	Ekonomi dan Bisnis	1,088
5	Pertanian	348
6	Teknik	364
7	Kedokteran	127
	Jumlah	**5660**

Sumber Data: Simak Unismuh Makassar, tahun 2017

Pada tabel 4.19 dari 7 fakultas dapat diketahui jumlah mahasiswa masing-masing setiap fakultas di mana jumlah keseluruhan mahasiswa di tahun ajaran 2012/2013 adalah 5660 orang.[228] Melalui analisis dokumen data mahasiswa yang masuk tahun 2012/2013 tersebut, maka digunakan kriteria atau standar objektif Manual *Book* Unismuh Makassar tahun 2016, mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat kelulusan apabila telah menempuh masa studi 4 tahun (8 semester) dan dapat ditempuh 7 tahun 14 semester dengan jumlah SKS 144. Untuk melihat *output* mahasiswa angkatan tahun 2012/2013 yang menyelesaikan studinya dari tahun 2015[229] sampai

[228]Sumber data: Sistem Informasi Akademik (Simak) Unismuh Makassar, Tahun 2016.
[229] Buku Alumni Unismuh Makassar, Tahun 2016.

2016[230] tersebut. Dapat diuraikan capaian lulusan sebagai berikut

Tabel 4.20 Lama Studi Mahasiswa Angkatan 2012/2013

No.	Fakultas	Jumlah Mahasiswa Angkatan 2012	Lama Studi			Keterangan
			4 Thn	4 Thn – 5 Thn	5 Thn Ke atas	
1	Agama Islam	293	234	51	9	Data yang diambil adalah mahasiswa yang menyelesaikan studinya pada tahun 2016
2	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	3,043	2,152	860	31	
3	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	397	275	101	21	
4	Ekonomi dan Bisnis	1,088	698	347	43	
5	Pertanian	348	263	73	12	
6	Teknik	364	73	244	47	
7	Kedokteran	127	17	110	-	
Jumlah		**5660**	**3712**	**1786**	**163**	
Persentasi			**65,58%**	**31,55%**	**2,87%**	

Sumber Data: Simak Unismuh Makassar, tahun 2017

Dari tabel 4.20 di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa angkatan 2012 yang telah menempuh masa studi 4 tahun sebanyak 3712 orang atau 65,58%, untuk masa studi 4-5 tahun sebanyak 1786 orang atau 31,55%, untuk 5 tahun ke atas sebanyak 163 orang atau 2,87%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masa studi mahasiswa Unismuh Makassar dari 7 Fakultas sebagian besar dapat menyelesaikan

[230] Buku Alumni Unismuh Makassar, Tahun 2017.

studinya tepat waktu yaitu 4 tahun dengan presentasi 65,58%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015, Pasal 16 poin (d) tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan S1 yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.[231] Perkuliahan diselenggarakan dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), untuk program Sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh maksimal 14 semester (7 Tahun) terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.[232] Mengacu pada landasan normatif lama studi mahasiswa angkatan 2012/2013 sudah memenuhi standar objektif yang telah ditentukan.

2) Predikat lulusan angkatan 2012/2013

Dalam manual *book* Unismuh Makassar tentang Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK bagi S1 dengan Predikat

[231]Republik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015, h. 17.

[232]*Manul Book*, Manajemen Mutu Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016, h. 12.

IPK 2,75-3,00 : Memuaskan

IPK 3,01-3,50 : Sangat Memuaskan

IPK 3,51-4,00 : Pujian (*Cumlaud*e) dengan ketentuan waktu studi maksimal 4 (empat) tahun

Melalui analisis dokumen data mahasiswa yang masuk tahun 2012 tersebut, maka digunakan kriteria atau standar objektif berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 dan *Manual Book* Unismuh Makassar tahun 2016, Mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat kelulusan apabila telah menempuh masa studi 4 tahun (8 semester) dan memenuhi 144 SKS, serta IPK 2,75. Hasil studi dokumen dalam menelusuri IPK alumni Unismuh Makassar angkatan 2012 dapat disajikan pada tabel 4.21 berikut

Tabel 4.21 Indeks Prestasi Kelulusan Mahasiswa Angkatan 2012/2013

No.	Fakultas	Jumlah Lulusan	IPK			Keterangan
			Memuakan 2,75-3,00	Sangat Memuaskan 3,00-3,50	*Cumlaude* 3,51-4,00	
1	Fakultas Agama Islam	234	3	95	136	Pengelompokan lulusan dengan perolehan IPKnya[233]
2	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2152	14	851	1287	
3	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	275	7	89	179	
4	Ekonomi dan Bisnis	698	5	112	581	

[233]Sumber data: Sistem Informasi Akademik (Simak) Unismuh Makassar, Februari 2017

5	Pertanian	263	2	57	204	
6	Teknik	73	9	43	21	
7	Kedokteran	17	-	6	11	
	Jumlah	**3712**	**40**	**1253**	**2240**	

Sumber Data: Simak Unismuh Makassar, tahun 2017

Pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari jumlah lulusan 3712 orang dapat diketahui Indeks Prestasi Kelulusan (IPK) mahasiswa angkatan 2012 yaitu lulusan yang mendapatkan nilai IPK 2,75-3,00 sebanyak 40 orang atau 1,07%, lulusan yang mendapatkan nilai IPK 3,01-3,50 sebanyak 1253 orang atau 33,75%, dan lulusan yang mendapatkan nilai IPK 3,50-4,00 sebanyak 2240 orang atau 60,34%.

Berdasarkan Indeks Prestasi Kelulusan mahasiswa angkatan 2012 dapat dinyatakan bahwa lulusan tahun tersebut cukup membanggakan berdasarkan standar predikat kelulusan yang ditetapkan oleh Unismuh Makassar. Hal ini berdasarkan perolehan IPK lulusan > yaitu 3,50-4,00 atau kategori *Cumlaude* dengan capaian 60,34%. Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015, Pasal 25 poin 2 tentang Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).[234]

3) Masa tunggu bekerja alumni angkatan 2012/2013

Masa tunggu merupakan lamanya mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah dinyatakan selesai menempuh studi di perguruan tinggi hingga mendapatkan pekerjaan. Setelah lulus dari perguruan tinggi para alumni tentunya akan mencari pekerjaan baik itu yang relevan dengan pendidikannya maupun yang tidak relevan dengan pendidikan yang didapatkan pada perguruan tinggi.

Peran alumni pada setiap program studi yang ada di Unismuh Makassar tentunya harus mampu

[234]Republik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015, h. 24

berkiprah dalam bekerja sesuai dengan pendidikannya. Penelusuran alumni dapat dilakukan oleh Program Studi untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya melalui *tracer study*. *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja. Berdasarkan hasil *tracer study* yang dilakukan Unismuh Makassar terhadap alumni angkatan 2012/2013 berkaitan dengan masa tunggu mendapatkan pekerjaan, maka terlebih dahulu digambarkan alumni yang sudah bekerja dan yang belum bekerja melalui tabel berikut

Tabel 4.22 Data Alumni yang Sudah Bekerja Angkatan 2012/2013

No.	Fakultas	Jumlah Lulusan	Kategori		Keterangan
			Bekerja	Belum Bekerja	
1	Agama Islam	234	211	23	Untuk mahasiswa fakultas Kedokteran setelah menempuh perkuliahan di S1 selanjutnya mengikuti **Pendidikan Profesi Dokter Umum (Koass) dan Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKD)**
2	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2,152	1670	482	
3	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	275	197	78	
4	Ekonomi dan Bisnis	698	436	262	
5	Pertanian	263	210	53	
6	Teknik	73	64	9	
7	Kedokteran	17	-	-	
Jumlah		**3712**	**2788**	**902**	

Sumber Data: Dokumen Alumni Unismuh Makassar, tahun 2017

Dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa alumni angkatan 2012/2013 yang sudah bekerja sebanyak 2788 orang atau 75,10% dan yang belum bekerja sebanyak 902 orang atau 24,29%. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak Lembaga Penjaminan Mutu Universitas, bahwa mahasiswa yang belum bekerja tentunya sebagian besar melanjutkan studinya di jenjang Magister (S2).[235]

Kualitas dari suatu alumni menunjukkan kualitas dari latar belakang pendidikannya. Untuk mengetahui kualitas dari alumni tersebut tentunya dilihat dari kemampuan alumni dalam pencarian kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau dengan kata lain mampu berkiprah dalam dunia kerja. Berbagai macam profil kerja alumni Unismuh Makassar setelah menyelesaikan studinya yaitu di antaranya: bekerja sebagai guru, karyawan di berbagai perusahaan swasta, instansi pemerintah, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ada juga alumni yang membuka usaha sendiri (wirausaha).

[235]Muh. Tahir (56 tahun), Wakil Rektor III Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 22 Maret 2017.

Untuk mendapatkan informasi atau data alumni yang sudah mendapatkan pekerjaan tentunya pihak Universitas Muhammadiyah Makassar telah melakukan studi pelacakan di tingkat universitas dengan melaksanakan survei melalui program Tim Studi Pelacakan (*Tim Tracer study*) dengan menggunakan beberapa cara, yaitu lewat Organisasi Ikatan Keluarga Alumni (IKA) baik IKA di tingkat universitas, fakultas, dan prodi serta melalui pengurus IKA yang ada di setiap kabupaten kota yang telah dibentuk oleh IKA Pusat Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain pelacakan alumni yang dilakukan lewat organisasi IKA tentunya data didapatkan lewat *Tracer Study* pada saat alumni melegalisir ijazah, melalui grup WA alumni, melalui telepon, kunjungan alumni di *facebook*, dan kuisioner.[236]

Diungkapkan pula Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas bahwa: apabila memperhatikan keefektifan pelaksanaan studi pelacakan lulusan dan evaluasi pengguna lulusan lebih dominan dilakukan sendiri oleh program studi setiap tahun akademik. Sementara di tingkat

[236]Muh. Tahir (56 tahun), Wakil Rektor III Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 22 Maret 2017.

universitas hanya sebatas memantau dan memfasilitasi secara umum program studi yang telah melakukan studi pelacakan lulusannya tersebut, yang diawali sosialisasinya kepada alumni baru setiap pelaksanaan kegiatan ramah tamah setiap pasca kegiatan wisuda untuk membantu melakukan penelusuran data alumni di daerahnya masing-masing.[237]

Hasil penelusuran data alumni melalui instrumen *tracer study* yang digambarkan berkaitan dengan alumni yang sudah bekerja dan yang belum bekerja, selanjutnya digambarkan masa tunggu alumni mendapatkan pekerjaan. Masa tunggu bekerja alumni tentunya berbeda-beda lamanya ada yang menunggu dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, menunggu 3 sampai 6 bulan, menunggu 7 bulan sampai 1 tahun dan ada pula yang menunggu dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan disajikan dalam tabel berikut

[237]Lukman Hakim (54 tahun), Ketua Penjaminan Mutu Unismuh Makassar, *Wawancara*, 21 Maret 2017 di Unismuh Makassar.

Tabel 4.23 Masa Tunggu Bekerja Alumni Angkatan 2012/2013

No.	Fakultas	Alumni yang Sudah Bekerja	Masa Tunggu			
			Lansung Bekerja	1-3 bulan	3-6 bulan	6 bulan ke atas
1	Agama Islam	211	17	53	97	44
2	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1670	82	245	739	604
3	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	197	21	48	97	31
4	Ekonomi dan Bisnis	436	57	102	128	149
5	Pertanian	210	32	43	82	53
6	Teknik	64	13	19	24	8
7	Kedokteran	-				
Jumlah		**2788**	**222**	**510**	**1167**	**889**

Sumber Data: Dokumen Alumni Unismuh Makassar, tahun 2017

Dari tabel 4.23 dapat diketahui bahwa waktu tunggu kerja alumni setelah lulus dari perguruan tinggi tentunya sangat bervariasi yaitu ada yang langsung bekerja, kurang dari 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, dan 6 bulan ke atas. Dari tabel di atas waktu tunggu kerja alumni angkatan 2012/2013 yang langsung bekerja sebanyak 222 orang atau 7,98%, alumni yang mendapatkan pekerjaan 1 sampai 3 bulan sebanyak 510 orang atau 18,29%, alumni yang mendapatkan pekerjaan setelah 3 sampai 6 bulan sebanyak 1167 orang atau 41,85%, alumni yang mendapatkan pekerjaan setelah 6 bulan ke atas sebanyak 889 orang atau 31, 88%.

Dari tabel 4.26 menunjukkan bahwa dari jumlah alumni 2788 orang secara keseluruhan yang sudah bekerja rata-rata masa tunggu mendapatkan pekerjaan yaitu di bawah 6 bulan dengan capaian 68,10%. Melihat persentase alumni yang mendapatkan pekerjaan tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan pihak universitas, fakultas, dan prodi dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sehingga memudahkan para alumni terserap dalam dunia kerja.

Tujuan dilakukannya *tracer study* adalah untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan perguruan tinggi terhadap anak didiknya dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kurikulum. Evaluasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja sangat diperlukan oleh perguruan tinggi agar tidak terdapat jarak antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja nyata yang ada di masyarakat.

Relevansi Pendidikan dan Pekerjaan Alumni Angkatan 2012/2013

Adapun relevansi pendidikan dengan pekerjaan yang didapatkan alumni angkatan 2012/2013 setelah selesai dari Unismuh Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.24 Relevasi Latar Belakang Pendidikan dengan Pekerjaan Alumni Unismuh Makassar

No	Fakultas	Alumni yang Sudah Bekerja	Relevan	Tidak Relevan
1	Agama Islam	211	187	24
2	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1670	1536	134
3	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	197	153	44
4	Ekonomi dan Bisnis	436	396	40
5	Pertanian	210	198	12
6	Teknik	64	53	11
7	Kedokteran	-	-	-
Jumlah		**2788**	**2123**	**665**
Persentasi			**76.14**	**23.85**

Sumber Data: Dokumen Alumni Unismuh Makassar, tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.24 berkaitan relevansi pendidikan alumni dengan pekerjaaan yang didapat. Dapat diketahui bahwa alumni yang sudah bekerja dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya menunjukkan bahwa dari 2788 alumni yang sudah bekerja terdapat 2123 orang atau 76,14% yang relevan dengan pendidikannya sedangkan yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya sebanyak 665 orang atau 23.85%.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa alumni angkatan 2012/2013 menunjukkan bahwa lebih banyak yang sudah bekerja berdasarkan dengan latar belakang pendidikannya

dibandingkan dengan yang tidak relevan antara pendidikan dan pekerjaannya.

Unismuh Makassar dalam melakukan pelacakan alumninya tidak terlepas dari berbagai kendala dan halangan, Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni mengungkapkan bahwa: Selama ini yang kami lakukan dalam pelacakan alumni belum maksimal karena metode yang digunakan masih bersifat manual. Hal ini kami sadari masih banyak kekurangan dalam melakukan pelacakan alumni. Namun demikian untuk mengevaluasi seberapa besar lulusan yang terserap di dunia kerja sesuai dengan bidang ilmunya dan berapa lama waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan perlu ada metode yang dapat memudahkan untuk dilakukan pelacakan alumni.[238]

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar alumni Unismuh Makassar angkatan 2012/2013 telah bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun demikian, masih memiliki berbagai kendala dalam melakukan pelacakan dikarenakan masih menggunakan metode yang bersifat manual.

[238]Muh. Tahir (56 tahun), Wakil Rektor III Unismuh Makassar, *Wawancara*, Unismuh Makassar, 22 Maret 2017

Studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan antara 1-3 tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, *output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta Input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosio geografis lulusan.

Keputusan Evaluasi Hasil (*output* dan *outcomes*) berdasarkan penilaian studi dokumen, berkaitan dengan persentase kelulusan mahasiswa angkatan 2012/2013, lama studi angkatan, predikat lulusan, masa tunggu bekerja alumni, dan relevansi pendidikan dengan pekerjaan alumni.

Tabel 4.25 Hasil Evaluasi Hasil (*Output* dan *Outcomes*) Berdasarkan Kriteria/Standar Objektif Penyelenggaraan Program Penjaminan Mutu Unismuh Makassar

Standar Objektif / **Implementasi Program**	**Intensitas Objektif**	**Keputusan**
1. Lama Studi Mahasiswa Angkatan 2012/2013	Jumlah mahasiswa angkatan 2012/2013 sebanyak 5660 yang telah menempuh masa studi 4 tahun sebanyak 3712	Berdasarkan Evaluasi Hasil (*output* dan *outcomes*) berkaitan dengan: 1. Lulusan angkatan 2012/2013 dari 7 Fakultas

Standar Objektif Implementasi Program	Intensitas Objektif	Keputusan
	orang atau 65,58%, untuk masa studi 4-5 tahun sebanyak 1786 orang atau 31,55%, untuk 5 tahun ke atas sebanyak 163 orang atau 2,87%.	menunjukkan sebagian besar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu yaitu 4 tahun dengan presentasi 65,58%. Hal tersebut menunjukkan ketercapaian dengan kategori cukup memuaskan.
2. Predikat Lulusan Angkatan 2012/2013	Jumlah alumni angkatan 2012/2013 sebanyak 3712 orang dengan peringkat IPK yaitu lulusan yang mendapatkan nilai IPK 2,75-3,00 sebanyak 40 orang atau 1,07%, lulusan yang mendapatkan nilai IPK 3,01-3,50 sebanyak 1253 orang atau 33,75%, dan lulusan yang mendapatkan nilai IPK 3,50-4,00 sebanyak 2240 orang atau 60,34%	2. Peringkat IPK lulusan menunjukkan bahwa lebih banyak lulusan yang mendapatkan IPK >3,50-4,00 dengan persentasi 60,34% dibanding dengan IPK dibawah 3,50 dengan persentasi 34,82 %. Hal tersebut menunjukkan ketercapaian atau kategori dengan pujian
3. Masa Tunggu Bekerja Alumni angkatan 2012	Masa tunggu bekerja alumni angkatan 2012/2013 yaitu yang langsung bekerja sebanyak 222 orang atau 7,98%, lulusan yang mendapatkan	3. Masa tunggu bekerja alumni menunjutkan lebih banyak mendapatkan pekerjaan dibawah 6 bulan dengan ketercapaian 68, 10% dibanding dengan 6 bulan ke

Standar Objektif Implementasi Program	Intensitas Objektif	Keputusan
	pekerjaan 1 sampai 3 bulan sebanyak 510 orang atau 18,29, alumni yang mendapatkan pekerjaan setelah 3 sampai 6 bulan sebanyak 1167 orang atau 41,85%, lulusan yang mendapatkan pekerjaan setelah 7 bulan ke atas sebanyak 889 orang atau 31, 88%.	atas. Hal tersebut menunjutkan ketercapaian dengan kategori memuaskan.
4. Relevansi Pendidikan dan Pekerjaan Alumni Angkatan 2012/2013	Jumlah alumni yang sudah bekerja yaitu 2788 orang, yang relevan dengan pendidikannya sebanyak 2123 orang atau 76,14% sedangkan yang tidak relevan dengan latar belakang sebanyak 665 orang atau 23.85%.	Relevansi pendidikan dan pekerjaan alumni menunjukkan lebih banyak yang bekerja relevan pendidikannya dengan ketercapaian 76,14% dibanding dengan yang tidak relevan pendidikannya. Hal tersebut menunjukkan ketercapaian dengan kategori memuaskan.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arikuton, Suharsimi. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikonto Suharsimi. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009

Arikunto Suharsimi dan Safruddin Cepi. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis dan Praktis untuk Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Barnawi dan M. Arifin. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Bogdan, Robert dan Tailor, J Steven. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Terj. A. Khosin Afandi*. Surabaya: Usaha Nasional.

Boulmetis John dan Dutwin Phyllis. 2005. *The ABCs of Evaluation: Timeless Techniques for Program and Project Managers*. San Fransisco: A Wiley imprint.

Daradjat, Zakiah. 2008. *Metodik Khusus Pengajaran Agama* Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Denzin, K.Norman dan Yvona S. Lincoln. 2009. *Handbook of Quaii'atif Resseanch, teriemahan Daryanto, dkk*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Edisi keempat.

Depertemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Gramasurya.

Dikmenum. 1999. *Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah*. Jakarta: Depdikbud.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*.

Djaali dan Muljono Pudji. 2008. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

Fattah, Nanang. 2012. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Cet. 1*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Getteng, Rahman, Abd. 2011. *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*. Yogyakarta: Graha Guru.

Glasman, S. Naftaly dan Glasman Nero David. 1998. *Evaluation in Decision Making: The Case of School Administration*. North America.

Gregory, J. Robert. 2004. *Psychological Testing: history principles and applications, 4,hed*. Boston: Pearson Education Group Inc.

Guba, G Egon & Yvonna S. 1982. *Lincoin, Effective Evaluation*. San Fransisco: Jossey Bass Publishers.

Hadi Abdul dan Nurhayati. 2010. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabet.

Hasan Haji Iye. 2013. *Evaluasi Implementasi kebijakan Mutu Pendidikan Pada sekolah menengah Atas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional*. Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.

Hamalik. 2010. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah.

Helmiati. 2013. *Evaluasi Penerapan Penjaminan Mutu pada Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri Kota Tangerang*.

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

http://www.kompasiana.com, Paradigma Input dan Output Pendidikan, diakses tangal 10 Juni 2015

http://www.kompasiana.com, Paradigma Input dan Output Pendidikan, diakses tangal 5 Juni 2016

brahim, Malik Misykat, *Evaluasi Program Bidang Pendidikan*, Makassar: Alauddin University Press, 2013

J Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdaharya, 2000

Joyce Gall P, Education. *Research An Introduction*. Seventh Edition, New York: Pearsen Education, Inc. 2003

Liba Sahban, *Evaluasi Kebijakan penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, periode 2003-2010 (Disertasi, PPs. UNJ, 2011)

Niam, Asrorun, *Membangun Profesionalitas Guru*, Jakarta: ELSAS, 2006

Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis terjemahan Tjetjep R*, Jakarta: Universiias Indonesia, 1984

Makawimbang, H. Jerri, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabet, Bandung, 2011

Muhtifah, *Lailial Evaluasi Pendidikan*. Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal al Qalam, Vol. 22, No 2, 2005.

Mulyasa E, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007

Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, London: SAGE, 1990

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Bab XV, Pasal 91, N0. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai standar minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ramly, Mansyur, Mengukuhkan Peranan Lembaga Pendidikan Dalam mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas (Perspektif Islam), (Seminar Nasional, Unismuh Makassar, 30 Mei 2016

Ruhe dan Zumbo, *Evaluation Research Methodology*. New Delhi: Sage Publication India, PVT.LTD, 2009

SAE NIKI, Macintosh Setting, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Jakarta: CV Eko Jaya, 2005

Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, London. Stylus Publishing Inc., 2002

Sevilla, Consuelo G. dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993

Siswanto dan Eli Susanti, *Evaluasi Program Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2019

Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2016

Subyanto, *Evaluasi Pendidikan llmu Pengetahuan Alam*, Jakarta: PPLPTK, 1988

Sudjada Nana, *Penilai Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

_____*Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabet, 2001

Sukarjo M. dan Komarudin Ukum, *Landasan Pedidikan, Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Sukmadinata, Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

Sukmadinata, Syaodih Nana dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan (Konsep, Prinsip,, dan Instrumen)*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Sabarguna, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2005

Sutikno Muzayanah, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: PPS UNJ, 2009

Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas, 2008

Sofyan, Ahmad, *Evaluasi Program Praktik Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan FITK-UIN Jakarta* (Disertasi, PPs. UNJ, 2012)

Tayibnapis, Yusuf Farida, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam*, Erlangga: Malang, 2007

Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Unismuh Makassar, Dokumen Akademik, Tahun 2010

_____ *Pedoman Penjaminan Mutu Akademik*, Tahun 2010

_____*Manual Book*, 2016

_____*Manul Prosedur Sistem Seleksi Penerimaan Dosen Persyarikan Sumber Daya Manusia (SDM)* Tahun 2016

Profil Penulis

Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd.I., Lahir di Tombolo, 23 Juli 1980, penulis tinggal di Pallangga Desa Taeng Anak Gowa. Penulis adalah anak dari Almarhum Abd. Hamid, K dan Muliyani, Dan suami dari St. Aminah Mansyur, S.Pd.I., dari pernikahannya lahir lah 4 orang anak yang bernama Zahran Al Faiz, Butsainah Syaihkah Wais Al Qarni dan Siti Fatima Azzahra. Seharihari penulis bekerja sebagai Dosen Tetap Unismuh Makassar Sampai Sekarang. Dan menjabat sebagai Ketua Devisi Pendidikan dan Kurikulum LP3AIK Unismuh Makassar Sampai Sekarang.